

WAJAH POLISI PRESISI

Melahirkan Banyak Inovasi dan Prestasi

PERTANYAAN DAN CATATAN UNTUK PENULIS

Ada beberapa pertanyaan dan catatan yang di tandai, silahkan dilihat kembali pak naskah nya sebelum naik cetak, berikut hlm. yang sudah di tandai:

23, 43, 54, 61, 74, 81, 92, 94, 96, 98, 99, 137, 149, 174, 184, dan 189-195.

silahkan dilampirkan juga **Sinopsis** untuk belakang sampul buku.

adapun 3 foto yang belum ditemukan tempat peletakannya (foto dihalaman selanjutnya):

Terimakasih

3 FOTO YANG BELUM DITEMUKAN TEMPAT PELETAKANNYA

Foto 14:

Siswa Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Polda Metro Jaya. SPN meluncurkan aplikasi SIGAP (Siswa Gadik Pengasuh) untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) Polri. Foto: Detik.Com



Caption Presisi Award Polda Kalimantan Tengah

Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Saputra Hasibuan menyerahkan penghargaan Presisi Award kepada Kapolda Kalteng Irjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo, di Aula Arya Dharma, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis 16 Juni 2021. Foto: Dok Lemkapi



Caption Presisi Award Polda Sumatera Selatan

Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Saputra Hasibuan menyerahkan penghargaan Presisi Award kepada Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Pol. Prof. Dr. Eko Indra Heri S. MM., di gedung Promoter Polda Sumsel, Rabu 23 Juni 2021. Foto: Dok Polda Sumsel



WAJAH POLISI PRESISI

Melahirkan Banyak Inovasi dan Prestasi

Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.



MURAI KENCANA
Divisi Buku Umum Populer
PT RajaGrafindo Persada
D E P O K

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Edi Saputra Hasibuan

Wajah Polisi Presisi: Melahirkan Banyak Inovasi dan Prestasi/
Edi Saputra Hasibuan—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Murai Kencana, 2021.
xii, 198 hlm., 23 cm.
Bibliografi: hlm. 189
ISBN -

Hak cipta 2021, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2021. KENCANA

Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.

WAJAH POLISI PRESISI

Melahirkan Banyak Inovasi dan Prestasi

Cetakan ke-1, Agustus 2021

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Yayasan Sri Hayati
Copy Editor : Nuraini
Setter : Khoirul Umam
Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwilinggung, No.112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwilinggung No. 112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



PRAKATA

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat Polri pada tanggal 1 Juli 2021 telah berusia 75 tahun. Pada usia ini banyak prestasi dan pencapaian yang sudah diraih Polri untuk Bangsa dan Negara, juga pengabdian yang diberikan kepada masyarakat. Walaupun sudah bertugas dengan baik, masih ada sebagian masyarakat yang menilai pelayanan Polri kurang optimal. Untuk itu, Polri masih dituntut untuk terus meningkatkan kinerja melalui terobosan dan inovasi-inovasi. Masyarakat menginginkan pasukan baju cokelat terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Masyarakat ingin Polri dapat merespons cepat dan tepat jika dibutuhkan.

Dapat dipahami bahwa keinginan masyarakat itu merupakan harapan ideal yang begitu tinggi terhadap Polri. Tentu saja keinginan masyarakat itu menjadi bahan renungan bagi seluruh jajaran Polri dalam melaksanakan tugas agar selalu hadir di tengah masyarakat. Secara filosofis, harapan masyarakat di seluruh dunia terhadap polisi di mana saja sama, yakni menginginkan polisi yang cepat dan tepat serta selalu benar. Polisi tidak boleh salah dan tindakannya harus sesuai aturan hukum. Bagi masyarakat, polisi harus seperti dewa dan tindakannya harus seperti malaikat. Polisi seakan tidak boleh lelah dan harus melayani dan melindungi masyarakat di mana saja dalam wilayah negara itu tanpa mengenal waktu. Tidak hanya waktu siang



dan malam, baik saat hujan maupun panas, saat masyarakat senang, polisi hadir dan saat musibah, polisi muncul. Memang itu merupakan tugas yang berat. Walaupun begitu berat dan susah, tugas polisi begitu mulia karena membantu dan menolong manusia yang kesulitan. Dalam agama juga diminta demikian. Tugas polisi menuntut pengabdian tulus yang disertai ibadah dan penuh pahala, serta kebaikan.

Kinerja Polri di mata masyarakat saat ini sudah semakin baik. Di tengah tugas berat, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hasil survei Lembaga Kajian Strategis Kepolisian (Lemkapi) pada tahun 2016, menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri masih di kisaran 68%. Pada tahun 2017 tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri mengalami peningkatan di angka 78%, dan kembali naik pada tahun 2020 menjadi sebesar 82,9%. Kemudian, tahun 2021 saat menjelang Polri merayakan HUT ke-75, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo berdasarkan hasil survei Lemkapi kini berada pada angka 86,3%. Sungguh angka tergolong tinggi setelah Polri lahir dan mengabdikan di tengah masyarakat. Sementara itu, dari hasil survei Cyrus Network yang dilakukan pada 28 Mei sampai 1 Juni 2021, hasilnya jauh lebih tinggi lagi, yakni berada pada angka 86,2%. Peningkatan kepercayaan masyarakat yang signifikan ini merupakan bukti implementasi dari Program Presisi Kapolri yang terus meningkatkan kinerja di tengah masyarakat.

Perlu disadari bahwa tugas Polri ke depan semakin berat. Masalah pemberantasan terorisme, termasuk penindakan KKB Papua, kejahatan narkoba, konflik sosial, akan menjadi fokus utama Korps Bhayangkara. Beruntung kini ada *Virtual Police* yang digagas Kapolri. Kini tuduhan kriminalisasi yang selama ini disampaikan masyarakat mulai menghilang. Kemudian, pelayanan polisi dalam penegakan hukum di jalan raya yang sejak lama disorot masyarakat kini telah diubah menggunakan tilang elektronik atau ETL. Ini merupakan sebuah pelayanan yang transparan dan tanpa diskriminasi.

Selain itu, ada pula Propam Presisi yang memudahkan masyarakat kini menyampaikan keluhan atas kinerja kepolisian. Kita sadari atau tidak, kehadiran media sosial tetap menonjol dan kini menjadi bagian dari kontrol sosial. Hampir setiap orang memiliki perangkat ponsel yang



bisa menyampaikan segala informasi yang ada di sekitarnya dengan cepat dan diterima masyarakat lainnya dengan cepat di tempat lain. Artinya, semua kinerja polisi hari ini dan seterusnya transparan, serta diawasi dan dipantau langsung oleh masyarakat. Mau tidak mau, suka tidak suka, perkembangan teknologi sudah mengubah semua manusia dengan profesi apa pun untuk bekerja semakin baik.

Berdasarkan catatan Lemkapi tahun 2021, tugas Polri akan semakin berat. Negara kini dihadapkan pada kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sebuah tantangan berat yang dialami oleh semua negara di dunia. Dalam menghadapi masalah ini, Polri adalah garda terdepan agar dampak pandemi tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat dan memicu persoalan sosial di yang pada akhirnya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Polri dituntut kerja keras meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Polri dibantu TNI sebagai ujung tombak pelaksana dan pengawasan dalam mendukung pemerintah melawan Covid-19. Polisi juga dituntut sebagai penolong untuk seluruh masyarakat. Dalam situasi negara seperti ini, peranan Polri harus menjadi “malaikat” bagi masyarakat. Polri bukan hanya pelayan, pelindung, pengayom, tetapi kerap harus menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum agar masyarakat bisa terlindungi dari Covid 19. Polri juga harus bisa menjalankan tugas sebagai penolong masyarakat. Kemudian, pada tahun 2021, Polri dan TNI kembali disibukkan dengan pelaksanaan vaksinasi agar program pemerintah memberikan vaksinasi kepada seluruh masyarakat bisa segera selesai dan seluruh masyarakat bisa dilindungi dari Covid.

Pada era keterbukaan informasi saat ini, tantangan Polri semakin berat. Kehadiran Polri harus betul-betul dirasakan masyarakat. Jika Polri hadir dan memberikan respons dengan cepat, masyarakat akan merasa nyaman. Kita bangga. Sejak enam bulan Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo dilantik Presiden Jokowi, program Presisi Kapolri sudah mulai dirasakan masyarakat. Kita harapkan Polri ke depan akan semakin Presisi, sehingga Polri akan semakin dicintai dan dipercaya masyarakat.



dummy



DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENGHARGAAN PUBLIK ATAS INOVASI PRESISI	1
Presisi Award untuk Korlantas Polri	2
Presisi Award untuk Polda Jawa Timur	4
Presisi Award untuk Polda Bali	5
Presisi Award untuk Polda Kalimantan Selatan	7
Presisi Award untuk Polda Kalimantan Tengah	9
Presisi Award untuk Polda Sumatera Selatan	10
Program Kapolri Tito Karnavian hingga Listyo Sigit Prabowo	11
Polri yang Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter)	11
BAB 2 (BELUM ADA JUDUL)	23
Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan)	24



Dumas Presisi, Inovasi Itwasum Polri	35
Inovasi Pelayanan Publik Bareskrim Polri	36
Interval Pemberian SP2HP	39
Bila Tidak Diberikan/Mendapatkan SP2HP	40
Listyo Sigit Ungkap Penyiraman Novel Baswedan	41
Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Bareskrim Polri	49
Sistem Betah, Inovasi Rekrutmen SDM Polri	50
ETLE Jadi Program Unggulan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit	54
BAB 3 (BELUM ADA JUDUL)	61
Inovasi Polda Metro Jaya di Bidang Lalu Lintas	61
Inovasi Polda Jawa Timur	68
Inovasi Pendekar Polda Banten	70
Aplikasi E-Cakra Polda Jawa Barat	75
Sistem Tilang ETLE	75
Inovasi Ruang Henti Khusus Sepeda Motor	77
Inovasi Polda Aceh	78
Inovasi Polda Sumatera Utara	82
Aplikasi Propam Presisi	83
Inovasi Polda Bengkulu	84
Layanan Vaksinasi Covid-19 Drive Thru	85
Inovasi Polda DIY	88
Aplikasi Polcast dan Limor	89
Aplikasi Sistem Informasi Patroli Online (SIPO)	90
Inovasi Polda BALI	91
Inovasi Polda Gorontalo	93
Canangkan Zona Integritas	95
Ubah Petani Cap Tikus Menjadi Petani Gula Aren	95
Inovasi Polda Kalimantan Tengah	96
<i>Quell Crime Isen Mulang (QCIM)</i>	98



Gedung Command Center Telematika	99
AWS dan Mobil Pemburu Api	100
Inovasi Unggulan Telabang Mandau Polda Kaltim	100
Layanan Polisi 110	102
Polda NTB Pecahkan Rekor Vaksinasi Massal	103
Layanan Aduan Polisi Nakal	106
Inovasi Polda Papua Barat	107
Inovasi Polda Papua	111
Inovasi Rumah Masyarakat Papua Penuh Damai (RM Papeda)	113
Inovasi Polda Sulawesi Utara	115
Inovasi Propam Presisi dan Dumas Presisi	118
BAB 4 INOVASI POLRI DI MASA PANDEMI COVID-19	121
Inovasi Korlantas Polri di Tengah Pandemi Smart Management	130
Penghargaan Korlantas untuk Polres-Polres	134
Kampung Tangguh Nusantara	137
BAB 5 INOVASI POLDA TANGANI COVID-19	143
Inovasi Kampung Tangguh Semeru Polda Jawa Timur	143
Kampung Tangguh Jaya Polda Metro Jaya	148
Kampung Siaga Candi Polda Jawa Tengah	150
Kampung Tangguh Balla Ewako Polda Sulawesi Selatan	155
BAB 6 DARI PROMOTER, TRUS AWARD HINGGA PRESISI AWARD	159
DAFTAR PUSTAKA	189
BIODATA PENULIS	197



dummy



1

PENGHARGAAN PUBLIK ATAS INOVASI PRESISI

Program Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., untuk menjadikan Polisi yang Presisi mulai dirasakan wujudnya dalam 100 hari pertama beliau memimpin Korps Bhayangkara. Berbagai inovasi dan terobosan diluncurkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi dan terobosan tersebut dilakukan untuk menjadikan Polri semakin dipercaya dan disukai masyarakat.

Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) melakukan Survei Kinerja Polri. Survei ini mengambil fokus penelitian mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Polri di era kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo. Survei menggunakan metode penelitian *purposive random sampling* dengan *human error* 3,5%. Survei dilaksanakan pada periode 15-24 Juni 2021 dengan 800 responden di seluruh Indonesia.

Berdasarkan riset yang dilakukan Lemkapi, sejak Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. dilantik Presiden pada 27 Januari 2021, kepercayaan masyarakat terhadap Polri mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Hasil survei Lemkapi menunjukkan 86,3% masyarakat melihat kinerja Polri dalam pelayanan publik semakin baik dengan beragam inovasi. Hasil itu menunjukkan Polri semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat atas kinerjanya.



Angka 86,3% tersebut melesat apabila dibandingkan dengan hasil riset tahun 2020, yaitu 82,9%. Sejumlah alasan responden kenapa kinerja Polri semakin dipercaya, antara lain Polri secara bertahap mengubah wajah pelayan penegakan hukum di jalan raya, melalui sistem teknologi tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Polri juga memiliki teknologi pengawasan bernama Propam Presisi dan pelayanan perpanjangan SIM online, dan Dumas online. Semua inovasi Polri ini membuat pelayanan Polri semakin dipercaya masyarakat karena sangat transparan.

Selain perubahan inovasi dalam pelayanan publik, kehadiran Polri pada masa pandemi Covid-19 banyak dirasakan masyarakat dan banyak diapresiasi. Pada umumnya responden suka dengan kebijakan Kapolri yang memerintahkan seluruh jajarannya mendirikan Kampung Tangguh dan sering melakukan bakti sosial bersama TNI di tengah masyarakat. Kehadiran Kapolri dan Panglima TNI yang selalu hadir dan kompak memantau pelaksanaan vaksinasi dan pengamanan Covid 19 di tengah masyarakat di berbagai daerah banyak dipuji dan membuat masyarakat nyaman. Hal lain yang juga disukai masyarakat adalah prestasi Polri memberantas narkoba dan kejahatan.

Kinerja positif dalam 100 hari pertama kepemimpinan Listyo Sigit merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Polri. Jajaran Polri, baik di tingkat pusat maupun daerah, menyatukan tekad dan langkah untuk membuat inovasi dan terobosan. Atas inovasi dan prestasi yang diraih, Lemkapi menganugerahkan penghargaan Presi Awar kepada sejumlah jajaran Polri.

Presisi Award untuk Korlantas Polri

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mendapatkan penghargaan Presisi Award dari Lemkapi karena banyak membuat inovasi pelayanan publik. Inovasi tersebut antara lain penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan perpanjangan SIM *online*.

Penghargaan Presisi Award diserahkan langsung Direktur Eksekutif Lemkapi Dr. Edi Hasibuan kepada Kepala Korlantas Polri Irjen. Pol. Drs. Istiono, M.H., di kantornya, Senin, 19 April 2021. “Kami datang mewakili masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Kapolri, Kakorlantas Polri dan seluruh jajarannya atas dedikasi dan loyalitasnya

dalam meningkatkan pelayanan publik semakin baik dan semakin transparan di tengah masyarakat,” kata Edi Hasibuan.



Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Saputra Hasibuan saat menyerahkan penghargaan Presisi Award kepada Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Istiono, M.H di gedung NTMC Polri, Jakarta, Senin 19 April 2021.

Sumber: Dok Korlantas Polri

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lemkapi, kehadiran ETLE membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum Polri di jalan raya mencapai angka 87,1%. Pencapaian yang sangat baik dalam sejarah Polri. Kehadiran ETLE dan pelayanan SIM *online* secara nasional adalah terobosan baru Polri dalam meningkatkan pelayanan yang transparan dalam mendukung program Kapolri menuju Polri yang Presisi.

Inovasi ETLE saat diluncurkan banyak diapresiasi karena penegakan hukum ETLE ini sangat transparan sebab menggunakan teknologi. Tilang elektronik menghilangkan adanya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan oknum petugas yang kerap dikeluhkan masyarakat di jalan raya. Sementara itu, pelayanan perpanjangan SIM *online* secara nasional yang dirintis Korlantas Polri banyak memudahkan masyarakat. Pemohon tidak perlu datang ke kantor Satuan Pelayanan Administrasi (Satpas) untuk mengurus SIM.



Penghargaan kepada Kepala korlantas Polri juga diberikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo atas penerapan sistem tilang elektronik (ETLE) skala nasional. “Ini bagian dari visi misi Kapolri mewujudkan Polri yang Presisi. Polri yang smart. Polri yang transparan. Yang pasti, penerapan tilang elektronik ini akan mendukung pembangunan *smart city* di Indonesia, juga dapat meningkatkan PAD dari sektor pajak khususnya bea balik nama,” kata Tjahjo.

Penghargaan dan apresiasi ini diberikan karena Kakorlantas Polri dan jajaran dinilai mampu membawa korps lalu lintas menjadi lembaga inovatif sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Presisi Award untuk Polda Jawa Timur

Lemkapi memberikan penghargaan Presisi Award kepada Ditlantas Polda Jawa Timur (Jatim) karena mendukung program Presisi Kapolri dengan pengoperasian mobil Integrated Node Capture Attitude Record (INCAR). Penghargaan Presisi Award diserahkan langsung Direktur Eksekutif Dr. Edi Saputra Hasibuan kepada Wakil Dirlantas Polda Jatim, AKBP Didit Bambang Wibowo, di Lapangan SAT PJR Ditlantas Polda Jatim, Sabtu, 5 Juni 2021.



Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Saputra Hasibuan menyerahkan penghargaan Presisi Award kepada Wakil Dirlantas Polda Jatim, AKBP Didit Bambang Wibowo, di Lapangan SAT PJR Ditlantas Polda Jatim, Sabtu, 5 Juni 2021.

Sumber: Dok Lemkapi

Wadirlantas Polda Jatim, AKBP Didit Bambang Wibowo, mengucapkan terima kasih kepada Lemkapi atas penghargaan yang diberikan. Penghargaan Presisi Award menjadi motivasi bagi jajaran Ditlantas Polda Jatim untuk terus berinovasi dan semakin baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Jatim.

Perangkat alat INCAR merupakan peralatan khusus yang dibuat oleh Ditlantas Polda Jatim untuk melaksanakan penindakan pelanggaran secara *mobile* guna melengkapi peran ETLT yang sudah ada. INCAR menggunakan *artificial intelligence* dalam mendeteksi pelanggaran. Pada tahap awal terdapat delapan perangkat alat INCAR yang digunakan di seluruh wilayah Jatim. Ke depan inovasi INCAR akan terus dikembangkan guna mendukung tugas dan fungsi di bidang Lalu Lintas serta dapat terintegrasi dengan fungsi kepolisian lainnya.

Presisi Award untuk Polda Bali

Inovasi dalam pelayanan publik yang dilakukan Polda Bali mendapat anugerah penghargaan Presisi Award dari Lemkapi. Inovasi pelayanan publik berbasis teknologi yang diimplementasikan Polda Bali berdasarkan penelitian Lemkapi telah meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan Polri sebesar 84,2%.

Polda Bali telah menghadirkan empat inovasi pelayanan publik berbasis teknologi, meliputi: (1) Inovasi Pelayanan Publik Samsat Kerti; (2) Samsat Drive Thru Mobile; (3) Samsat Drive Thru Ditlantas; dan (4) Inovasi SKCK Drive Thru Dit Intelkam Polda Bali sebagai upaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di tengah situasi Pandemi Covid-19.

Penghargaan Presisi Award diserahkan Direktur Eksekutif Lemkapi Dr. Edi Saputra Hasibuan kepada Direktur Lalulintas Polda Bali Kombes Pol. Indra dan Direktur Intelkam Polda Bali Kombes Pol. Zainal, pada Senin, 24 Mei 2021. Saat menyerahkan Presisi Award, Edi Hasibuan berpesan agar seluruh jajaran Polri terus meningkatkan pelayanan dalam mendukung program Presisi Kapolri, sehingga pelayanan dan kehadiran polisi semakin dirasakan oleh masyarakat.





Kapolda Bali Irjen. Pol. Drs. I Putu Jayan Danu Putra, S.H., M.Si., dengan didampingi Irwasta Polda Bali Kombes. Pol. Awang Joko Runitro, S.I.K., M.Si., Dir Intelkam Polda Bali Kombes. Pol. Zainal Abidin, S.I.K., M.Si, Dir Lantas Polda Bali Kombes Pol Indra, S.I.K., M.Si., Kabid Humas Polda Bali Kombes. Pol. Syamsi, S.H., saat menerima Penghargaan Presisi Award dari Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Saputra Hasibuan, Senin 24 Mei 2021.

Sumber: Humas Polri

Penyerahan penghargaan Presisi Award disaksikan langsung oleh Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra. Kapolda Bali mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan Lemkapi. “Kami akan terus berkarya dalam melayani masyarakat dalam mewujudkan Polri yang Presisi”.

Inovasi pelayanan publik Samsat Kerti, Samsat Drive Thru Mobile, Samsat Drive Thru Ditlantas, dan Inovasi SKCK Drive Thru Dit Intelkam Polda Bali merupakan upaya untuk menghindari kerumunan dengan mengoptimalkan pendapatan daerah. Inovasi Polda Bali ini juga mendapat apresiasi dari Gubernur Bali Dr. Ir. Wayan Koster, M.M. Empat inovasi yang dihadirkan Polda Bali sangat penting untuk meningkatkan pendapatan di Provinsi Bali dan sangat sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang sudah dicanangkan Kapolri dengan konsep Presisi.

Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur Bali di hadapan Kapolda Bali Irjen Putu Jayan Danu Putra, Kepala Ombudsman RI Perwakilan

Bali Umar Ibnu Alkhatab, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali I Made Santha, Dirlantas Polda Bali Kombes Pol. Indra, Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma, serta PT Jasa Raharja Cabang Bali, di Kantor UPT Samsat Badung, pada hari Jumat, 7 Mei 2021. Dalam kesempatan itu Gubernur Bali bersama Kapolda Bali menyapa Polres Jembrana, Polres Buleleng, Polres Karangasem, Polres Gianyar, Polres Tabanan, Polres Bangli, Polres Klungkung, Polresta Denpasar, dan Polres Badung secara virtual untuk melihat langsung kesiapan penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Publik Samsat Kerti, Samsat Drive Thru Mobile, Samsat Drive Thru Ditlantas, dan Inovasi SKCK Drive Thru Dit Intelkam Polda Bali.

Presisi Award untuk Polda Kalimantan Selatan

Kerja keras dan dedikasi tinggi yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat menuai hasil positif. Selain kinerja dan pelayanan prima yang dapat langsung dirasakan masyarakat, hasil kerja keras juga mendapat apresiasi dari Lemkapi.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel yang menjabat sebagai Plt Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, AKBP Budi Hermanto, mewakili jajarannya menerima piagam Presisi Award yang diserahkan langsung oleh Direktur Eksekutif Lemkapi Dr. Edi Saputra Hasibuan, Sabtu, 1 Mei 2021. Penyerahan piagam secara simbolis dilakukan di Kantor Ditreskrimsus Polda Kalsel, Kompleks Aspol Bina Brata, Jalan A Yani Kilometer 4, Kota Banjarmasin.

Presisi Award diberikan kepada Ditreskrimsus Polda Kalsel karena terus bekerja keras memberikan terobosan pada aspek kinerja dan pelayanan meski di tengah situasi pandemi Covid-19. Sejumlah aplikasi diluncurkan oleh Ditreskrimsus Polda Kalsel, seperti Aplikasi Berantas Kebakaran Hutan (Bekantan) dan Internal Control System (ICS). Inovasi ini merupakan pengungkit tolok ukur kinerja. Internal Control System digunakan Ditreskrimsus Polda Kalsel dalam hal penyidikan perkara yang ditangani anggota sebagai bentuk pengawasan. Setiap penanganan kasus oleh anggota dilakukan secara transparan mengikuti aturan hukum yang berlaku.





Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Saputra Hasibuan menyerahkan penghargaan kepada Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel AKBP Budi Hermanto, Sabtu 1 Mei 2021.

Sumber: kaltrapos.id

Lemkapi juga mengapresiasi kesuksesan Ditreskrimsus Polda Kalsel yang berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB). Predikat WBBM melengkapi predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang sebelumnya telah diraih Polda Kaslel.

“WBBM ini kita tahu bukan predikat yang mudah untuk didapatkan. Ini prestasi besar dan tidak banyak direktorat di Polda-Polda yang dapatkan predikat ini. Kami harap Satker lain terus berlomba meningkatkan pelayanan bagi masyarakat supaya Polri semakin Presisi sesuai Program Kapolri,” kata Edi Hasibuan.

Plt. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, AKBP Budi Hermanto, menyampaikan terima kasih atas dukungan Kapolda, Wakapolda, para Pejabat Utama Polda Kalsel, *stakeholders*, serta masyarakat, sehingga Ditreskrimsus Polda Kalsel berhasil meraih predikat dan penghargaan tersebut.

“Dalam hal ini perolehan WBK kami tidak berhenti, tapi berkelanjutan dan berkesinambungan hingga memperoleh WBBM

yang akhirnya juga diapresiasi oleh masyarakat, pemerintah, dan *stakeholders*, termasuk Lemkapi. Beliau merupakan senior-senior yang memang memberikan citra dan aura positif bagi Polri sejak dulu sampai sekarang.”

Bagi jajaran Polda Kalsel, sejumlah predikat tersebut bukan sekadar slogan dan piagam, namun juga menjadi bukti serta upaya berkesinambungan untuk mengubah kultur, budaya dan etos kerja ke arah yang lebih baik. Hal ini merupakan bentuk dukungan terhadap program kerja Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menginginkan terwujudnya Polri Presisi.

Presisi Award untuk Polda Kalimantan Tengah

Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) meraih penghargaan Presisi Award dari Lemkapi atas sejumlah inovasi dan terobosan yang sudah dilakukan. Penghargaan Presisi Award diserahkan Direktur Eksekutif Lemkapi Dr. Edi Hasibuan Kapolda Kalteng Irjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., di Mapolda Kalteng, Palangkaraya, Kamis, 17 Juni 2021.

Berdasarkan hasil penelitian Lemkapi, inovasi Polda Kalteng banyak disukai masyarakat karena telah memudahkan mendapatkan pelayanan Polri. Edi Hasibuan berharap Polda Kalteng dan seluruh jajaran Polri tidak berhenti berinovasi dan berprestasi. Teruslah bekerja untuk melayani masyarakat agar kehadiran Polri benar-benar dirasakan.

Polda Kalteng telah membuat sejumlah inovasi dalam mewujudkan transformasi menuju Polri yang Presisi. Inovasi tersebut berupa rekonstruksi berbagai bangunan, aplikasi berbasis teknologi 4.0 dan melalui inovasi aksi langsung ke lapangan. Polda Kalteng telah melakukan 101 konstruksi, 49 aplikasi, dan 134 inovasi aksi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Sementara itu, untuk bidang transformasi operasional, Polda Kalteng mengimplementasikan empat fokus tugas, yaitu penanganan Covid-19, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), pengawalan *food estate*, dan penanganan kejahatan lingkungan hidup.

Inovasi yang dilakukan Polda Kalteng tersebut juga mendapat apresiasi dari Mabes Polri. Apresiasi dan rasa bangga disampaikan Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono saat melakukan kunjungan kerja ke Polda Kalteng, Senin 14 Juni 2021. Wakapolri bangga atas



pencapaian dan kinerja Polda Kalteng dalam melahirkan sejumlah inovasi terbaru guna meningkatkan pelayanan publik. “Tentunya inovasi ini bukan pekerjaan Kapolda sendiri, tetapi juga didukung Forkopimda dan mitra kepolisian. Inovasi ini harus dikerjakan karena tuntutan dan harapan masyarakat kepada Polri semakin meningkat dan tantangan yang dihadapi semakin kompleks,” ujar Wakapolri.

Dalam kunjungan kerjanya itu, Wakapolri melihat terobosan Polda Kalteng dalam menanggulangi Karhutla dengan membuat aplikasi Hanyaken Musuh, ruang Command Center, Mobil Pemburu Karhutla, dan Satgas Karhutla Khusus. Wakapolri juga turut mengapresiasi aksi vaksinasi massal yang cukup baik di Kalteng yang telah memasuki angka 87%. Lansia dan pelayan publik sebagai sasaran vaksinasi bersemangat untuk datang.

Presisi Award untuk Polda Sumatera Selatan

Lemkapi memberikan dua penghargaan Presisi Award kepada Polda Sumatera Selatan (Sumsel), sebagai wujud Implementasi program prioritas Kapolri di bidang transformasi organisasi dan operasional. Penghargaan Presisi Award diberikan langsung Direktur Lemkapi Dr. Edi Hasibuan kepada Kapolda Sumsel Irjen Pol. Prof. Dr. Eko Indra Heri, S. M.M., di Gedung Promoter Polda Sumsel Rabu 23 Juni 2021.

Dua penghargaan yang diterima Kapolda Sumsel, yakni, *pertama*, penghargaan Presisi Award atas dedikasi dan loyalitas yang tinggi Polda Sumsel dalam pemberantasan narkoba dengan melakukan penggerebekan di kawasan yang menjadi peredaran narkoba. *Kedua*, terobosan membentuk Kampung Tangguh Narkoba di setiap desa yang ada di Provinsi Sumsel.

Penghargaan Presisi Award juga diberikan karena dedikasi yang tinggi atas kinerja di bidang kedokteran dan kesehatan dalam melakukan vaksinasi massal pada tanggal 30 Maret 2021. Program vaksinasi massal mencakup 1 Polsek membawa 5 lansia dalam satu hari untuk dilaksanakan vaksinasi, vaksinasi *mobile*, dan vaksinasi *door to door* (Vasdor) terhadap masyarakat di setiap desa.



Program Kapolri Tito Karnavian hingga Listyo Sigit Prabowo



Presiden Jokowi menyematkan pangkat bintang 4 kepada Jenderal Pol. Tito Karnavian, setelah dilantik menjadi Kapolri, di Istana Negara, Jakarta, Rabu 13 Juli 2016.

Sumber: Humas/setkab.go.id

Polri yang Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter)

Globalisasi yang didukung kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan dan memengaruhi pola berpikir, perilaku, dan tuntutan masyarakat. Sebagai aparat yang berkewajiban melindungi, melayani dan menegakkan hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus memiliki kemampuan yang mumpuni, baik secara organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), standar operasi maupun dukungan sarana prasarana.

Polri menyadari di era modernisasi dengan kemajuan peradaban manusia, Korps Bhayangkara tidak bisa menutup diri. Polri harus terus menciptakan inovasi yang berbasis teknologi informasi. Penggunaan



teknologi ini berdampak baik bagi masyarakat. *Pertama*, masyarakat tidak perlu ke kantor polisi untuk beberapa urusan. *Kedua*, penggunaan teknologi menunjukkan transparansi dan akuntabilitas Korps Bhayangkara, yang pada akhirnya memunculkan kepercayaan publik.

Oleh karena itu, sejak dilantik sebagai Kapolri pada tanggal 13 Juli 2016, Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., langsung mengusung visi terwujudnya Polri yang semakin Profesional, Modern, dan Terpercaya, guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong. Visi tersebut kemudian disederhanakan menjadi slogan “Promoter”, yang merupakan singkatan dari PROfesional, MODern, dan TERpercaya. Penjabaran dari “Promoter” tersebut, yaitu sebagai berikut.

Profesional: Meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.

Modern: Melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi, sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan alat material khusus (almatsus) dan alat peralatan keamanan (alpakam) yang makin modern.

Terpercaya: Melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), guna terwujudnya penegakan hukum yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Misi Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, yakni:

1. berupaya melanjutkan reformasi internal Polri;
2. mewujudkan organisasi dan postur Polri yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern;
3. mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan Hak Asasi Manusia (HAM);
4. meningkatkan kesejahteraan anggota Polri;
5. meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan publik kepada Polri;



6. memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah;
7. meningkatkan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) dengan mengikutsertakan publik melalui sinergitas polisional;
8. mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, menjunjung tinggi HAM, dan anti KKN.

Sebelas Program Promoter Polri:

1. Pemantapan reformasi internal Polri.
2. Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi.
3. Penanganan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi yang lebih optimal.
4. Peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan.
5. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri.
6. Tata kelembagaan, pemenuhan proporsionalitas anggaran dan kebutuhan sarana dan prasarana minimal.
7. Bangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibmas.
8. Penguatan Harkamtibmas.
9. Penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan.
10. Penguatan pengawasan.
11. Quick Wins Polri atau Program Akselerasi Transformasi Polri.

Sepuluh Komitmen Polri:

1. Melakukan konsolidasi internal dan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan organisasi Polri yang semakin solid dan profesional.
2. Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Kapolri terdahulu.
3. Mewujudkan insan bhayangkara dan organisasi Polri yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta menjunjung etika dan moral.



4. Selalu mengembangkan sistem diklat Polri dalam rangka meningkatkan kompetensi dan integritas SDM Polri.
5. Melakukan koordinasi dengan *stakeholders* terkait guna memudahkan dan memperlancar program-program yang telah direncanakan dan ditetapkan.
6. Menunjukkan teladan pemimpin yang memiliki kompetensi, proaktif, tegas, tidak ragu-ragu dan bertanggung jawab, serta melayani dan memberdayakan anggota serta antisipatif terhadap perubahan.
7. Mewujudkan pelayanan prima Polri kepada masyarakat dengan lebih mudah, cepat, nyaman, dan humanis.
8. Menerapkan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan menindak bagi yang melakukan pelanggaran.
9. Mengamankan program prioritas nasional dan kebijakan pemerintah.
10. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh reformasi internal Polri, peningkatan pelayanan publik menjadi lebih prima.

Semua program di atas dijadwalkan dilaksanakan dalam tiga tahap waktu. Tahap I berada di 100 hari pertama. Tahap II November 2016-Desember 2019. Tahap III Januari 2020-Desember 2021. Program Kapolri ini sejalan dengan misi Presiden Joko Widodo tentang peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi. Oleh karena itu, Kapolri menekankan pada seluruh personel Polri untuk mendukung misi Presiden Joko Widodo tentang peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Untuk mewujudkan Program Promoter, Kapolri mengusung konsep *Commander Wish*, mencakup berikut.

1. Reformasi kultural.
 - a. menekan budaya koruptif;
 - b. sosok polisi yang humanis.
2. Perbaikan layanan publik.
3. Peningkatan profesionalisme dalam penegakan hukum.



4. Peningkatan stabilitas Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat).
5. Manajemen media.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebutkan *Commander Wish* merupakan program kepolisian untuk langsung bersentuhan dengan masyarakat. Poin inti *Commander Wish* menyangkut reformasi kultural dan reformasi mental agar polisi dekat dengan masyarakat dan bersikap humanis. Selanjutnya, pelayanan publik berbasis teknologi, *public trust* (kepercayaan publik) dan informasi yang terbuka kepada media massa dan masyarakat. Latar belakang *Commander Wish* adalah rakyat memiliki kekuasaan, sehingga perlu bagi Polri untuk mendapatkan *trust* dari masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, program Promoter Polri perlahan semakin dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri meningkat setelah berbagai upaya dilakukan jajaran kepolisian di bawah kepemimpinan Jenderal Pol. Tito Karnavian. Pada acara Upacara dan Syukuran Hari Bhayangkara ke-72 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 11 Juli 2018, untuk pertama kalinya Kapolri Jenderal Tito Karnavian melaporkan di hadapan Presiden Joko Widodo bahwa dalam kurun waktu dua tahun (2017-2018), kepercayaan publik terhadap institusi Polri semakin meningkat. Jika pada awal tahun 2016 Polri masih masuk dalam tiga institusi paling tidak dipercaya publik, pada tahun 2018 Polri menjadi salah satu institusi yang paling banyak memperoleh kepercayaan masyarakat. Berdasarkan survei yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga, Polri telah berada pada tiga besar lembaga dengan kepercayaan publik terbaik.

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas 2018, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri meningkat dari 46,7% pada tahun 2014 menjadi 82,9% pada tahun 2018. Angka ini yang tertinggi semenjak era reformasi tahun 1999. Survei dilakukan terhadap 800 responden di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Metro Jaya, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan dengan metode sampel acak bertingkat dan wawancara tatap muka.

Sejumlah pelayanan publik Polri yang disoroti berkaitan dengan pengurusan surat kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, surat keterangan catatan kepolisian, dan denda tilang. Sedikitnya 75%



responden mengaku puas dengan pelayanan tersebut dan lebih dari 80% memilih mengurus sendiri karena pelayanan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih memuaskan. Sementara itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dalam melindungi masyarakat dan menjamin rasa aman mencapai 88,7%. Secara keseluruhan, mayoritas responden puas terhadap layanan polisi.

Survei yang pernah dilakukan Alvara Research Center juga menempatkan Polri pada peringkat ketiga teratas lembaga yang memperoleh kepuasan publik tertinggi, yakni 78,8% pada Mei 2018. Pengakuan terhadap kepercayaan pada institusi Polri juga datang dari luar negeri. Survei *Global Law and Order Survey* yang dilakukan The Gallup Organization tahun 2018 menempatkan Indonesia sebagai negara teraman ke-9 di dunia dengan skor 89. Singapura masih menjadi negara tujuan teraman di dunia untuk tahun ketiga berturut-turut.

Menurut Indeks Hukum dan Ketertiban Gallup, skor itu diambil dari 142 negara dengan menggunakan gabungan 100 poin. Penelitian itu mensurvei kepercayaan mereka terhadap polisi setempat, perasaan keamanan pribadi dan kasus pencurian, penyerangan atau penjahretan selama tahun lalu. Selain Singapura dan Indonesia, wilayah teraman di Asia juga termasuk Hong Kong.

Pada upacara HUT Bhayangkara ke-73 di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu 10 Juli 2019, Kapolri Jenderal (Pol.) Tito Karnavian kembali melaporkan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi Polri terus meningkat. Menurut Kapolri, tiga tahun implementasi Program Promoter telah menunjukkan hasil yang baik. Kepercayaan publik terhadap institusi Polri terus meningkat. Berdasarkan hasil survei yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga yang kredibel, Polri telah berada pada tiga besar lembaga yang dipercaya publik.

Kapolri menyebutkan bahwa program Promoter tetap berjalan sesuai tiga fokus utama, yaitu peningkatan kinerja, perbaikan kultur, dan manajemen media. Peningkatan kinerja dilakukan melalui peningkatan profesionalisme dan pemeliharaan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri juga berkomitmen menekan budaya koruptif, menghilangkan arogansi kekuasaan, dan menekan kekerasan eksekutif sebagai bentuk perbaikan kultur. Terakhir, Polri melakukan manajemen



media melalui penyampaian berbagai upaya dalam melakukan tugas kepolisian.

Presiden Jokowi yang bertindak sebagai Inspektur Upacara HUT Bhayangkara ke-73 di Lapangan Silang Monas mengapresiasi kinerja Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan pelayanan ke masyarakat. Keberhasilan sejumlah penyelenggaraan *event* besar di Indonesia, seperti Asian Games 2018 dan Pemilu 2019, tidak lepas dari peran Polri.

Namun, Presiden mengingatkan bahwa tantangan Polri ke depan dalam menghadapi kejahatan makin kompleks. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menyampaikan lima instruksi. *Pertama*, Presiden berpesan agar Polri terus tingkatkan kualitas sumber daya manusia Polri guna menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks.

Kedua, Presiden meminta Polri terus mengedepankan strategi proaktif dan preventif dengan pendekatan dan tindakan humanis. *Ketiga*, Presiden meminta Polri terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang modern, mudah, dan cepat. *Keempat*, Presiden meminta Polri terus meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam penegakan hukum, serta memberikan rasa adil kepada masyarakat. *Kelima*, Jokowi ingin Polri memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan TNI, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat, dalam memelihara keamanan dan ketertiban sosial.

Presiden terus mendorong Polri berinovasi mengikuti kemajuan teknologi sebab tantangan kejahatan yang dihadapi perwira kepolisian sangat berat, mulai dari kejahatan konvensional, lintas negara, *cyber*, hingga kejahatan yang mengganggu ketertiban sosial. Kejahatan yang menggunakan teknologi sangat canggih dan kejahatan siber lintas negara memerlukan kemampuan antisipasi dan mitigasi yang lebih baik.

Pada peringatan HUT Bhayangkara Ke-74 tanggal 1 Juli 2020 Presiden kembali menyampaikan sejumlah instruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Polri. *Pertama*, pegang teguh dan amalkan nilai-nilai luhur Tri Brata dan Catur Prasetya dalam setiap pelaksanaan tugas. Jaga kehormatan, jaga kepercayaan, dan jaga kebanggaan sebagai anggota Polri.

Kedua, melakukan reformasi diri secara total. Bangun sistem dan tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel serta bangun



kultur kerja Polri yang profesional, modern, dan terpercaya. *Ketiga*, memantapkan soliditas internal, perkuat sinergi dengan TNI dan seluruh elemen pemerintah maupun masyarakat untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Keempat, menerapkan strategi proaktif serta tindakan persuasif dan humanis dalam menangani masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat. *Kelima*, tingkatkan pelayanan publik yang modern dan profesional. Melaksanakan penanganan hukum secara transparan dan berkeadilan, sehingga Polri semakin dipercaya masyarakat. *Keenam*, jaga kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan agar masyarakat produktif dan aman dari Covid-19. *Ketujuh*, ikut mendukung proses pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Polri dengan penuh tanggung jawab.

Saat memberikan arahan secara virtual dalam acara Prasetya Perwira (PRASPA) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri Tahun 2020 dari Istana Negara, Selasa 14 Juli 2020, Presiden kembali mengingatkan agar para perwira Polri terus mengikuti dan mengejar perkembangan zaman. Presiden juga minta Polri menjadi bagian dari kualitas SDM Indonesia yang hebat yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin mengingatkan bahwa kemajuan teknologi dan informasi telah memunculkan bentuk kejahatan baru dengan modus yang lebih canggih, seperti kejahatan siber, transaksi keuangan ilegal, penipuan, pencurian data pribadi, dan penyebaran berita bohong atau hoaks. Bahkan, kelompok terorisme dan kelompok ekstrem telah memanfaatkan teknologi digital dalam melakukan rekrutmen, pelatihan, dan operasi kejahatannya.

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa sejalan dengan perkembangan teknologi digital 4.0, saat ini dan ke depannya masyarakat menuntut pelayanan Polri yang *smart* dan profesional, mampu menghadapi tantangan dan perkembangan masyarakat era digital yang semakin kompleks. Pesan itu disampaikan Wapres dalam Seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi (Sespimti) Polri Pendidikan Reguler ke-29 Tahun 2020, melalui konferensi video, pada Selasa 2 Oktober 2020. Seminar bertemakan “*Strategi Implementasi Smart Policing Guna Mewujudkan Postur Polri yang Efektif Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional*”.



Smart policing dimaknai sebagai pelaksanaan tugas-tugas kepolisian secara lebih inovatif, menerapkan sains dan teknologi serta *evidence-based* (berbasis bukti) dan menggunakan pendekatan interdisipliner. Pembangunan nasional bertujuan untuk menjadikan Indonesia Maju. Namun, dalam perjalanannya dihadapkan pada dinamika perkembangan lingkungan yang terus berubah dengan cepat, sehingga Polri dituntut untuk berani melakukan adaptasi dan perubahan sesuai dengan perkembangan lingkungan tersebut yang membawa tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat baru. Oleh karena itu, reformasi birokrasi Polri perlu terus dilanjutkan, bahkan dipercepat, sehingga harapan terwujudnya postur Kepolisian RI yang semakin profesional, humanis, bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta tepercaya, dapat segera terlaksana.

Reformasi birokrasi harus dapat melahirkan inovasi yang semakin memudahkan dan meningkatkan pengawasan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan lingkungan yang semakin kondusif. Wapres mengapresiasi berbagai capaian yang telah dilaksanakan Polri melalui inovasi layanan masyarakat, seperti E-Samsat, SIM Online, SKCK Online, Smart SIM, dan E-Tilang. Inovasi seperti ini telah memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri.

Keberhasilan pelaksanaan reformasi organisasi tentunya juga harus didukung oleh profesionalisme aparatur yang diwujudkan melalui sistem manajemen yang baik. Pola-pola pendidikan dan pelatihan SDM harus berorientasi pada jawaban atas kebutuhan organisasi dan masyarakat. Kebijakan tersebut harus diimbangi dengan SDM unggul di lingkungan Polri. Penguasaan Iptek menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan dan mengantisipasi perubahan. Pendidikan, pelatihan, dan riset di bidang Iptek kepolisian harus menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kaitannya dengan peningkatan profesionalisme SDM di lingkungan Polri.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi harus dilihat sebagai sarana pendukung. Penguasaan teknologi komunikasi dan informasi bukan dalam konteks sebagai *user* (pengguna) semata, namun harus benar-benar dapat dilakukan penguasaan keilmuannya. Dengan demikian, Polri dapat benar-benar mandiri dan mampu berkompetisi



serta antisipatif dalam menghadapi perkembangan situasi yang berubah sangat dinamis dan cepat.

Selain itu, diperlukan pendidikan kepemimpinan yang *smart*, mampu mentransformasikan pengetahuan, mengelola sumber daya, menjadi *role model*, dan berorientasi pada solusi. Pemimpin yang *smart* akan menjadikan organisasi mampu mencapai totalitas *smart policing*, yaitu mewujudkan postur Polri yang efektif dalam rangka mendukung pembangunan nasional.



Presiden Jokowi menyematkan tanda kepangkatan kepada Jenderal Pol. Idham Azis setelah dilantik menjadi Kapolri, di Istana Negara Jakarta, Jumat 1 November 2019

Sumber: Desca Lidya Natalia/antaranews.com

Program Promoter yang dicanangkan Polri pada tahun 2016 terbukti telah berhasil mengubah citra Korps Bhayangkara di tengah masyarakat. Melalui inovasi di berbagai bidang, kehadiran Polri di tengah masyarakat semakin dirasakan manfaatnya. Tidak salah jika pergantian tongkat estafet kepemimpinan di tubuh Polri, program Promoter tetap menjadi program andalan. Pada saat menjalani *fit and proper test* di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019, calon tunggal Kapolri, Komjen Pol. Idham Azis menyampaikan tidak mempunyai visi-misi selain punya

komitmen meningkatkan tujuh prioritas Polri dalam penguatan program Promoter yang sudah dijalankan sejak era Kapolri sebelumnya.

“Dengan mempertimbangkan capaian program-program prioritas Kapolri sebelumnya dan memperhatikan sisa waktu masa pengabdian yang hanya 14 bulan, jika diberikan kepercayaan amanah sebagai Kapolri, saya akan melakukan program penguatan Polri yang Promoter menuju Indonesia maju,” ujar Idham Aziz saat itu.

Tujuh program prioritas itu, yakni *pertama*, mewujudkan SDM unggul. *Kedua*, pemantapan Harkamtibmas. *Ketiga*, penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. *Keempat*, pemantapan media. *Kelima*, penguatan sinergi polisional. *Keenam*, penataan kelembagaan. *Ketujuh*, penguatan pengawasan.

Idham Azis juga akan melaksanakan lima komitmen Polri, yaitu mengamankan program pembangunan nasional, memantapkan soliditas internal dan sinergitas TNI/Polri, mewujudkan insan Bhayangkara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), menuntaskan kasus yang menjadi perhatian publik, dan menyiapkan suksesi pimpinan Polri selanjutnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H., menilai bahwa program Promoter Kapolri Tito Karnavian memang masih sangat relevan untuk diteruskan oleh Kapolri berikutnya. Penguatan tujuh Program Prioritas yang disampaikan Idham Azis dinilai sangat bagus. Selama tiga tahun pelaksanaan Program Promoter, Lemkapi menilai Kapolri Tito Karnavian, telah membuat kinerja Polri semakin baik. Di berbagai daerah, jajaran Polri juga terus menghadirkan inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Atas inovasi itu, Lemkapi telah memberikan Promotor Award kepada satuan Polri, beserta jajaran Polda dan Polres.



dummy

2

(BELUM ADA JUDUL) ←

**Pertanyaan
untuk
Penulis**

Pak,
sebaiknya
bab ini
diberi judul,
baru masuk
ke tulisan-
tulisan
(subbab-
subbab),
seperti di
Bab 1 pak.



Jendral Pol. Listyo Sigit Prabowo resmi menjabat Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu 27 Januari 2021

Sumber: Biro Pers Sekretariat Presiden



Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan)

Masyarakat memiliki harapan besar terhadap Polri, yakni polisi yang tegas, namun humanis, polisi yang mampu memberikan pelayanan terbaik dan transparan. Harapan masyarakat akan polisi seperti di atas kini ada di depan mata. Polri di bawah komando Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. bertekad menjadikan Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). Konsep ini merupakan fase lebih lanjut dari Polri Promoter yang telah digunakan pada periode sebelumnya, dengan pendekatan pemolisian berorientasi masalah.

Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 27 Januari 2021. Pelantikan Kapolri digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada pukul 09.30 WIB. Pengangkatan Listyo Sigit sebagai Kapolri berlandaskan pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 5/POLRI Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keppres tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2021.

“Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan.

Listyo Sigit Prabowo yang lahir di Ambon, 5 Mei 1969, merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akp) tahun 1991. Sebelum dilantik sebagai Kapolri, Listyo Sigit menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sejak 6 Desember 2019 dengan pangkat Komisaris Jenderal (Komjen). Setelah ditunjuk menjadi Kapolri, Listyo Sigit otomatis mendapat kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi Polri berdasarkan Keppres Nomor 7/POLRI Tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta pada 27 Januari 2021. Melalui Keppres tersebut, Listyo Sigit memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi jenderal polisi.

Acara pelantikan Kapolri diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, lalu diikuti para tamu undangan terbatas. Hadir sebagai saksi, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Turut hadir secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan, yakni Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Ketua KPK Firli Bahuri, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dan Kapolri ke-24 Jenderal Pol. Idham Azis.

Menjabat sebagai Kapolri ke-25, Listyo Sigit berkomitmen menjawab harapan masyarakat terhadap Polri dan melakukan transformasi dalam berbagai bidang. Kapolri akan menjadikan Polri semakin lebih baik, “Kami berangkat dari potret Polri di mata masyarakat dan apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap Polri, yakni bagaimana menampilkan Polri yang tegas, namun humanis, bagaimana menampilkan Polri yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik, dan bagaimana kita memberikan pelayanan secara transparan. Ini tentunya menjadi tugas kami ke depan”.

Kapolri menyadari selama ini masih ada kritik terhadap institusi Polri terkait pelayanan yang diberikan dianggap masih berbelit, sikap dan perilaku insan Bhayangkara yang arogan serta kasar, pungutan liar (pungli) di sektor pelayanan, kekerasan dalam penanganan kasus, penyelesaian kasus yang tebang pilih, dan berbagai perilaku yang menimbulkan kebencian di tengah masyarakat.

Fokus utama Polri di bawah kepemimpinannya, yakni berorientasi pada kepentingan masyarakat dan berbasis pada hukum berkeadilan. Kemudian, menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dan mengawal proses demokrasi. Kapolri berjanji memenuhi rasa keadilan dengan mengedepankan instrumen hukum progresif melalui penyelesaian dengan prinsip keadilan restoratif.

Listyo Sigit telah mempersiapkan sejumlah program prioritas dalam memimpin Korps Bhayangkara. Saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, Listyo Sigit memaparkan 16 program prioritas dan 8 komitmen jika terpilih menjadi Kapolri.



Enam Belas Program Prioritas Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yaitu sebagai berikut.

1. Penataan Kelembagaan.
2. Perubahan Sistem dan Metode Organisasi.
3. Menjadikan SDM Polri Yang Unggul di Era Police 4.0.
4. Perubahan Teknologi Kepolisian Modern di Era Police 4.0.
5. Pemantapan Kinerja Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
6. Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum.
7. Pemantapan Dukungan Polri dalam Penanganan Covid-19.
8. Pemulihan Ekonomi Nasional.
9. Menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional.
10. Penguatan Penanganan Konflik Sosial.
11. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polri.
12. Mewujudkan Pelayanan Publik Polri yang Terintegrasi.
13. Pemantapan Komunikasi Publik.
14. Pengawasan Pimpinan dalam Setiap Kegiatan.
15. Penguatan Fungsi Pengawasan.
16. Pengawasan Oleh Masyarakat Pencari Keadilan (*Public Complaint*).

Delapan Komitmen Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo:

1. Menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan (Presisi).
2. Menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional.
3. Menjaga soliditas internal.
4. Meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI Polri, serta bekerja sama dengan APH dan kementerian/lembaga untuk mendukung dan mengawal program pemerintah.
5. Mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreativitas yang mendorong kemajuan Indonesia.
6. Menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan.



7. Mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan restoratif dan *problem solving*.
8. Setia kepada NKRI dan senantiasa merawat kebhinekaan.

Listyo Sigit Prabowo pertama kali memaparkan konsep Presisi kepolisian masa depan pada saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di Komisi III DPR RI pada tanggal 20 Januari 2021. Konsep Presisi tertuang dalam makalahnya berjudul *Transformasi Polri yang Presisi*.

“Apabila saya diberikan amanah sebagai Kapolri, transformasi Polri akan saya lakukan. Dengan transformasi menuju Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan,” kata Listyo di hadapan anggota Komisi III DPR RI.

Penegakan hukum dengan pendekatan pemolisian prediktif akan membangun kejelasan permasalahan keamanan yang menciptakan keteraturan sosial di tengah masyarakat. Upaya pemolisian prediktif dilakukan berdasarkan analisis fakta, data, dan informasi yang didukung kemajuan dan perkembangan teknologi, sehingga tindakan kepolisian akan lebih tepat dan menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Pendekatan ini akan mentransformasi wajah Polri ke depan, antara lain pada pelayanan publik yang terintegrasi, modern, mudah, dan cepat.

Responsibilitas dimaknai sebagai rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam ucapan, sikap, perilaku, dan responsibilitas menjalankan tugas untuk menjamin kepentingan masyarakat dalam menciptakan keamanan. Transparansi berkeadilan merupakan realisasi dari prinsip, cara berpikir, sistem yang terbuka, akuntabel, dan humanis. Polri terbuka untuk diawasi, sehingga pelaksanaan tugas-tugas kepolisian dapat mewujudkan keamanan dan keadilan masyarakat.

Konsep Presisi merupakan kelanjutan dari program Kapolri terdahulu, yakni Program Promoter (PROfesional, MOdern, dan TERpercaya) di masa Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan Pemantapan Promoter di era Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis. Konsep Presisi telah mendengarkan serta menampung kritik dan saran dari tokoh masyarakat dan agama terkait kinerja Kepolisian RI demi mewujudkan rasa adil di tengah masyarakat.



Konsep prediktif diimplementasikan dalam model pemolisian prediktif atau *predictive policing* yang mengedepankan kemampuan untuk memprediksi situasi dan kondisi yang menjadi isu dan permasalahan serta potensi gangguan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Konsep Presisi fokus pada tiga hal, yakni Pelayanan Publik, Pemeliharaan Kamtibmas, dan Penegakan Hukum.

Pelayanan publik Polri akan diwujudkan secara terintegrasi, modern, mudah, dan cepat. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Polri memanfaatkan sarana teknologi informasi. Dengan demikian, pelayanan dapat semakin menjangkau seluruh kepentingan masyarakat. Berbagai kendala dalam interaksi makin dapat teratasi untuk makin menjaga dan meningkatkan marwah Polri. Kapolri juga mengaktifkan nomor tunggal nasional sebagai *hotline* kepolisian dalam rangka merespons cepat aduan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan layanan Polri dengan mudah. Melalui *hotline* masyarakat bisa menghubungi polisi semudah memesan makanan melalui aplikasi.

Kapolri minta kepada seluruh jajaran Polda dan Polres untuk terus tingkatkan pelayanan publik prima dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga pelayanan publik betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai wujud nyata menuju transformasi Polri yang Presisi di mana salah satunya menciptakan pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat. “Jadi tolong saya harapkan ke depan, khususnya dalam 100 hari ini rekan-rekan bisa berlomba berkreasi, berinovasi, berlomba yang terbaik untuk memberikan pelayanan publik, sehingga pelayanan publik tersebut bisa kita eksekusi, bisa kita realisasikan,” pesan Kapolri saat pemberian penghargaan Pelayanan Prima 12 Polres dari Kemenpan RB di Mabes Polri, Jakarta, Selasa 16 Februari 2021.



Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo dalam acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Lingkup Polres/Polresta Polrestabes/Polresmetro Tahun 2020, di Ruang Rapat Utama Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa 16 Februari 2021.

Sumber: ntmcpolri.info

Kapolri menekankan pelayanan publik juga harus betul-betul sesuai dengan tampilan atau dengan kata lain, sesuai dengan pelayanan yang diberikan kepada publik, tidak hanya jargon. Khusus hal ini, Kapolri memerintahkan Divisi Propam untuk membentuk tim yang sifatnya melakukan pengecekan secara berkala. “Saya minta kualitasnya bisa dirasakan masyarakat. Bagaimana anggota-anggota di sana bisa senyum memberikan pelayanan secara profesional, masyarakat merasa nyaman, sehingga kemudian pada saat mereka pulang dan kembali ke rumah mereka bisa cerita bahwa pelayanan publik kepolisian kali ini sangat baik, itu yang jadi pegangan saya”.

Untuk program pemeliharaan Kamtibmas dan penegakan hukum yang prediktif, bertanggung jawab, transparan serta menjamin rasa keadilan masyarakat, dalam kepemimpinannya Kapolri ingin Kepolisian Sektor (Polsek) tidak lagi menyidik perkara, namun lebih dimaksimalkan dalam fungsi pencegahan, pemecahan masalah dengan musyawarah, dan menjadikan proses hukum sebagai upaya terakhir.



Polri tidak perlu memaksakan suatu kasus diproses hukum secara tuntas hingga divonis, tetapi harus dilihat kasusnya secara arif dan bijaksana. Polri dapat menginisiasi pertemuan masing-masing pihak untuk diselesaikan secara baik, bukan melalui jalur hukum. Anggota Polri harus menjalankan peran tersebut untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Namun, tentunya dengan pengawasan yang ketat agar anggota Polri tidak menyalahgunakan kewenangannya.

Listyo Sigit Prabowo kemudian menerbitkan Keputusan Kapolri Nomor Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan). Keputusan ini diteken Kapolri pada tanggal 23 Maret 2021. Sesuai Keputusan Kapolri, sebanyak 1.062 Polsek di Indonesia yang tidak bisa lagi melakukan penyidikan. Polsek yang tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya memedomani Surat Kapolri Nomor B/1092/II/REN.1.3/2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang Kewenangan Polsek Tertentu.

Kapolri juga berupaya menghilangkan kesan “hukum tajam ke bawah tumpul ke atas”. Kapolri tidak ingin kasus seperti yang pernah dialami seorang nenek Minah, yang mencuri kakao, kemudian diproses hukum hanya untuk mewujudkan kepastian hukum. Tidak boleh lagi ada seorang ibu yang melaporkan anaknya, kemudian ibu tersebut justru diproses dan masuk persidangan. “Saat ini masyarakat memerlukan penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, bukan penegakan hukum dalam rangka untuk kepastian hukum,” kata Sigit di hadapan anggota Komisi III DPR RI.

Dalam rangka mewujudkan Transformasi Polri yang Presisi, Kapolri sudah menyiapkan *roadmap* yang dituangkan dalam empat bagian utama, yaitu Transformasi Organisasi, Transformasi Operasional, Transformasi Pelayanan Publik, dan Transformasi Pengawasan.

a. Transformasi Organisasi

- Penataan Kelembagaan.
- Perubahan Sistem dan Metode Organisasi.
- Menjadikan SDM Polri yang Unggul di Era Police 4.0.
- Perubahan Teknologi Kepolisian Modern di Era Police 4.0.



- b. Transformasi Operasional
- Pemantapan Kinerja Harkamtibmas.
 - Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum.
 - Pemantapan Dukungan Polri dalam Penanganan Covid-19.
 - Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
 - Menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional.
 - Penguatan Penanganan Konflik Sosial.
- c. Transformasi Pelayanan Publik
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polri.
 - Mewujudkan Pelayanan Publik Polri yang Terintegrasi.
 - Pemantapan Komunikasi Publik.
- d. Transformasi Pengawasan
- Pengawasan Pimpinan Terhadap Setiap Kegiatan.
 - Penguatan Fungsi Pengawasan.
 - Pengawasan oleh Masyarakat (*Public Complaint*).



Polri melakukan penyekatan kendaraan di pintu Tol Cikarang Barat, Bekasi untuk menegakkan aturan larangan Mudik Lebaran tahun 2020, yang bertujuan mencegah penyebaran Covid-19.

Sumber: Antara/Fakhri Hermansyah



Program Presisi yang digagas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendapat apresiasi dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Program Presisi Kapolri diyakini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menilai Program Presisi Kapolri sangat cocok dengan situasi Indonesia yang sedang menghadapi Covid-19 dan maraknya kejahatan siber. “Program Presisi sangat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang menginginkan kehadiran polisi dapat memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman dengan cepat dan transparansi, berkeadilan kepada semua golongan masyarakat,” ujar Direktur Eksekutif Lemkapi Dr. Edi Hasibuan, S.H, M.H., yang turut memantau uji kelayakan calon Kapolri dengan judul “Transformasi Menuju Polri yang Presisi”, di Gedung DPR RI pada tanggal 20 Januari 2021.

Kehadiran Polri dengan respons cepat dan mudah dihubungi serta memberikan keadilan bagi semua sangat diharapkan masyarakat saat pandemi Covid-19. Rakyat sangat mengharapkan polisi hadir dengan cepat ketika dibutuhkan. Polisi harus bisa memberikan pelayanan yang maksimal dan dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. Lemkapi juga menilai kebijakan Kapolri memperkuat Polsek dengan Bhabinkamtibmas sangat tepat. Peranan Polsek yang memiliki Bhabinkamtibmas satu desa, satu Bhabinkamtibmas adalah dambaan masyarakat. Para Bhabinkamtibmas dalam Polsek harus berperan penting menjadi ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat. Lemkapi meyakini dengan program ini Kapolri dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Lemkapi sangat setuju dengan komitmen Kapolri yang menginginkan polisi harus bisa memiliki kewajiban moral dari dirinya untuk terus meningkatkan penegakan hukum yang tegas, tetapi memberi keadilan kepada masyarakat.

Sambutan positif terhadap program Presisi Kapolri juga datang dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Konsep Presisi menggambarkan semangat transformasi dalam upaya membawa Polri menjadi lebih baik. “Untuk mewujudkan Polri yang Presisi, Polri harus melakukan perubahan besar dari aspek SDM serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi,” kata Puan saat rapat paripurna DPR RI untuk menyetujui Komjen Listyo Sigit sebagai Kapolri pada tanggal 21 Januari 2021.

Ketua DPR RI menyampaikan tiga pekerjaan rumah Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Tiga pekerjaan rumah itu adalah terkait

penegakan hukum, pelayanan publik, dan reformasi internal. Dalam hal penegakan hukum, perlu ada keadilan restoratif. Penegakan hukum tidak memakai kaca mata kuda, tetapi melihat konteks masalah dan memperhatikan aspek-aspek sosial kemasyarakatan. Tugas Polri selanjutnya, yakni peningkatan pelayanan publik. Fungsi polisi adalah melayani masyarakat, sehingga penggunaan teknologi sangat penting lantaran keterbatasan personel Polri. Mengenai reformasi internal, peningkatan kualitas SDM dapat difokuskan pada sikap serta mental anggota Polri agar senantiasa bekerja secara profesional.

Pengamat sosial Devie Rahmawati turut mengapresiasi seluruh program besar yang masuk dalam perencanaan dan perubahan Polri ke depan, termasuk aspek penanganan sosial dalam situasi pandemi Covid-19. Kehadiran Polri dalam memberi keamanan sangat penting dalam situasi pandemi Covid-19. Menerangkan ke publik bahwa pandemi membuat kondisi tidak normal memang sangat dibutuhkan, mengingat pandemi sudah berlangsung satu tahun yang tentu saja membuat sebagian masyarakat semakin abai, sehingga mereka perlu diingatkan.



Petugas gabungan menggelar Operasi Yustisi Protokol Covid-19 di kawasan Pasar Jumat, Jakarta, Senin 14 September 2020. Operasi Yustisi itu dilaksanakan untuk menertibkan masyarakat agar lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Sumber: Republika/Putra M. Akbar



Kehadiran aparat kepolisian untuk terus-menerus mengingatkan masyarakat terkait bahayanya Covid-19 ini sangat dibutuhkan. Masyarakat yang lupa atau tidak sengaja tidak mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak perlu terus diingatkan dengan cara yang elegan. Ikhtiar luar biasa dari Polri dalam melakukan pencegahan patut diapresiasi. Tidak hanya masif menjaga keamanan dan menangkap pembegal, tetapi juga fokus dengan urusan kemanusiaan, seperti menekan angka penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat.

Program calon Kapolri dalam hal konflik sosial penanganan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), ekonomi, hoaks, perebutan lahan, dan lain sebagainya merupakan tantangan Polri ke depan yang harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Wujud nyata dalam penanganan konflik sosial yang berkeadilan tentu akan menumbuhkan kepercayaan publik kepada institusi Polri ke depan. Penanganan secara persuasif konflik sosial ini menjadi keniscayaan selama ada tantangan kepercayaan publik.

Polisi dinilai sudah sangat baik dalam hal penanganan sosial yang berkaitan langsung dengan masyarakat luas. Tinggal ditambah kesempurnaan lainnya, sehingga membuat manajemen internal ketika kesepakatan itu terjadi, diharapkan implementasinya ke masyarakat bisa langsung dirasakan.

Dalam hal program komunikasi publik, Devie mengatakan perlunya mewujudkan keteladanan Polri yang sangat penting di mata masyarakat. Pengalaman masyarakat ketika bertemu anggota kepolisian menjadi satu momen yang akan terus dibicarakan dan pelan-pelan akan meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri. Contoh kasus sederhana terkait pelayanan SIM, sistem tilang dan lainnya akan membantu masyarakat mengingat personel Polri yang positif.

Polri juga memiliki tantangan besar terhadap arus informasi hoaks yang kadang menyesatkan publik. Hal ini harus terus diatasi dengan memperkuat digitalisasi Polri dalam hal meluruskan informasi keliru yang ada di media sosial atau di muka umum. Digitalisasi bidang keamanan itu sangat penting, karena masyarakat sangat rentan terhadap gangguan-gangguan persepsi negatif yang sebenarnya tidak ada. Oleh karena itu, Polri perlu semakin memperkuat pasukan-pasukan digitalisasi yang membantu mendorong masyarakat bisa hadir ke publik untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak produktif.



Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meluncurkan Aplikasi Pengaduan Masyarakat (Dumas) Presisi di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu 24 Februari 2021.

Sumber: Humas Polri

Dumas Presisi, Inovasi Itwasum Polri

Jajaran Polri wajib melakukan inovasi dan terobosan untuk menuju Polisi Presisi. Program Presisi diterapkan pada masing-masing satuan kerja Polri. Program prioritas diterapkan melalui rencana aksi masing-masing satuan kerja. Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi meluncurkan Aplikasi Pengaduan Masyarakat atau disingkat Dumas pada Rabu 24 Februari 2021. Peluncuran aplikasi Dumas Presisi dilakukan saat kegiatan Rakerwas Itwasum Polri Tahun Anggaran 2021 di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Kapolri minta jajarannya memaksimalkan aplikasi Dumas Presisi dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Aplikasi Dumas Presisi merupakan wujud *handling complain* dan transparansi Polri dalam membentuk sistem pengawasan oleh masyarakat dengan cepat, mudah, dan terukur. Kapolri juga meminta kepada jajaran Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri untuk menjadikan momentum ini sebagai sarana berbagi informasi. Selain itu, Dumas Presisi bisa



merumuskan cara bertindak dalam menangani berbagai permasalahan tugas di lapangan. Sigit menginstruksikan agar merajut kerja sama dan sinergitas lintas fungsi dan sektoral, bersama dengan institusi pemerintah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan pengawas eksternal independen. Kemudian, pengelolaan dan penemuan solusi terbaik perlu dilakukan dalam menangani pengaduan masyarakat serta memanfaatkan masukan dari pengamat dan pengawas eksternal Polri.

Aplikasi Dumas diciptakan untuk mengklarifikasi terlebih dahulu setiap laporan dari masyarakat yang masuk. Klarifikasi bertujuan untuk menghindari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan klarifikasi tersebut, laporan yang masuk ke aplikasi Dumas Presisi bisa dipastikan bukan laporan bohong. Contohnya identitas pelapor, jika identitas pelapor tidak terpenuhi maka laporan yang masuk tidak bisa diproses ke tahap selanjutnya.

Melalui aplikasi Dumas Presisi, masyarakat bisa lebih tahu sejauhmana perkembangan laporannya secara mudah. Perkembangan kasus selalu diperbarui dalam aplikasi Dumas Presisi. Bahkan, jika masyarakat merasa ada yang tidak puas dengan kinerja anggota Polri, bisa mengadu melalui Dumas Presisi. Kapolri Sigit memang sengaja menyediakan aplikasi tersebut supaya masyarakat bisa memberi gambaran bagaimana sosok Polri di mata mereka. Dengan demikian, masukan masyarakat bisa membuat Polri berbenah. Kapolri ingin kehadiran polisi di tengah masyarakat lebih berguna, dibutuhkan, dan bisa menjadikan kualitas hidup masyarakat meningkat.

Inovasi Pelayanan Publik Bareskrim Polri

Bareskrim merupakan salah satu Unsur Pelaksana Tugas Pokok di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan singkatan dari Badan Reserse Kriminal. Bareskrim Polri adalah unsur pelaksana utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada tingkat Markas Besar yang dipimpin oleh Kepala Bareskrim (Kabareskrim Polri) yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Kabareskrim Polri bertugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak



pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional. Dalam menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, tentu tidak bisa terlepas sorotan publik. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Polri dituntut berinovasi mengikuti perkembangan teknologi.

Pada tahun 2017, Bareskrim Polri membangun sebuah layanan informasi perkembangan perkara bernama Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Online (SP2HP Online). SP2HP Online merupakan layanan Polri yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan penanganan tindak pidana yang dilaporkan. Pada halaman depan website terdapat tiga kolom untuk input data, berisi Nomor LP (Laporan Polisi), Nama Lengkap Pelapor, dan Tanggal Lahir Pelapor. Setelah mengisi kolom input data, pada bagian bawah terdapat fitur pencarian Cek Perkembangan Perkara.

Dalam perkembangannya, keberadaan SP2HP Online ini dirasa kurang optimal karena setiap kesatuan wilayah, seperti di Polda, Polres, dan Polsek ternyata membangun aplikasi serupa. Kondisi ini membuat keberadaan SP2HP Online menjadi parsial, terpisah-pisah. Badan Reserse Kriminal Polri lalu melakukan terobosan baru. Pada tahun 2019 dilakukan penguatan aplikasi SP2HP Online dan mulai diuji coba pada tanggal 21 Oktober 2019 di lantai 2 Gedung Bareskrim Polri.

Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri Brigjen Pol. Drs. Erwin Azhar Siregar, S.H., menyampaikan bahwa aplikasi SP2HP Online bertujuan mengganti Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang dibuat secara manual oleh penyidik dan dikirim melalui jasa kurir secara manual kepada masyarakat atau pelapor. Aplikasi SP2HP Online berlaku secara nasional menggantikan aplikasi sejenis yang dibuat secara parsial sebelumnya.

Data Aplikasi SP2HP Online bersumber dari aplikasi Elektronik Manajemen Penyidikan (EMP) yang wajib digunakan, diinput oleh seluruh penyidik dari tingkat Polsek, Polres, Polda, dan Mabes. Aplikasi SP2HP Online sebagai salah satu bentuk pelayanan informasi kriminal kepada masyarakat atau pelapor. Pada saat masyarakat membuat laporan secara resmi kepada pihak kepolisian, maka si pelapor akan diberikan kode hak akses untuk dapat mengakses layanan aplikasi SP2HP Online



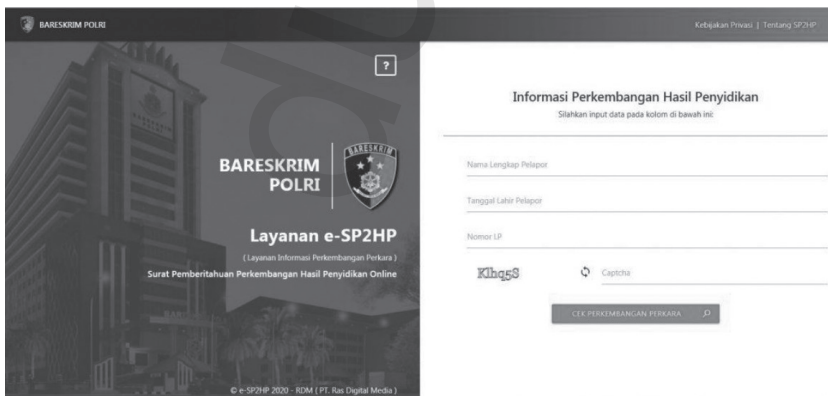
melalui website dengan alamat <https://pusiknas.polri.go.id/sp2hp/sp2hponline/>.

Untuk lebih melayani masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam menggunakan aplikasi SP2HP Online di *smartphone*, aplikasi ini ditampilkan dalam bentuk aplikasi Android di Playstore. Sejatinya, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan/penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 39 ayat 1, berbunyi dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan.

SP2HP sekurang-kurangnya memuat tentang:

1. pokok perkara;
2. tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya;
3. masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan;
4. rencana tindakan selanjutnya; dan
5. himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.



Tampilan SP2HP Online

SP2HP yang dikirimkan kepada pelapor, ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik dan diketahui oleh Pengawas Penyidik. Tembusannya wajib disampaikan kepada atasan langsung.

SP2HP merupakan layanan kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauhmana perkembangan perkara yang ditangani oleh pihak Kepolisian, sehingga dengan adanya transparansi penanganan perkara, masyarakat dapat menilai kinerja Kepolisian dalam menangani berbagai perkara tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

Dalam SP2HP, di sisi pojok kanan atas tertera kode yang mengindikasikan keterangan:

- A1: Perkembangan hasil penelitian laporan
- A2: Perkembangan hasil penyelidikan belum dapat ditindaklanjuti ke penyidikan
- A3: Perkembangan hasil penyelidikan akan dilakukan penyidikan
- A4: Perkembangan hasil penyidikan
- A5: SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan)

Interval Pemberian SP2HP

SP2HP pertama kali diberikan adalah pada saat setelah mengeluarkan surat perintah penyidikan dalam waktu tiga hari Laporan Polisi dibuat. SP2HP yang diberikan kepada pelapor berisi pernyataan bahwa laporan telah diterima, nama penyidik, dan nomor telepon/HP.

Waktu pemberian SP2HP pada tingkat penyidikan untuk kasus-kasus berikut.

- Kasus ringan, SP2HP diberikan pada hari ke-10, hari ke-20, dan hari ke-30.
- Kasus sedang, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, dan hari ke-60.
- Kasus sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, hari ke-60, hari ke-75, dan hari ke-90.
- Kasus sangat sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-20, hari ke-40, hari ke-60, hari ke-80, hari ke-100, dan hari ke-120.
- Tahap penyelesaian dihitung pada saat penyerahan berkas perkara yang pertama.



Bila Tidak Diberikan/Mendapatkan SP2HP

Mengenai penyampaian SP2HP kepada pelapor/pengadu atau keluarga, tidak diatur waktu perolehannya. Dahulu dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Perkap No. 12 Tahun 2009 (yang saat ini sudah dicabut dan diganti dengan berlakunya Perkap No. 14 Tahun 2012) disebutkan setiap bulan paling sedikit satu penyidik secara berkala wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta maupun tidak diminta, namun dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tidak lagi diatur mengenai waktu perolehannya.

Oleh karena itu, untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan yang sedang berlangsung, pihak pelapor dapat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan SP2HP kepada pihak kepolisian terkait, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perkap Nomor 21 Tahun 2011 juncto Pasal 12 huruf c Perkap Nomor 16 Tahun 2010.

Setiap penerbitan dan penyampaian SP2HP, Penyidik wajib menandatangani dan menyampaikan tembusan kepada atasannya. Dengan SP2HP inilah pelapor atau pengadu dapat memantau kinerja kepolisian dalam menangani kasusnya. Sewaktu-waktu, pelapor atau pengadu dapat juga menghubungi Penyidik untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Jika Penyidik menolak untuk memberikan SP2HP, kita dapat melaporkannya ke atasan Penyidik tersebut. Jika atasan Penyidik tersebut juga tidak mengindahkan laporan kita, kita dapat melaporkannya ke Divisi Propam Kepolisian Daerah terkait.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, selain memperbarui aplikasi SP2HP Online, Bareskrim Polri saat kepemimpinan Komjen Pol Listyo Sigit pada tahun 2019 kembali berinovasi dengan menerapkan sistem manajemen penanganan kasus secara daring sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan Polri terhadap masyarakat.

Dengan adanya inovasi ini, masyarakat yang membutuhkan informasi tindak lanjut kasus yang dilaporkan dapat mengeceknya sendiri. Masyarakat bisa mengetahui informasi tentang sejauhmana penanganan kasusnya secara *online*. Artinya, masyarakat tidak harus mendatangi kantor polisi, cukup memasukkan kode tertentu yang diberikan penyidik.

Bareskrim juga meningkatkan pelayanan masyarakat dengan menambah jalur pengaduan, melalui telepon, surat elektronik, dan media sosial. Masyarakat yang merasa ada keluhan tentang pelayanan Polri, ada penanganan kasus yang tidak tuntas, ada penyalahgunaan wewenang anggota polisi, bisa melaporkan langsung.

Masyarakat yang ingin mengadu, dapat menghubungi hotline pengaduan Bareskrim Polri melalui telepon 0811216777 atau email yanmas.bareskrim@gmail.com atau yanmas.bareskrim@polri.go.id atau [Twitter @yanmasreskrim](https://twitter.com/yanmasreskrim). Melalui layanan pengaduan ini, Bareskrim bisa lebih cepat mengetahui tindakan oknum polisi di daerah yang kerap dikeluhkan masyarakat dan menindaknya.

Listyo Sigit Ungkap Penyiraman Novel Baswedan

Dikenal tidak banyak bicara, tetapi banyak bekerja. Bukan *media darling* yang selalu dikerumuni awak media ketika bertugas. Sosoknya terbilang santun, berwibawa, dan penuh dengan kearifan layaknya seorang jenderal bermental melindungi, mengayomi, dan melayani, sebagaimana *tagline* Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dialah sosok Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang saat ini menjabat Kapolri.

Sebelum memegang pucuk pimpinan Korps Bhayangkara, Listyo Sigit Prabowo merupakan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri. Sebuah jabatan penting dan strategis di Markas Besar Kepolisian, karena tugasnya selalu jadi sorotan publik. Sementara itu, di sisi lain Bareskrim berurusan dengan beragam jenis tindak kejahatan.

Listyo Sigit Prabowo ditunjuk menjadi Kabareskrim menggantikan Jenderal (Pol.) Idham Azis yang dilantik sebagai Kapolri pada 1 November 2019. Penunjukan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kabareskrim tertuang dalam surat telegram bernomor ST/3229/XII/KEP/2019 tertanggal 6 Desember 2019. Surat telegram itu ditandatangani oleh Asisten Kepala Polri bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Irjen Eko Indra Heri.

Meskipun sosoknya terbilang pendiam, keberaniannya tidak perlu diragukan. Begitu resmi dilantik sebagai Kabareskrim di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin 16 Desember 2019 pagi, Listyo Sigit Prabowo, langsung memasang target besar. Tidak tanggung-



tanggung, Listyo Sigit Prabowo berjanji segera mengungkap kasus besar yang menjadi sorotan publik, yakni menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Kasus Novel Baswedan wajar menjadi perhatian serius Bareskrim Polri karena sudah lama menjadi sorotan publik. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan langsung Kapolri Jenderal Idham Azis untuk menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dalam hitungan hari. Presiden ingin Kapolri segera mengumumkan siapa penyerang penyidik KPK itu. Permintaan itu disampaikan Presiden dalam pertemuannya dengan Kapolri, Selasa 10 Desember 2019, “Saya tidak bicara masalah bulan. Kalau saya bilang secepatnya berarti dalam waktu harian.”

Presiden Jokowi saat itu bertemu dengan Kapolri untuk meminta laporan ihwal penanganan kasus Novel Baswedan. Kepada Presiden Jokowi, Kapolri melaporkan adanya temuan baru yang sudah menuju pada kesimpulan. Kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan terjadi pada 11 April 2017 ketika Novel Baswedan baru pulang dari sholat shubuh sekitar pukul 05.10 WIB. Tiba-tiba dua orang mendekat dan langsung menyiramkan air keras ke arah wajah Novel Baswedan. Penyiraman air keras yang mengenai bagian mata kiri mengharuskan Novel Baswedan harus berobat ke Singapura pada 12 April 2017 untuk menjalani perawatan. Novel Baswedan menjalani operasi di Singapore General Hospital. Dalam perjalanan upaya pengungkapan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, Polri telah melakukan berbagai upaya. Tim khusus dibentuk untuk mengusut tuntas kasus tersebut, namun belum ada hasil memuaskan.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi saat itu langsung meminta agar Kabareskrim Komjen Pol. Listyo Sigit dapat menyelesaikan kasus-kasus besar dalam jangka waktu 100 hari, termasuk kasus Novel Baswedan. Permintaan Presiden itu langsung dibayar tuntas oleh Listyo Sigit. Hanya berselang 12 hari setelah dilantik sebagai Kabareskrim, Listyo Sigit mengumumkan secara langsung penangkapan dua terduga pelaku kasus penyiraman air terhadap Novel Baswedan. Kedua terduga pelaku adalah Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis. Keduanya merupakan oknum anggota kepolisian.



belum ada foto

Pertanyaan untuk Penulis foto dalam file Foto-foto buku tidak ada pak.

Pelaku penyiraman

“Tadi malam tim teknis telah mengamankan pelaku yang diduga melakukan penyiraman terhadap saudara NB, pelaku ada dua orang inisial RM dan RB,” kata Listyo dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jumat 27 Desember 2019 kala itu.

Dalam proses hukum, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Setelah menjalani persidangan, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis diputuskan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada Kamis 25 Juni 2020 majelis hakim yang diketua Hakim Djuyamto membacakan putusan terhadap Rahmat Kadir Mahulette dengan vonis dua tahun penjara. Sementara Ronny Bugis dijatuhkan vonis 1,5 tahun penjara. Rahmat Kadir dan Ronny Bugis dinyatakan terbukti bersalah karena melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsider Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Memasuki tahun 2020, Bareskrim Polri langsung melakukan gebrakan. Sepanjang tahun 2020 Bareskrim Polri tercatat telah melakukan sejumlah penanganan, pengungkapan dan penyelesaian perkara besar yang menyedot perhatian publik. Tak hanya itu, pembenahan internal juga terus digalakkan di tubuh Reserse Polri. Bareskrim juga mengawal seluruh kebijakan pemerintah dengan



membentuk beberapa Satuan Tugas (Satgas), mulai dari Satgas Pangan, Satgas Migas, dan Satgas Kawal Investasi.

Tidak lama setelah pengungkapan kasus Novel Baswedan, Bareskrim Polri pada Kamis 30 Januari 2020, melimpahkan tahap II kasus tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi Kondensat PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah dinyatakan lengkap atau P21. Ketiga tersangka yang dilimpahkan yaitu Presiden Direktur PT TPPI Honggo Wendratmo, mantan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Raden Priyono, dan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono.

Kasus dugaan korupsi Kondensat PT TPPI telah bergulir sejak tahun 2015 lalu dan sempat mangkrak lama lantaran adanya kendala nonteknis. Namun, adanya koordinasi yang kuat antara Bareskrim dan Kejaksaan Agung akhirnya perkara tersebut bisa dirampungkan.

Dalam putusan pengadilan, Honggo divonis 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair 6 bulan kurungan. Sementara Raden Priyono dan Djoko Harsono, divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsidair 2 bulan.

Bareskrim Polri juga membuktikan bahwa penegakan hukum tidak pandang bulu dan mewujudkan komitmen dalam melakukan pembenahan internal. Hal itu dibuktikan dalam penangkapan buronan terpidana kasus hak tagih (cassie) Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Kamis 30 Juli 2020, publik dihebohkan dengan tertangkapnya Djoko Tjandra di Malaysia setelah buronan selama 11 tahun. Penangkapan Djoko Tjandra dipimpin langsung Listyo Sigit Prabowo. Penangkapan Djoko Tjandra berawal dari perintah Kapolri membentuk tim untuk membawa buronan Djoko Tjandra kembali ke Indonesia.



Buronan kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra (baju tahanan) saat tiba di Bandara Halim Perdikusuma, Jakarta, Kamis 30 Juli 2020) malam.

Sumber: BeritaSatu Photo

Penangkapan Djoko Tjandra menjadi bukti komitmen Polri dalam melakukan penegakan hukum, sekaligus untuk menjawab keraguan publik. Apalagi, dalam pengusutan perkara ini terungkap adanya keterlibatan dua oknum jenderal Polri yakni, Brigjen Prasetijo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte.

Sebelum menangkap Djoko Tjandra, jajaran Bareskrim Polri bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menangkap Maria Pauline Lumowa yang telah menjadi buronan selama 17 tahun dalam kasus pembobolan bank senilai Rp1,7 triliun. Maria Pauline Lumowa ditangkap oleh NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia, pada tanggal 16 Juli 2019. Maria Pauline Lumowa kemudian diekstradisi dari Serbia ke Indonesia pada tanggal 8 Juli 2020. Upaya pemulangan Maria ke Indonesia tercapai berkat adanya komunikasi yang intensif antara Polri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Luar Negeri dengan otoritas negara Serbia berkaitan dengan keberadaan Maria Pauline Lumowa.

Bareskrim Polri juga menangani kasus dugaan penyerangan Laskar Front Pembela Islam (FPI) kepada aparat kepolisian di Tol



Jakarta-Cikampek pada tanggal 7 Desember 2020 dini hari. Penyidikan dilakukan secara transparan, objektif dan merangkul seluruh pihak seperti Komnas HAM dan lembaga independen lainnya. Kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang menyeret pentolan FPI Rizieq Shihab, mulai dari Petamburan, Jakarta Pusat, kerumunan di Megamendung, Puncak, Kabupaten Bogor, dan RS Ummi Kota Bogor juga semua diambil alih oleh Bareskrim.

Bareskrim Polri juga mengambil alih pengusutan dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam kerumunan yang terjadi di acara Haul Syekh Abdul Qadir Jailani yang digelar di Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyyah, Kampung Cilongok, Kabupaten Tangerang, pada 29 November 2020. Pengungkapan kasus besar lainnya yang ditangani Bareskrim Polri adalah kebakaran Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung). Penyidik Bareskrim menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Kemudian, penanganan kasus korupsi, jajaran Bareskrim Polri tercatat menyelamatkan uang negara sebesar Rp310.817.274.052,-. Jumlah tersebut merupakan hasil penanganan dari 485 perkara korupsi yang ditangani.

Pada tahun 2020, Bareskrim Polri menerima laporan polisi terkait kasus tindak pidana korupsi sebanyak 1.412. Dari angka itu, sebanyak 485 perkara sudah rampung atau P21, dilimpahkan 19 kasus, dan dihentikan atau SP3 ada 31 perkara. Bareskrim Polri masih melakukan proses penyidikan sebanyak 877 perkara tindak pidana rasuah di Indonesia.

Dalam penanganan kasus di dunia siber, Bareskrim Polri sepanjang tahun 2020 tercatat telah mengungkap 140 kasus dugaan tindak pidana penyebaran informasi palsu atau hoaks terkait pandemi Covid-19. Berdasarkan data, dari ratusan kasus hoaks Covid-19 yang diungkap itu, setidaknya ada 140 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Hoaks dan provokasi bisa memecah belah persatuan Bangsa Indonesia, sehingga diperlukan kesadaran bersama untuk mencegah hal itu terjadi.

Selain hoaks, sepanjang tahun 2020 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga menangani beberapa kasus menonjol. Kasus-kasus itu di antaranya pengungkapan dugaan provokasi yang menyebabkan kerusuhan dalam demonstrasi menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Omnibus Law. Lalu, kasus dugaan penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama (NU) yang menetapkan satu orang sebagai tersangka. Kemudian,

kasus yang menjerat Ruslan Buton terkait dengan ujaran kebencian, perkara pembobolan E-Commerce jaringan internasional, kasus ilegal akses ke situs resmi Pengadilan Jakarta Pusat, dan ilegal akses ke Linkaja, serta penangkapan terduga pelaku penghinaan terhadap Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. Lalu penghinaan terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri juga mengungkap kasus penipuan oleh sindikat kejahatan internasional terkait dengan pembelian ventilator dan monitor Covid-19. Dalam hal ini, ada tiga orang pelaku ditangkap. Pada kasus ini, awalnya ada perusahaan asal Italia, yaitu Althea Italy dan perusahaan asal Cina, yaitu Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics yang melakukan kontrak jual beli terkait dengan peralatan medis ventilator dan monitor Covid-19.

Kinerja Bareskrim Polri dalam mengungkap kasus penipuan alat medis dengan korban perusahaan Belanda, juga mendapatkan apresiasi langsung dari otoritas Negara Belanda. Hal itu terwujud dari kunjungan kerja Duta Besar Belanda dan Atase Kepolisian Belanda. Pada kesempatan tersebut, otoritas Belanda memberikan apresiasi kepada Bareskrim Polri karena mengungkap kejahatan yang merugikan keuangan sebesar Rp51.206.450.722,90.

Kasus besar lainnya yang dibongkar jajaran Bareskrim adalah mengungkap narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1,2 ton. Barang bukti tersebut disita dari jaringan Iran-Timur Tengah yang ditangkap di dua lokasi berbeda, yakni di Serang, Banten dan Sukabumi, Jawa Barat. Total sepanjang tahun 2020, jajaran Bareskrim Polri mengamankan barang bukti 5,91 ton sabu, 50,59 ton ganja, dan 905.425 butir pil ekstasi. Dari 41.093 kasus tindak pidana narkoba, sebanyak 53.176 tersangka yang dilakukan proses hukum.

Untuk kejahatan narkoba, Bareskrim Polri bersama dengan Polda Metro Jaya mengungkap peredaran narkotika jenis sabu jaringan Timur Tengah, di Petamburan, Jakarta Pusat. Polisi menangkap 11 orang dengan barang bukti sabu seberat 200 kilogram. Kasus lain yang menonjol ditangani Bareskrim Polri, yakni kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Sepanjang 2020, kasus Karhutla mengalami penurunan jika dibanding tahun 2019.





Presiden Jokowi didampingi Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian meninjau penanganan kebakaran lahan di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Pelalawan, Riau, Selasa 17 September 2019.

Sumber: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Tahun 2020, Satuan Tugas (Satgas) Karhutla telah menetapkan 139 orang dan dua korporasi sebagai tersangka di mana 99 perkara telah diselesaikan oleh jajarannya, sementara 131 perkara masih dilakukan penyidikan. Area yang terbakar juga mengecil menjadi 274.375 hektare dengan titik api 2.875. Jumlah tersangka Karhutla mencapai 398 orang dengan 24 korporasi. Sementara itu, jumlah area yang terbakar mencapai 1.649.258 hektare atau terjadi penurunan drastis dibanding tahun 2019.

Tidak berhenti di situ, Bareskrim Polri mencatat sepanjang Januari hingga Desember 2020 telah mengungkap 455 kasus kejahatan lingkungan hidup yang dapat menyebabkan bencana alam. Hal itu disebabkan maraknya pelanggaran hukum *illegal mining* atau penambangan ilegal, kehutanan, dan tindak pidana perkebunan. Dari ratusan perkara yang diungkap itu ditemukan fakta bahwa aktivitas ilegal tersebut berdampak terjadinya bencana alam, seperti banjir bandang dan tanah longsor. Bencana alam terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Dari 455 kasus yang diungkap

Bareskrim sepanjang tahun 2020, setidaknya ada 620 orang yang telah dijadikan sebagai tersangka. Angka itu terbilang naik drastis dibandingkan tahun sebelumnya atau 2019 sebanyak 197 tersangka.

Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Bareskrim Polri

Berbagai elemen masyarakat memberikan apresiasi atas kinerja Bareskrim Polri. Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) pada bulan April 2020 melakukan survei terhadap kinerja Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri setelah empat bulan dipimpin Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Listyo Sigit dilantik Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis pada tanggal 15 Desember 2019. Saat melantik Listyo Sigit, Kapolri minta Kabareskrim sebagai pembina fungsi seluruh jajaran reserse meningkatkan pelayanan dan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan agar Program Penguatan Promoter dirasakan masyarakat.

Berdasarkan hasil survei independen yang dilakukan Lemkapi, tercatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap Bareskrim Polri dalam bidang penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan semakin baik. Hasilnya, tercatat 81,9% masyarakat puas atas kinerja Bareskrim Polri dan jajarannya di seluruh Polda. Survei yang memfokuskan pada tingkat kepuasan masyarakat ini dilakukan pada 16-30 April 2020 dengan menggunakan metode *multistage random sampling* dengan jumlah sampel 750 responden di wilayah Pulau Jawa. Margin of error survei sebesar 3,5%.

Direktur Eksekutif Lemkapi Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H., menyebutkan, terdapat beberapa faktor yang membuat masyarakat semakin percaya atas kinerja Bareskrim Polri di bawah komando Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo. Antara lain, *pertama*, faktor keberhasilan Polri mengungkap kasus besar, seperti penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Selama dua tahun lebih, kasus ini mendapat perhatian masyarakat dan akhirnya terungkap setelah Komjen Listyo Sigit ditunjuk Kapolri sebagai Kabareskrim.

Kedua, faktor kepedulian yang tinggi dalam memantau dan mengawasi persediaan logistik dan penegakan hukum yang tegas dan profesional terhadap pelaku kejahatan saat negara menghadapi penyebaran Covid-19. Beberapa jenis kejahatan yang banyak mendapat



sorotan publik saat ini adalah penanganan kasus hoaks yang semakin marak. *Ketiga*, penegakan hukum terhadap kasus pengungkapan kejahatan besar, seperti jaringan narkoba internasional, pembunuhan hakim Pengadilan Negeri Medan yang berhasil diungkap Reserse Polda Sumut dibantu Bareskrim Polri. Selain itu, kasus penipuan yang banyak merugikan masyarakat, juga banyak disukai masyarakat.

Keberhasilan seluruh jajaran Bareskrim Polri tentu memberikan citra baik dan akan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri. Memang masih terdapat responden yang belum sepenuhnya puas atas kinerja Bareskrim Polri yang angkanya sebesar 11,3%. Responden memberi alasan masih ada ditemukan oknum penyidik yang menyalagunakan kewenangan dan diskriminatif saat menjalankan tugasnya. Publik menginginkan Polri terus meningkatkan profesionalisme dalam tugas dan pengawasan yang kuat agar Polri semakin dipercaya masyarakat.

Dalam survei yang menyertakan patisipasi para mahasiswa dan masyarakat ini, sebanyak 6,8% responden tidak memberikan pendapat karena masih terus melihat kinerja Bareskrim sampai 6 bulan. Sebagai lembaga publik, Bareskrim Polri memerlukan persepsi yang baik terhadap masyarakat. Tidak hanya berhubungan dengan nilai kinerja, tetapi juga berhubungan dengan citra Bareskrim. Dalam *marketing*, citra begitu penting untuk dimiliki *brand* dan organisasi karena menyangkut kepercayaan konsumen. Dalam konteks Bareskrim adalah masyarakat.

Sistem Betah, Inovasi Rekrutmen SDM Polri

Profesionalisme bagi polisi sangat penting untuk ditingkatkan dan dimantapkan dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat terhadap sosok-sosok polisi yang ideal. Perumusan strategi pelaksanaan standardisasi profesionalisme Polri terus dilakukan Polri. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan masyarakat yang membutuhkan polisi dengan sikap ramah dan lemah lembut dalam pelayanan serta tegas dalam penegakan hukum dapat tercapai. Tuntutan mendasar yang harus terpenuhi agar profesionalisme Polri dapat terwujud dapat dimulai dari proses rekrutmen anggota Polri yang baik.

Untuk menjaring pendaftar, Polri telah melakukan berbagai sosialisasi terbuka, baik melalui media massa, spanduk, baliho maupun



sosialisasi secara langsung ke masyarakat atau ke sekolah. Semua tahapan seleksi dilakukan secara terbuka di mana seluruh peserta seleksi bisa melihat sendiri hasil seleksi di setiap tahapannya, mulai dari proses penerimaan berkas, pemeriksaan administrasi, kesehatan, tes akademik, psikotes, dan kesamaptaaan dan jasmani hingga proses kelulusan semua dalam pengawasan.

Sesuai perintah Kapolri yang menegaskan bahwa dalam setiap tahun anggaran penerimaan, setiap panitia Polda harus membentuk tim pengawas internal, yang terdiri dari Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) dan Bidang Propam Polda setempat, serta tim pengawasan eksternal, yaitu terdiri dari dinas pendidikan, dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Psikologi Indonesia (Himpisi), akademisi, guru olahraga, tokoh masyarakat, tokoh adat, LSM, dan media massa untuk mengawasi/menyaksikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi secara ketat, terus menerus, dan transparan.

Masyarakat diajak terus-menerus berperan serta dalam mengawasi setiap tahapan seleksi penerimaan anggota Polri, sehingga akan terjaring anggota Polri yang berkualitas, memiliki integritas yang tinggi dalam pekerjaan dan terpenting adalah memiliki sikap melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Polri sejak tahun 2016 mengusung visi terwujudnya polisi yang makin profesional, modern, dan terpercaya, guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong. Visi tersebut kemudian disederhanakan menjadi slogan “Promoter”, singkatan dari profesional, modern, dan terpercaya. Penjabaran “Promoter” tersebut yaitu:

Untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Polri yang semakin berkualitas, tentu saja harus dimulai dari proses rekrutmen. Dengan proses rekrutmen yang baik akan melahirkan Polisi yang baik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.





Proses seleksi penerimaan anggota Polri T.A 2017 untuk Bintara Tugas Umum dan Bintara TI Daerah Bali.

Sumber: <http://www.birosdm-poldabali.com>

Dalam rangka memperbaiki proses rekrutmen anggota agar semakin berkualitas, Polri telah melakukan perubahan substansi dan kultur yang diwujudkan dalam akselerasi transformasi di tubuh Polri, terutama pada proses penerimaan anggota Polri dengan mengacu pada prinsip dasar penerimaan berbasis “BETAH”, yang merupakan kepanjangan dari Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis. Dalam setiap perekrutan Polisi, baik di tingkat Tamtama, Bintara, Perwira sumber sarjana, maupun Akademi Kepolisian, wajib menerapkan prinsip BETAH.

Dalam rangka mewujudkan Polri yang bersih, transparan, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), seluruh Karo SDM se-Indonesia dan AS SDM dengan seluruh Kepala Biro SSDM Polri pada tahun 2017 menandatangani kesepakatan bersama.

Berikut isi kesepakatan kinerja tersebut.

1. Menyelenggarakan pembinaan SDM Polri secara profesional, bersih, akuntabel, objektif, dan bebas dari praktik KKN.

2. Melakukan rekrutmen proaktif untuk memperoleh calon anggota Polri yang berkualitas dengan menerapkan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.
3. Melakukan pembinaan kemampuan profesionalitas dan secara rutin untuk membangun, mengembangkan, dan memantapkan budaya Polri yang profesional dengan menggerakkan seluruh satuan wilayah, satuan kerja, satuan fungsi baik bidang pembinaan maupun bidang operasional demi terwujudnya visi promoter.
4. Menerapkan pembinaan karier berdasarkan sistem merit dan melakukan upaya-upaya inovatif untuk mencegah ataupun mengatasi praktik KKN yang dapat merusak sistem pembinaan karier anggota Polri.
5. Mengembangkan dan mengkaji sistem informasi personel Polri untuk mendukung proses pengelolaan SDM dan program kaderisasi kepemimpinan pada semua bidang tugas Polri untuk membentuk calon pemimpin Polri masa depan yang profesional, bermoral, dan berwawasan kebangsaan serta berintegritas.

Sistem BETAH telah diterapkan dalam setiap penerimaan calon anggota Polri oleh polda-polda di Indonesia. Sistem ini terbukti menghasilkan Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu, melahirkan SDM yang mampu mengemban tugas-tugas Polri yang ahli dalam bidang tugasnya, bekerja dengan benar sebagai pemelihara Kamtibmas, pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat.

Seleksi penerimaan calon anggota Polri yang semakin baik tersebut banyak diapresiasi publik. Oleh karena itu, Biro SDM Polri mendapat penghargaan Promoter Reward dari Lemkapi jelang pergantian tahun 2020. Lemkapi menilai Biro SDM Polri semakin dipercaya dan banyak diapresiasi publik setelah menerapkan sistem BETAH dalam penerimaan calon anggota Polri.

Penghargaan Promoter Reward diserahkan Direktur Eksekutif Lemkapi Dr. Edi Saputra Hasibuan sebelum melakukan FGD hasil survei Lemkapi dalam penerimaan SDM Polri di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2020. Penghargaan diterima Kepala Biro pengkajian dan strategi (Jianstra) SDM Mabes Polri Brigjen Pol. Sandi Nugroho. Bersamaan dengan penghargaan Promoter Reward, Lemkapi juga



menyerahkan penghargaan Public Trust Award atas hasil capaian Biro SDM Polri yang semakin mendapat kepercayaan publik.

Lemkapi memberikan penghargaan bukan tanpa dasar. Lemkapi sebelumnya melakukan survei dan penelitian. Kepala Divisi Riset Lemkapi, Dr. Awaludin Marwan, menyebutkan, dalam survei ini terdapat 399 calon anggota Polri dan masyarakat yang menjadi responden penelitian pada 4 Polda di Pulau Jawa. *Margin error* dalam penelitian ini sebanyak 5%. Hasilnya, sebesar 83,7% Sangat Percaya seleksi penerimaan anggota Polri dilaksanakan bersih, jujur, dan bebas KKN tanpa kecurangan. Sedangkan 10,8% responden mengatakan hanya Percaya. Lalu 5,5% responden mengatakan Tidak Percaya. Survei ini menggunakan metode *purposive sampling*. Dalam riset itu Lemkapi melakukan survei di sejumlah Polda di Pulau Jawa di mana rencananya survei mendatangi delapan Polda di Indonesia, tetapi dikarenakan sedang terjadi penyebaran Covid-19 akhirnya penelitian hanya dilakukan di Pulau Jawa.

ETLE Jadi Program Unggulan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit

Seorang Komika bernama Gilang Bhaskara benar-benar kaget mendapatkan surat dari kepolisian. Surat langsung dikirimkan ke alamat tempat Gilang Bhaskara tinggal.

Surat berisi keterangan tilang hingga tangkapan layar bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Gilang Bhaskara. Gilang yang merasa tidak pernah melanggar lalu lintas langsung melakukan pengecekan melalui internet. Setelah memasukkan kode tilang, Gilang Bhaskara menemukan video berdurasi 5 detik berisi kendaraan yang dikendarai Gilang Bhaskara menerobos lampu merah. Ia juga terkejut melihat kualitas video dari ETLE yang berkualitas baik (sumber: <https://www.suara.com/news/2019/07/26/130211/komika-ini-kaget-dapat-surat-cinta-dari-polisi-begini-penampakkannya?page=all>, diakses pada).

Surat yang diterima oleh Komika Gilang Bhaskara merupakan surat tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ELE). Gilang Bhaskara tertangkap kamera ETLE melakukan pelanggaran lalu lintas dengan menerobos lampu merah di salah satu tempat di Jakarta. Pelanggaran yang dilakukan sang komika hanya salah satu

Pertanyaan untuk Penulis pada kapan ya pak?

contoh kasus pelanggaran lalu lintas yang lazim dilakukan pengendara. Sudah rahasia umum jika pengendara lebih takut petugas yang berdiri tegap di pinggir jalan, ketimbang mematuhi aturan lalu lintas untuk menghindari kecelakaan.

Sistem ETLE terbukti memiliki banyak manfaat. Manfaat nyata yang dapat dirasakan adalah memberikan kepastian hukum, mendukung *smart city*, membantu pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta mendukung program pemerintah, terutama meningkatkan budaya tertib berlalu lintas.

Melihat keberhasilan penerapan ETLE di Jakarta, Polri terus berupaya memperbanyak kamera ETLE agar jangkauan tilang elektronik semakin luas. Sistem ETLE juga bertujuan untuk menghindari tilang langsung berupa tatap muka antara polisi dan pelanggar.

Sejak akhir tahun 2019 hingga Januari 2021, Korlantas telah meluncurkan sekitar 113 titik ETLE di lima Polda, yakni Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Polda Jawa Timur, meskipun sistem ETLE diterapkan, anggota lalu lintas tetap berada di lapangan untuk penjagaan, pengaturan, serta pengawalan dan patroli.

Apabila menemukan pelanggar yang dapat berpotensi kecelakaan lalu lintas dan tidak tercangkau kamera ETLE, anggota wajib menindak sesuai amanat undang-undang untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk penilangan yang bersifat stasioner, tidak dilakukan lagi kecuali ada kegiatan yang sangat darurat, seperti penghadangan pelaku curanmor, teroris, dan lain-lain.

Kakorlantas Polri Irjen Pol. Istiono menyampaikan bahwa gagasan ditiadakannya tilang langsung berupa tatap muka antara polisi dan pelanggar di lapangan sangat efektif karena dapat memberikan supermasi hukum, *smart city* yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, dan mewujudkan tertib berlalu lintas, serta mencegah terjadinya penyimpangan.

Inovasi ETLE ini juga merupakan upaya Polri menyambut Revolusi Industri 4.0 dan mendukung penguatan 8 komitmen yang akan dijalankan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Salah satunya menjadikan Polri sebagai institusi yang Presisi, yakni Prediktif, Responsibilitas,



Transparan, dan Berkeadilan. ETLE adalah implementasi teknologi untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.

Berdasarkan data Korlantas Polri, penindakan ETLE di Indonesia selama tahun 2020 tercatat sebanyak 39.233 pelanggaran. Sementara itu, berdasarkan *data Integrated Road Safety Management System (IRSMS)*, jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2020 tercatat sebanyak 100.028 kejadian. Korban meninggal dunia 23.529 orang, korban luka berat 10.751 orang, korban luka ringan 113.518 orang, dan kerugian material Rp198,455 miliar.

Data pelanggaran lalu lintas di atas menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas masih besar yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Dari hasil analisis dan evaluasi Korlantas Polri, masih cukup tinggi angka pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas. Untuk itu, Korlantas Polri siap melaksanakan program prioritas ETLE ke seluruh jajaran. Setiap Polres wajib memiliki ETLE. Hal ini memang tidak mudah, tetapi dengan dukungan semua pihak yakin bisa dilaksanakan.

Listyo Sigit dalam paparannya saat *fit and proper test* di Komisi III DPR RI sebelum dilantik sebagai Kapolri menginginkan polisi lalu lintas tidak perlu lagi melakukan tilang di lapangan. Keinginan Sigit itu lalu dimasukkan sebagai salah satu program 100 hari Kapolri. Begitu resmi menjadi Kapori, Sigit langsung pasang target. Kapolri menargetkan 10 Polda di Indonesia harus bisa melayani tilang elektronik (ETLE) dalam 100 hari kerja ke depan. Kapolri telah berkoordinasi dengan jajaran Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri untuk mewujudkan sarana dan prasarana penunjang.

Program itu kemudian direspons oleh Kakorlantas Polri dengan membentuk Satgas ETLE nasional yang bertugas mempersiapkan fasilitas ETLE secara nasional di jalan raya. Satgas ETLE Nasional dipimpin oleh Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Kushariyanto dengan Wakil Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol. Yusuf. Satgas ETLE Nasional dibentuk tidak lama setelah pelantikan Kapolri pada 27 Januari 2021. Salah satu yang disiapkan, yaitu penegakan hukum berbasis teknologi. Pada tahap pertama, Korlantas akan meluncurkan ETLE nasional di tiga Polda dan 4 Polresta, yaitu Polda Jawa Barat, Polda Jawa



Tengah, dan Polda Riau. Sementara itu, empat Polresta, yaitu Polresta Jambi, Polresta Gresik, Polresta Bandar Lampung, dan Polresta Padang.

Total terdapat sebanyak 166 kamera CCTV yang akan dipasang untuk memonitor arus lalu lintas di 3 Polda dan 4 Polresta tersebut. Sebelumnya Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur, dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah memasang kamera ETLE. Di wilayah hukum Polda Jatim, ETLE pertama kali diterapkan di Kota Surabaya yang secara resmi diluncurkan 16 Januari 2020. Peresmian saat itu dilakukan langsung Kakorlantas Polri Irjen Pol. Istiono bersama Kapolda Jatim Irjen Pol. Luki Hermawan dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Di sepanjang jalan Surabaya, setiap 15 meter terdapat kamera CCTV. Total terdapat lebih dari 500 CCTV yang tersebar di simpang dan ruas jalanan Kota Surabaya. Terdapat juga 43 CCTV yang merupakan kamera E-Tilang serta 10 Speed Camera yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Kamera yang dirancang pakar dari ITS tersebut dilengkapi teknologi tinggi. Kelebihan kecepatannya 400 kilometer per jam bisa menangkap siapa yang mengemudikannya. Untuk kamera keamanan, kecepatan 80 kilometer per jam. Di dalam mobil bukan hanya wajah, gerak gerak juga terdeteksi, dan terkoneksi dengan data kependudukan seluruh Indonesia.

Melihat kemampuan pendeteksi yang cukup bagus, Korlantas Polri lalu menjadikan kamera ETLE yang digunakan di Surabaya menjadi standar untuk daerah lain. Di Yogyakarta, Ditlantas Polda DIY resmi memberlakukan layanan ETLE pada Kamis 13 Agustus 2020. Pemberlakuan sistem tilang elektronik ini akan dilakukan di seluruh wilayah DIY. Peluncuran secara resmi akan dilangsungkan di Mapolda DIY.

Peluncuran ETLE Nasional tahap I dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit pada 23 Maret 2021, bertempat di Gedung Korlantas Polri dan diikuti oleh seluruh Dirlantas Polda se-Indonesia. ETLE Nasional ini terpasang di seluruh jalan raya wilayah Indonesia. Namun pemasangannya dilakukan secara bertahap, karena membutuhkan anggaran dan fasilitas agar bisa terintegrasi dengan baik. Pemerintah daerah perlu mendukung penuh program ETLE Nasional tersebut.

Sebelum peluncuran resmi pada bulan Maret 2021, sejumlah Polda mulai melakukan uji coba sistem tilang elektronik. Pengadaan alat



untuk ETLE semakin digencarkan agar penerapan sistem elektronik ini bisa cepat dilaksanakan di Indonesia. Memasuki awal Februari 2021, Polda Jawa Barat telah mempersiapkan sejumlah sarana dan prasarana, termasuk personel untuk dilatih mengaplikasikan sistem ETLE.



Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meluncurkan tilang elektronik atau Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) Nasional Tahap 1, di gedung NTMC Polri, Jakarta, Selasa 23 Maret 2021. Acara ini dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin, Jaksa Agung TB. Hassanudin, Menpan RB Tjahjo Kumolo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Direktur Utama PT. Jasa Raharja Budi Raharjo dan beberapa perwakilan dari instansi.

Sumber: Humas Polri

Pelaksanaan ETLE ini memang tidak serentak diberlakukan di seluruh daerah di Jawa Barat. Tahap awal baru diberlakukan di dua daerah, yakni Kota Bandung dan Cirebon. Alasannya, di Kota Bandung dan Cirebon sejumlah ruas jalan telah dilengkapi CCTV. Sedangkan daerah lain di Jawa Barat belum semua ruas jalan terpasang CCTV.

Di Banten, uji coba ETLE mulai dilakukan pada tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Maret 2021. Tahap pertama, ETLE diterapkan di wilayah hukum Polres Serang Kota dan secara bertahap diperluas ke wilayah lain. Selama uji coba ETLE ini Polda Banten hanya memberikan

imbauan saja kepada masyarakat, namun terhitung 1 April 2021 bagi masyarakat yang melanggar lalu lintas akan diberikan tindakan tegas berupa tilang elektronik.

Dari Pulau Sumatera, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Jambi mulai melakukan uji coba tilang ETLE pada Senin 1 Februari 2021. Satlantas Polresta Jambi menempatkan setiap titik atau lokasi masing-masing dua unit kamera, yang berfungsi untuk merekam setiap pelanggaran yang dilakukan pengendara. Total terdapat 18 kamera ETLE yang dipasang di enam titik. Kamera ini langsung merekam setiap jenis pelanggaran, sampai pada penggunaan sabuk pengaman bagi pengendara roda empat. Penerapan ETLE di wilayah hukum Polresta Jambi secara resmi akan diberlakukan pada Maret 2021.

Keenam titik persimpangan pemasangan kamera ETLE di wilayah Jambi, yakni Jalan Jenderal Ahmad Yani, Telanaipura, tepatnya di kawasan perempatan Simpang BI; kawasan perempatan Pal 10; kawasan Jalan Lintas Sumatera, Kenali Asam Bawah Kotabaru, tepatnya di depan Polsek Kotabaru; kawasan Tugu Adipura; kawasan Jalan Soekarno Hatta, Thehok, Jambi Selatan, dan kawasan perempatan Jelutung.

Setelah itu, kamera ETLE direncanakan dipasang di perempatan Talang Banjar, Jalan GR Djamin Datuk Bagindo, Jambi Timur; kawasan Simpang Bata, Pasar Jambi; simpang Sukarejo, Thehok, Jambi Selatan; dan Jalan Gatot Subroto, Cempaka Putih, Jelutung, atau tepatnya di persimpangan Bank Mandiri. Jajaran Satuan Lintas Polres Tuban bersama dengan Dinas Perhubungan pada 30 Januari 2021, juga sudah melakukan pengecekan kondisi perangkat kamera CCTV yang terpasang di *traffic light* yang ada di sejumlah ruas jalan di Tuban. Pengecekan tersebut dilakukan sebagai salah satu kesiapan perangkat pendukung untuk melakukan penerapan ETLE.

Terdapat dua titik lokasi yang sudah dicek untuk memastikan apakah sudah layak atau tidak digunakan dalam penindakan ETLE. Dua titik yang dilakukan pengecekan tersebut adalah keberadaan CCTV yang terpasang di perempatan lampu merah simpang empat Patung Letda Sucipto, Kota Tuban, yang merupakan simpang empat jalur pantura. Kemudian, CCTV yang ada di simpang tiga Rest Area Tuban yang menjadi salah satu jalur masuk Kota Tuban.



Polres Metro Depok juga sudah siap menerapkan sistem ETLE. Polres Metro Depok pada 23 September 2020 sudah melakukan uji coba kamera ETLE di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Balai Kota. Polres Metro Bekasi juga sudah menguji coba sistem ETLE di Sentra Grosir Cikarang (SGC), tepatnya di Jalan RE Martadinata, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, pada 11 Maret 2020. Uji coba ETLE itu disaksikan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana yang melihat langsung banyak pengendara roda dua dan empat yang terekam melanggar lalu lintas.

dummy



(BELUM ADA JUDUL)

Pertanyaan untuk Penulis Pak, sebaiknya bab ini diberi judul, baru masuk ke tulisan-tulisan (subbab-subbab), seperti di Bab 1 pak.

Inovasi Polda Metro Jaya di Bidang Lalu Lintas

Jakarta sebagai pusat pemerintahan Ibu Kota Negara Indonesia memang tidak bisa terlepas dari tingginya mobilitas masyarakat. Sebagai Kota Metropolitan yang juga pusat ekonomi bisnis, segala jenis kendaraan bermotor berlalu lalang setiap hari, baik roda dua, roda empat, angkutan barang, hingga angkutan umum.

Kajian Perhimpunan Studi Pengembangan Wilayah mencatat setidaknya 18 juta kendaraan pribadi masuk Jakarta setiap hari. Sementara Data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek menyebutkan, jalanan Jakarta didominasi kendaraan pribadi berupa sepeda motor (70%) dan kendaraan nonroda dua (25%). Sementara itu, kendaraan umum yang beredar di jalanan Jakarta mencapai 5%.

Kepadatan lalu lintas di Jakarta belum dibarengi dengan ketaatan pengendara mematuhi aturan. Angka pelanggaran lalu lintas di Jakarta masih tinggi dan setiap tahun cenderung meningkat. Pada tahun 2018 terdapat 1.617.566 pelanggaran yang dilakukan pengendara di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Angka tersebut meningkat sekitar 24,13% dari tahun 2017 di angka 1.303.157 pelanggaran. Mayoritas jenis pelanggaran lalu lintas berupa melanggar rambu lalu lintas, melawan arah, tidak mengenakan helm, dan menerobos lampu merah (*traffic light*).

Meskipun Indonesia mengalami pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) sejak Februari 2020, ternyata tidak menurunkan angka pelanggaran lalu lintas di Jakarta. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya malah mengalami peningkatan. Pada tanggal 23 Juli 2020, Polda Metro Jaya mencatat angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi selama pandemi Covid-19 atau selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlaku di DKI Jakarta, mencapai 484.302 pelanggaran.

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas di Jakarta merupakan hasil pantauan dari layar monitor di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena dapat memicu kecelakaan lalu lintas. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyebutkan, terdapat 15 jenis pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, yaitu:

1. menggunakan ponsel saat mengemudi kendaraan bermotor;
2. mengendarai kendaraan bermotor di atas trotoar;
3. mengemudikan kendaraan bermotor melawan arus;
4. mengemudikan kendaraan bermotor melintas jalur bus Transjakarta (busway);
5. mengemudi kendaraan bermotor melintas di bahu jalan;
6. sepeda motor yang melintas atau masuk jalan tol;
7. sepeda motor yang melintas jalan layang nontol;
8. mengemudi kendaraan bermotor melanggar aturan pemerintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
9. pengemudi yang tidak memberikan prioritas kepada pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan;
10. mengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan;
11. mengemudi kendaraan bermotor tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI);
12. mengemudi kendaraan bermotor yang membiarkan penumpang tidak menggunakan helm SNI;
13. mengemudi kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari;



14. mengemudi kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi/palang pintu kereta api sudah mulai ditutup;
15. mengemudi kendaraan bermotor berbalapan di jalan.

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelanggaran yang bisa ditindak, yakni sebagai berikut.

1. Tidak Pakai Helm

Aturan ini khusus untuk pengendara motor, di mana sesuai Pasal 106 ayat 8, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpangnya wajib mengenakan helm sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Hukuman yang diberikan bagi pelanggar termuat pada Pasal 290, yaitu kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000,00.

2. Menggunakan Gawai

Pelanggaran bermain gawai sambil mengemudikan motor atau mobil tertuang pada Pasal 283. Pengemudi yang melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi keadaan yang mengganggu konsentrasi di jalan akan dipidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda Rp750.000,00.

3. Melanggar Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan.

4. Pengendara motor dan mobil yang melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan diganjar kurungan penjara dua bulan dan denda Rp500.000,00, sesuai Pasal 287 ayat 1.

5. Tidak Memakai Pakai Sabuk Keselamatan

Untuk mobil, baik pengemudi dan penumpangnya, wajib memakai sabuk pengaman. Jika tidak, maka akan diganjar hukuman 1 bulan penjara atau denda maksimal Rp250.000,00, sesuai Pasal 289.

6. Menggunakan Pelat Nomor Palsu

Pelanggaran menggunakan pelat nomor palsu disebutkan pada Pasal 280. Kendaraan bermotor yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), sesuai aturan Polri, dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00.



Untuk mengatasi tingginya pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, Polda Metro Jaya terus berupaya mencari instrumen atau inovasi penindakan. Salah satunya melalui sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Tilang secara manual yang sudah dilakukan selama ini dianggap banyak mengalami kendala di lapangan, dari mulai kecepatan, komplain-komplain, sampai dengan potensi/penyalahgunaan kewenangan oleh petugas. Oleh karena itu, penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas bisa dilakukan melalui sistem tilang (bukti pelanggaran) secara manual, semi elektronik maupun secara elektronik (ETLE). Hal ini dilakukan untuk:

1. mencegah agar tidak terjadi kemacetan/kecelakaan lalu lintas maupun masalah-masalah lalu lintas lainnya;
2. memberikan perlindungan/pengayoman kepada pengguna jalan lain;
3. membangun budaya tertib berlalu lintas;
4. edukasi;
5. kepastian hukum.

ETLE adalah sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas berbasis pada teknologi elektronik berupa kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*). Kamera ANPR dapat mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor secara otomatis, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran.

Kendaraan yang tertangkap kamera ANPR langsung tercatat di server operator *Regional Traffic Management Centre* (RTMC) Polda Metro Jaya. Data tersebut langsung diolah oleh petugas. Dalam hal ini pengolahan data meliputi pengecekan identitas kendaraan bermotor (ranmor) di database Regident Ranmor. Selanjutnya, petugas akan membuat surat konfirmasi dan verifikasi. Kemudian, mengirimkan surat konfirmasi kepada alamat yang tertera dalam data pemilik kendaraan melalui Pos Indonesia.

Setelah mendapatkan surat konfirmasi, pemilik kendaraan wajib melakukan konfirmasi penerimaan melalui website www.ettle-pmj.info atau dengan melakukan scan barcode pada surat konfirmasi. Pemilik kendaraan juga dapat mengirimkan kembali blanko konfirmasi tersebut



ke posko ETLE di Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya. Pelanggar diberikan waktu lima hari untuk melakukan konfirmasi. Dengan metode konfirmasi ini pemilik kendaraan dapat mengklarifikasi siapa yang menjadi subjek pelanggar, termasuk jika kendaraan telah dijual ke pihak lain dan belum dilakukan proses balik nama.

Setelah proses konfirmasi dari pemilik kendaraan diterima, selanjutnya pelanggar diberikan tilang biru sebagai bukti pelanggaran serta kode bri virtual (briva) sebagai kode virtual pembayaran tilang melalui Bank BRI. Pelanggar diberikan waktu selama tujuh hari untuk melakukan pembayaran denda tilang. Jika tidak dilakukan pembayaran maka dilakukan pemblokiran STNK sementara sampai denda tersebut dibayarkan.

Tilang secara eelektronik dilakukan sebagai upaya pelayan keamanan dan keselamatan maupun hukum dengan mempersingkat cara menindak/melakukan penindakan oleh petugas di lapangan dengan menggunakan alat baca *barcode*/kode-kode pengaman pada SIM/ STNK maupun kendaraan yang sedang melintas. Penindakan tidak dengan blanko, tetapi melalui kamera CCTV maupun dengan *gate* secara *online* yang terhubung dengan *back office* untuk mengenali (*recognize*) wajah maupun kendaraan yang datanya akan diolah menjadi catatan perilaku berlalu lintas (*traffic attitude record/TAR*). Pelanggaran pengendara akan dikaitkan dengan sistem perpanjangan SIM pada program sistem nilai (*de merit point system*). Data perilaku berlalu lintas tersebut akan dianalisis berbasis pada *artificial intellegence* (AI) yang apabila ada konfirmasi, pemilik kendaraan atau pelanggar wajib membayar denda tilang di bank.

Dukungan kejaksaan dan pengadilan serta bank menjadi landasan atau acuan dasar sukses atau keberhasilan implementasi ETLE. Keuntungan penggunaan ETLE, yaitu sebagai berikut.

1. Tidak perlu menulis secara manual, sehingga lebih cepat waktu penindakan.
2. Tidak memerlukan blanko tilang.
3. Data tilang langsung bisa terkoneksi dengan Pusat Komando (*Back Office*) ETLE, sehingga diperoleh data akurat sebagai sistem pengarsipan (*filling*) dan perekaman (*recording*) dapat dikaitkan dengan TAR dan *de merit system*.



4. Terkoneksi dengan bank untuk pembayaran denda.
5. Terkoneksi dengan pengadilan untuk menyidangkan/menjatuhkan putusan denda.
6. Petugas dapat melampirkan bukti-bukti pelanggaran berupa foto/film/rekaman sebagai lampiran sidang.
7. Pelanggar dapat dikenakan *de merit point system* pada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.
8. Sebagai landasan pada sistem pengujian SIM, edukasi dan program-program polantas lain.
9. Dapat memberikan informasi aktual sebagai potret bahkan indeks budaya tertib berlalu lintas.
10. Menghindarkan praktik pungli petugas di lapangan.

Langkah-langkah untuk membangun tilang *online*, yaitu sebagai berikut.

1. *Political will*/kebijakan yang kuat dari para pimpinan *stakeholders* yang berkaitan.
2. Rasionalisasi implementasi, sehingga jelas dan mudah dipahami sebagai model implementasinya di lapangan. Rasionalisasi sebagai konsep pelaksanaan dijabarkan pada SOP dan panduan-panduannya.
3. Membangun sistem-sistem infrastruktur (*back office*, aplikasi, dan *network*), yang berbasis pada AI (*Artificial Intelligence*) dan IOT (*Internet of Things*) yang didukung dengan ERI (*electronic registration and identification*) produk-produk SIM dan STNK maupun TNKB yang menjadi ANPR (*Automatic Number Plates Recognition*) yang dilengkapi *barcode*/sistem-sistem kode yang bisa dibaca dengan kamera maupun pada gate penindakan.
4. Menyiapkan tim transformasi sebagai tim pendukung/tim kendali mutu.
5. Melakukan nota kesepahaman dengan para *stakeholders*.
6. Menyiapkan master dan *trainer* dan melakukan *training*.
7. Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk petugas administrasi tilang pada *back office*.
8. Melakukan *training* kepada para petugas penindak.



9. Melakukan *pilot project* dan sosialisasi.
10. Melakukan *monitoring* dan evaluasi.
11. Melakukan pengembangan ETLE.
12. Transfer pengetahuan (*knowledge*) dalam dunia praktik yang mengubah *mindset*.

Hal yang perlu dilakukan untuk tilang *online* atau E-TLE;

1. lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar;
2. meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat vatalitas korban kecelakaan;
3. membangun budaya tertib berlalu lintas;
4. memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Sistem tilang elektronik atau ETLE secara resmi diluncurkan di DKI Jakarta pada tanggal 25 November 2018 oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem ini kurang jalan karena kurang dukungan dari para *stakeholders* di DKI Jakarta. Akan tetapi, ketika Kapolri dijabat Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, tilang elektronik ini belakangan menjadi program unggulan Polri dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Perluncuran tilang elektronik dilakukan Kapolri di Korlantas Polri pada bulan Maret 2021 lalu. Begitu sistem ini diluncurkan, banyak mendapat apresiasi dari masyarakat. Sistem ini kemudian juga mengubah perilaku pengguna jalan untuk selalu tertib di jalan raya karena takut dipantau kamera CCTV.

Kapolri menyimpulkan sistem ETLE sangat efektif dan efisien serta transparan dalam penegakan hukum berlalu lintas, sehingga perlu terus dikembangkan. Oleh karena itu, pada tahun 2021 Polda Metro Jaya kembali mengajukan penambahan kamera ETLE sebanyak 50 unit kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Belakangan jumlah kamera CCTV terus bertambah hingga jumlahnya mendekati 95 kamera tilang,

Saat Kapolda Metro Jaya dijabat Irjen Pol. Drs. Fadil Imron, kamera CCTV terus dikembangkan dengan kamera mobile yang bisa memantau pelanggaran pengguna jalan secara bergerak. “Keunggulan kamera ini adalah memiliki fitur baru, yakni bisa bergeser secara dinamis memantau pelanggaran lalulintas,” kata Fadil Imron.





Kendaraan melintas di bawah kamera Closed Circuit Television (CCTV) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu 23 Januari 2021.

Sumber: Kompas.com

Keberhasilan lainnya yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam enam bulan terakhir adalah berhasil mengungkap lebih dari 1 ton sabu-sabu oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda yang dijabat Kombes Pol. Mukti Juhasa bersama jajaran Polres di Polda Metro Jaya.

Dalam catatan kami, Polda Metro Jaya adalah Polda penyumbang paling besar yang dilakukan Polri hingga jumlahnya lebih dari 5 ton sabu-sabu tahun 2021. Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengaku bangga melihat jajarannya terus berprestasi untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.

Inovasi Polda Jawa Timur

Di era digital dewasa ini, jajaran Kepolisian Daerah (Polda) hingga Kepolisian Resor (Polres) dituntut terus meningkatkan pelayanan publik prima dengan memanfaatkan teknologi informasi (IT). Polda Jatim bukan hanya membuat ETLE, tapi juga menyempurnakan teknologi ETLE dengan inovasi INCAR dengan menggunakan kamera mobile yang bisa bergerak di berbagai tempat. Dengan demikian, pelayanan publik betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Merespons

tuntutan itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Nico Afinta menghadirkan 10 inovasi pelayanan berbasis digital. Kesepuluh inovasi Polda Jawa Timur, yakni sebagai berikut.

1. *Integrated Node Capture Attitude Record* (INCAR)

INCAR dikombinasikan dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau Tilang Elektronik. Kamera di wilayah Polda Jawa Timur telah terpasang 55 titik. Dalam pelaksanaannya, ETLE akan dikombinasikan dengan teknologi INCAR.

Tujuan diluncurkannya INCAR ini sebagai upaya untuk mengurangi interaksi polisi dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan program Presisi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Perangkat INCAR terpasang di mobil lantasi yang dapat merekam semua jenis pelanggaran lalu lintas. Perangkat INCAR juga mampu mendeteksi wajah dan plat nomor kendaraan masyarakat yang melanggar. Dari situ, data yang muncul akan terkoneksi dengan sistem yang ada.

Kecanggihannya dari alat INCAR ini adalah bisa mendeteksi wajah. Jadi seseorang yang terdeteksi akan ketahuan nama, alamat, dan dia punya SIM atau tidak, kendaraannya resmi atau tidak, sudah bayar (pajak) apa belum, bisa terdeteksi. Alat ini bisa membaca plat nomor yang ada, sehingga dapat terkoneksi dengan data *Electronic Registration and Identification* (ERI) Korps Lalu Lintas (Korlantas) seluruh data, kendaraan yang beroperasi di Jawa Timur. Adanya ETLE terkoneksi nasional, bisa terdeteksi semuanya.

INCAR terkoneksi dengan database SIM. Selain itu, INCAR ini juga bisa terkoneksi dengan *Traffic Attitude Record* (TAR). Jadi seseorang yang mau memperpanjang SIM akan dilihat, dalam 5 tahun berapa kali melakukan pelanggaran, itu sudah bisa terdeteksi. Terobosan Polda Jatim ini mendapat apresiasi dari masyarakat. Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) memberikan penghargaan Presisi Award kepada Dirlantas Polda Jatim atas pengoperasian mobil INCAR.

2. Layanan Ramah Disabilitas

Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat berkebutuhan khusus.



3. Aplikasi Ujian SIM Online

Mempermudah masyarakat dalam melaksanakan ujian SIM. Dalam hal pengurusan SIM, bisa dilakukan secara *online* sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke gerai lalu lintas. Cukup dengan aplikasi, semuanya sudah bisa terlayani. Pengurusan SIM bisa dilakukan melalui *smartphone*. Masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM tinggal mengunduh aplikasi tentang informasi lalu lintas serta layanan lalu lintas.

4. Aplikasi SIM Online Delivery

Merupakan wujud pelayanan prima kepada masyarakat dalam hal pendistribusian SIM.

5. E-Kesehatan

Berfungsi untuk mempermudah dalam melengkapi persyaratan pembuatan SIM.

6. E-SKM atau Survei Kepuasan Masyarakat

Berfungsi sebagai sarana introspeksi terhadap organisasi.

7. Aplikasi Care

Sebagai sarana edukasi lalu lintas kepada masyarakat secara elektronik.

8. Aplikasi Pengesahan Link.

9. Aplikasi BPS atau induk aplikasi sebagai Database atau aplikasi induk.

10. Polbindes atau Polsek

Berfungsi mempererat komunikasi, koordinasi dan kolaborasi polisi dengan masyarakat.

Inovasi Pendekar Polda Banten

Jajaran Kepolisian di daerah juga terus berlomba melakukan inovasi dalam rangka mendukung program Presesi yang digagas Kapolri Sigit. Dalam kepemimpinan Polri Presisi, ditekankan pentingnya kemampuan pendekatan *predictive policing*. Tujuannya, agar Polri mampu menakar tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) melalui analisis berdasarkan pengetahuan, data dan metode yang tepat, sehingga dapat dicegah sedini mungkin.



Responsibilitas dan transparansi berkeadilan menyertai pendekatan pemolisian prediktif yang ditekankan agar setiap anggota Polri mampu melaksanakan tugasnya secara cepat dan tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggung jawab dan berkeadilan. Di wilayah Banten, Kapolda Irjen Pol. Dr. Rudy Heriyanto, S.H., M.H., M.B.A, siap mengawal dan mewujudkan program Polri presisi.

Mengawali pelaksanaan tugas sebagai Kapolda Banten pada tanggal 8 Januari 2021, Irjen Pol. Dr. Rudy Heriyanto, S.H., M.H., M.B.A., langsung memberikan *commander wish* kepada Pejabat Utama, Kapolres jajaran, Pamen, serta Pama Polda Banten, di Aula Serbaguna Polda Banten.

Commander wish ini untuk menyampaikan harapan Kapolda Banten kepada seluruh personelnya, mulai dari PJU, Kapolres, Wadir, Pamen, Pama dan Bintara serta ASN yang digelar secara virtual. Hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta langkah Program Kerja Polda Banten ke depan terkait pelaksanaan tugas Kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan jaminan keamanan selaras dengan program prioritas Kapolri.

Kapolri yang memiliki 16 program prioritas, untuk diimplementasikan secara bertahap melalui *timeline* penentuan rencana aksi, target, dan implementasi dalam tiga tahap. Tahap pertama 100 hari, tahap kedua 2021-2022, dan tahap ketiga 2023-2024. Sementara itu, 16 program prioritas akan diimplementasikan dengan program Presisi Kapolri dengan tujuan menata kelembagaan, perubahan sistem, dan metode organisasi (Kabar Banten, 2021).

Selanjutnya, menjadikan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri yang unggul di era police 4.0, perubahan teknologi kepolisian modern, peningkatan kinerja pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, peningkatan kinerja penegakan hukum, pemantapan dukungan Polri dalam penanganan Covid-19, serta pemulihan ekonomi nasional.

Untuk mendukung dan mewujudkan Polri Presisi Kapolri, di masa kepemimpinannya Rudy mengusung 12 program, meliputi Ngaji Bareng Kapolda, Rukun Ulama Umaro, Yuk ngopi wae, Subuhan keliling, Saba Pesantren, Sowan Sesepuh, Ronda Siskamling, Guyub TNI-Polri, Sinergi 3 Pilar, Warung Jum'at, Polisi sayang anak yatim, dan penguatan manajemen media.



Ke-12 program ini diambil dari latar belakang Daerah Banten yang memiliki unsur Religius Sangat Tinggi dan Sangat Toleransi. Program yang diambil dari latar belakang Kota Serang tersebut juga sengaja disesuaikan di wilayah Provinsi Banten. Seperti pada program Mengaji Bersama Kapolda Banten, Rudy akan mengikuti agenda pengajian di pesantren yang ada di Banten, juga pengajian yang ada dari berbagai unsur pemerintah. Kemudian program Saba Pesantren bersama Polres dan Polsek untuk mengunjungi pesantren bertujuan untuk Memuliakan Pesantren, agar para anggota memiliki empati, hal itu juga merupakan kepedulian kepolisian kepada Pesantren di Provinsi Banten. Program ini banyak diapresiasi masyarakat setempat.

Dalam memimpin Polda Banten, Rudy mengusung jargon Pendekar Banten. Pendekar Banten merupakan singkatan dari Polisi Empati, Ngayomi (Mengayomi), dan dekat dengan Rakyat Banten. Filosofi program Pendekar Banten diambil dari kearifan lokal di Banten. Pendekar dimaknai sebagai seseorang yang mempunyai keahlian seni bela diri. Pendekar menggunakan keahlian bela dirinya untuk membela kebenaran dan menegakkan keadilan serta membela yang lemah dan tertindas. (Tribunnews Banten).

Di Banten, istilah pendekar disebut dengan sebutan Jawara. Jawara sesosok atau seseorang kesatria, sama seperti pendekar. Kata empati dalam program ini dimaksudkan agar polisi memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap situasi yang sedang dirasakan oleh masyarakat. Ngayomi atau mengayomi dimaksudkan agar polisi harus menjadi panutan. Jadi, polisi itu harus bisa mengayomi atau ngemong, harus menjadi contoh teladan dan menjadi panutan bagi masyarakat.

Istilah Pendekar satu napas dengan *tagline* Polda Banten, yaitu merajut keberagaman, merawat kebhinekaan. Merajut keberagaman dirasakan perlu dilakukan di Banten mengingat adanya keberagaman suku, agama, dan ras, di wilayah ini. Rudy ingin semangat pendekar Banten harus tertanam dalam setiap personel Polda Banten dan Polres jajaran. Implementasinya, seluruh personel di Polda Banten dan unit kerjanya harus menjadi polisi yang mempunyai empati, mengayomi, dan dekat dengan masyarakat Banten.

Rudy memakai jargon Pendekar Banten untuk menanamkan sikap dan tekad tersebut. Selain itu, Rudy juga menciptakan mars Polda Banten. Mars ini sebagai wujud semangat Bhayangkara Polda Banten



dalam melaksanakan tugas selaku abdi masyarakat, melindungi, mengayomi, dan mengamankan masyarakat Banten.

Program Pendekar Banten di Tanah Jawara mendapat dukungan dan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dari Pemerintah Provinsi Banten. Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy yang juga Ketua DPP Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia (PPPSBBI) memastikan para jawara persilatan di Provinsi Banten akan mendukung program Polda Banten dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Saat ini Bapak Kapolda memiliki program dengan slogan Pendekar Banten yang senantiasa dapat diimplementasikan pada segenap personel Polda Banten yang mengayomi dan dekat dengan masyarakat,” kata Andika dalam sambutannya pada acara kunjungan Kapolda Banten Irjen Rudy Heriyanto ke Padepokan Debus Surosowan di Kota Serang, Senin 22 Februari 2021. Turut menyambut Kapolda, Ketua Padepokan Debus Surosowan Tb Suminta dan Walikota Serang Syafrudin. Kapolda sendiri didampingi Wakil Kapolda Banten Brigjen Pol. Ery Nursatari.

Jika melihat dalam konteks sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, keberadaan Pendekar atau Jawara berhubungan erat dengan kekuatan dan keberanian pejuang untuk melawan kekuasaan kolonial dan berlanjut sampai perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada era perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI, ulama dan Pendekar atau Jawara mampu berkonsolidasi. Keinginan untuk mengusir penjajah merupakan hal yang begitu mendasar dalam pemikiran para ulama dan jawara sebagaimana mayoritas masyarakat Banten.

Untuk itulah seluruh elemen masyarakat khususnya pelaku seni budaya dan Silat Banten siap bersatu meningkatkan partisipasi dalam pembangunan Banten ke depan. Sebagaimana visi yang telah dicanangkan yaitu mewujudkan masyarakat Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah.

Dukungan serupa juga datang dari tokoh ulama Banten KH. Abuya Muhtadi. Dukungan itu disampaikan KH. Abuya Muhtadi saat datang bersilaturahmi ke rumah Kapolda Banten Irjen Pol. Dr. Rudy Heriyanto, Minggu 24 Januari 2021. Kunjungan KH. Abuya sekaligus merupakan wujud silaturahmi antara Ulama dan Umaro yang juga merupakan



bagian program kerja saya sebagai Kapolda Banten. Pertemuan silaturahmi itu juga merupakan bentuk sinergitas Polri dengan para ulama dan sesepuh di wilayah hukum Polda Banten.

Keputusan Kapolri yang saat dijabat Jenderal Polisi Idham Azis yang menunjuk Irjen Pol. Rudy Heriyanto Adi Nugroho sebagai Kapolda Banten menggantikan Irjen Pol. Fiandar, memang mendapat apresiasi publik. Rudy diangkat menjadi Kapolda Banten berdasarkan Telegram Kapolri Nomor ST/3435/XII/KEP/2020. Rudy dilantik pada tanggal 5 Januari 2021.

Kehadiran mantan Direktur Eksus Bareskrim Polri itu disambut baik dan diyakini dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat Banten. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr. Edi Hasibuan, menilai Kapolri telah menunjuk sosok yang tepat dan selama ini dikenal memiliki kemampuan yang mumpuni. Selama Kapolda, Rudy banyak memberantas mafia tanah dan lebih banyak di lapangan memantau penanganan Covid dan pelaksanaan vaksinasi massal. Kini kedekatan Kapolda Banten dan pemerintah daerah serta para ulama dan tokoh masyarakat setempat banyak dipuji masyarakat. Bahkan rumah dinas Kapolda Banten kini kerap menjadi arena kegiatan silaturahmi masyarakat dengan polisi.

belum ada foto

**Pertanyaan
untuk
Penulis**
foto dalam
file Foto-
foto buku
tidak ada
pak.

Kapolda Banten terima penghargaan Lemkapi

Aplikasi E-Cakra Polda Jawa Barat

Dalam rangka mendukung program Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ‘Polri Presisi’, Direktorat Intelkam Polda Jawa Barat juga terus meningkatkan inovasi dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan meningkatkan pelayanan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan aplikasi E-Cakra. Direktorat Intelkam Polda Jabar telah mensosialisasikan program dari Kapolri untuk dicerna dan dipahami oleh seluruh masyarakat dengan menempatkan petugas pelayanan di SPKT, membagikan pamflet, dan pemasangan banner pelayanan di SPKT serta melalui media lainnya.

Petugas di SPKT akan menerima pengaduan dari masyarakat, dan pelayanan Polri yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan berkualitas dalam mengurus penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Izin Giat Masyarakat, STTP Giat Masyarakat, STTP Giat Unras, Surat Izin Senpi Berburu, Surat Izin Senpi Target, Surat Izin Senpi Reaksi, Surat Izin Penggunaan Senpi Satpam/Polsus, serta Surat Izin Produksi Handak/Pembuatan Handak dalam kawasan pengguna akhir. Pelayanan kepada masyarakat bukan hanya cepat, tetapi juga memberikan rasa nyaman. Kemudian, Kapolda Jabar Irjen Pol. Drs. Ahmad Dopiri juga banyak melakukan inovasi dalam pelayanan lainnya dalam mendukung program Presisi Kapolri Jenderal Pol. Drs. Lisatyo Sigit Prabowo.

Pelayanan publik dengan inovasi baru di Jawa Barat ada pula aplikasi E-Cakra yang kehadirannya juga banyak diapresiasi masyarakat. Aplikasi E-Cakra ini dalam operasionalnya banyak digunakan untuk mengawasi kinerja anggota lalu lintas yang bertugas di lapangan. Prestrasi lainnya Polda Jabar adalah berhasil melakukan vaksin terhadap 178 ribu warga di Jawa Barat. Jumlah ini cukup besar dalam mendukung program pemerintah vaksinasi sejuta vaksin dalam sehari karena meningkat penduduk Jawa Barat juga cukup besar. Kapolda sendiri sempat mendapatkan pujian dari Presiden Jokowi saat melakukan vidcom HUT Polri 1 Juli 2021 lalu. .

Sistem Tilang ETLE

Polda Jawa Barat secara resmi meluncurkan Aplikasi ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) Tahap 1 di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno



Hatta, Kota Bandung, pada Selasa 23 Maret 2021. ETLE merupakan sebuah sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis pada teknologi informasi dengan menggunakan kamera yang kemudian terdata secara langsung untuk menindak pelanggaran lalu lintas. Inovasi ini bisa menghilangkan potensi praktik “uang damai” bagi pelanggaran lalu lintas.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Ahmad Dofiri mengatakan kebijakan ETLE bisa membuat kinerja kepolisian lebih efektif. Dengan ETLE tidak harus menghadirkan petugas memantau secara konvensional dan berinteraksi dengan pengendara yang melakukan pelanggaran. Pengendara lalu lintas akan diberitahu mengenai sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan melalui surat atau notifikasi via gawai. Mereka bisa membayar denda saat itu juga atau bisa melalui sidang di pengadilan.

Kebijakan ini juga secara tidak langsung bisa membuat masyarakat lebih tertib dalam mengurus dokumen kepemilikan kendaraan, termasuk orang yang berbisnis kendaraan. Saat ini terdapat 21 Titik Kamera ETLE yang terpasang di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Sebanyak 21 titik yang dipasang kamera pengawas itu, yakni:

1. Simpang Pasteur (Jalan Dr. Djunjunan, Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo);
2. Simpang Pasteur (Jalan Dr. Djunjunan, Sukagalih, Kecamatan Sukajadi);
3. Simpang Pasteur (Jalan Dr. Djunjunan, Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo);
4. Simpang Dago-Cikapayang (Jalan Ir. Djuanda, Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong);
5. Simpang Dago-Cikapayang (Jalan Ir. Djuanda, Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan);
6. Simpang Surapati-Pahlawan (Jalan PHH. Mustofa, Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul);
7. Simpang Surapati-Pahlawan (Jalan Surapati, Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler);
8. Simpang Ahmad Yani-Riau (Jalan Jenderal Ahmad Yani, Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung);



9. Simpang Ahmad Yani-Riau (Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kacapiring, Kecamatan Batununggal);
10. Simpang Pelajar Pejuang-Turangga (Jalan Pelajar Pejuang, Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong);
11. Simpang Pelajar Pejuang-Turangga (Jalan Pelajar Pejuang, Turangga, Kecamatan Lengkong);
12. Simpang Asia Afrika-Otista (Jalan Otto Iskandar Dinata, Braga, Kecamatan Sumur Bandung);
13. Simpang Asia Afrika-Otista (Jalan Asia Afrika, Braga, Kecamatan Sumur Bandung);
14. Simpang Lima Kosambi (Jalan Sunda, Paledang, Jalan Kecamatan Lengkong);
15. Simpang Pasir Koja-Soekarno Hatta (Jalan Soekarno Hatta, Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay);
16. Simpang Pasir Koja-Soekarno Hatta (Jalan Soekarno Hatta, Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay);
17. Simpang Buahbatu-Soekarno Hatta (Jalan Soekarno Hatta, Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul);
18. Simpang Buahbatu-Soekarno Hatta (Jalan Soekarno Hatta, Cijagra, Kecamatan Lengkong);
19. Simpang Kiaracondong-Bypass (Jalan Nasional III, Kecamatan Kiaracondong);
20. Simpang Gedebage (Jalan Soekarno Hatta, Babakan Penghulu, Cinambo);
21. Cibiru (Jalan Soekarno Hatta, Cipadung Wetan, Kecamatan Panyileukan).

Inovasi Ruang Henti Khusus Sepeda Motor

Saat ini di berbagai wilayah di Jawa Barat terdapat Ruang Henti Khusus (RHK) sepeda motor yang tergolong unik. Sepintas, RHK di Jawa Barat mirip seperti yang ada di lintasan balapan MotoGP. Di sana terdapat gambar setengah kotak berwarna putih. Setengah kotak itu menjadi patokan roda depan untuk berhenti. Setiap kotak ke kotak lain juga berjarak, sehingga ketika ada sepeda motor berhenti, akan terlihat



sepeda motor itu berbaris serta berjejer rapi dan tentunya berjarak satu sama lain.

Di Kota Bandung, lokasi RHK salah satunya berada di sekitaran perempatan Jalan Merdeka-Aceh. Mayoritas pengendara memahami kehadiran marka khusus tersebut dan menggunakannya dengan tertib. Kehadiran RHK ini diinisiasi oleh Ditlantas Polda Jawa Barat. Total ada sebanyak 159 titik RHK di 22 kabupaten/kota se-Jawa Barat yang di sekitar RHK ditandai khusus.

Tujuan utamanya adalah agar pengendara sepeda motor menerapkan *physical distancing* alias jaga jarak saat berhenti di RHK karena *traffic light* atau lampu lalu lintas berwarna merah. Sebelum ada tanda itu, pengendara sepeda motor akan berhenti tanpa pengaturan khusus. Mereka berhenti di RHK dengan saling berdekatan. Setelah adanya tanda khusus itu, para pengendara akan lebih tertib dan berhenti di tempat yang sudah disediakan, sehingga sesama pengendara tidak akan lagi berhenti secara berdempetan.

Inovasi Polda Aceh

Jajaran Polri dituntut melakukan inovasi dan terobosan untuk menuju Polisi Presisi. Program Presisi diterapkan pada masing-masing satuan kerja Polri. Program prioritas diterapkan melalui rencana aksi masing-masing satuan kerja dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi meluncurkan aplikasi pengaduan masyarakat atau disingkat Dumas pada hari Rabu 24 Februari 2021. Peluncuran aplikasi Dumas Presisi dilakukan saat kegiatan Rakerwas Itwasum Polri Tahun Anggaran 2021 di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Dalam rangka mendukung program Presisi Kapolri, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh meminta seluruh jajaran Polres untuk menghadirkan inovasi-inovasi baru dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi seluruh satuan. Inovasi dibuat secara logis, sesuai dengan kegiatan rutin sehari-hari dengan tujuan masyarakat memahami dan mengerti dari kegiatan itu.



Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Polda Aceh meluncurkan sejumlah aplikasi dan inovasi pelayanan, sebagai berikut.

1. Aplikasi ADUNLON

Aplikasi pengaduan secara *online* di Itwasda Polda Aceh yang diberi nama ADUNLON ini dibuat sesuai perintah Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Wahyu Widada, M. Phil., dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat terhadap Polri.

ADUNLON merupakan platform digital yang bertujuan untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat atau sesama anggota Polri dalam hal mengoreksi kinerja Polri tanpa adanya rasa takut dan sungkan. Aplikasi ADUNLON merupakan karya inovasi dari Itwasda Polda Aceh yang mempunyai keinginan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik yang mudah dan efisien kepada masyarakat maupun sesama anggota polisi. Atas inovasi ini, Irwasda Polda Aceh Kombes Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., pada Jumat 26 Februari 2021 menerima penghargaan dalam bidang inovasi eDUMAS dari Mabes Polri.

Pengaduan yang ditujukan ke Polda Aceh dan jajarannya akan dilakukan klarifikasi. Seluruh pengaduan masyarakat yang masuk, baik pengaduan secara langsung, e-Dumas maupun melalui surat dari perorangan maupun lembaga pengawasan eksternal, seperti Ombudsman, Advokat dan LBH, Kompolnas, Mabes Polri, Itwasum, Kementerian Hukum dan HAM, akan dilakukan klarifikasi oleh Tim Itwasda.

Tujuan klarifikasi ini adalah adanya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas Polri dalam melayani masyarakat. Mekanismenya, semua pihak akan diundang, baik pengadu, masyarakat, advokat maupun LBH. Dalam klarifikasi ini, jika berkaitan dengan penyidikan, akan dihadirkan fungsi pengawasan lainnya, seperti Kabag Wasidik, Bidang Propam, Bidang Hukum, dan juga tenaga ahli sesuai permasalahan yang diklarifikasi.

Dalam forum klarifikasi ini, Polda Aceh juga menghadirkan pihak pelapor/pengadu dan diberikan kesempatan kepadanya untuk menyampaikan keberatannya atau hal-hal yang menjadi keberatannya atas proses perkaranya. Setelah itu baru diberikan kesempatan kepada penyidik untuk menjelaskan apa saja yang



sudah dilakukan. Selanjutnya didalami dan dibahas bersama, baik itu dari Itwasda, Propam, Bidkum, dan Wasidik, kemudian menyimpulkan bersama hasil klarifikasinya. Selanjutnya, hasilnya disampaikan kepada pengadu secara transparan. Kemudian, memberikan rekomendasi kepada Kasatker yang menjadi objek klarifikasi untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dalam hal pelayanan.

2. Aplikasi SILAT (Sistem Layanan Cepat)

Aplikasi Sistem Layanan Cepat Bid TIK Polda Aceh (SILAT) merupakan aplikasi yang dibangun untuk keterbukaan informasi bagi Satker yang memerlukan informasi pelayanan Bid TIK, berupa Layanan *Video Conference*, Pelayanan Jaringan, Pelayanan *Hosting Data*, dan Pelayanan *Sound system*. Aplikasi ini sangat berguna bagi Satker yang membutuhkan Layanan Bid TIK dalam meminta layanan tertentu, sehingga layanan yang diberikan terjadwal dan dapat dilihat oleh seluruh Satker.

3. Pelayanan dan Fasilitas Khusus Bagi Difabel

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Polda Aceh menyiapkan pelayanan dan fasilitas khusus bagi difabel yang akan melakukan pengurusan administrasi kendaraan bermotor, baik di Samsat maupun di Satpas SIM. Penambahan pelayanan khusus difabel tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan khusus untuk difabel mencakup toliet khusus, area tunggu, tempat parkir, petunjuk arah, loket khusus, petugas pelayanan khusus, aksesibilitas khusus, dan kursi roda. Dengan adanya pelayanan tersebut, penyandang disabilitas bisa lebih nyaman dan aman ketika melakukan pengurusan administrasi kendaraan bermotornya. Pelayanan dan fasilitas khusus difabel tersedia di semua Polres dalam wilayah hukum Polda Aceh.

Inovasi dan terobosan Polda Aceh untuk penyandang disabilitas juga diwujudkan melalui pemberian SIM D. Dirlantas Polda Aceh Kombes Pol. Dicky Sondani memberikan SIM D gratis pertama kepada penyandang disabilitas pada Kamis, 16 Juli 2020.

Dengan program SIM D, penyandang disabilitas sudah diakui dan boleh menggunakan kendaraan. SIM D ini juga bisa sebagai



pegangan identitas, apabila mengalami kecelakaan dalam berkendara di jalan raya. Seluruh penyandang disabilitas di Aceh yang sudah cukup umur kini bisa membuat SIM D.

4. Inovasi Aplikasi KUPI Aceh

Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh melakukan Inovasi Keselamatan berlalu lintas dan Pelayanan Publik berbasis IT melalui aplikasi KUPI Aceh. Aplikasi KUPI Aceh ini menunjukkan kecepatan personel Ditlantas Polda Aceh dan jajaran Polres dalam menangani kecelakaan lalu lintas, sehingga masyarakat yang menjadi korban laka lintas cepat ditolong oleh petugas.

Tidak hanya itu, Polda Aceh di bawah tongkat komando Irjen Pol. Drs. Wahyu Widada, M.Phil., juga berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan inovasi di bidang lalu lintas. Komitmen itu diwujudkan dengan membangun Gedung Ditlantas Polda Aceh yang baru di Kawasan Lamteumen, Banda Aceh. Gedung Ditlantas Polda Aceh ini diresmikan pada Selasa 12 Januari 2021 (“Resmikan Gedung Ditlantas Baru, Kapolda Aceh Minta Personel Tingkatkan Pelayanan dan Berinovasi”, diakses dari <https://tribrataneews.polri.go.id/read/4273/3/resmikan-gedung-ditlantas-baru-kapolda-aceh-minta-personel--tingkatkan-pelayanan-dan-berinovasi-1610510461> pada).

Menurut Kapolda Aceh, pelayanan lalu lintas kepada masyarakat harus terus ditingkatkan dengan memunculkan inovasi-inovasi baru, sehingga dapat mempermudah masyarakat. Kehadiran gedung Direktorat Lalu Lintas tersebut menjadi salah satu contoh dalam mempermudah masyarakat dari segi pelayanan. Namun, tentu saja semua personel lalu lintas harus terus meningkatkan kemampuan pengetahuan dan profesionalisme.

Gedung Ditlantas ini dibangun mulai tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp34.642.661.000 yang bersumber dari DIPA/APBN 2019. Luas gedung Ditlantas Polda Aceh ini 5.237 meter persegi, terdiri dari 3 lantai dan terdapat 36 ruangan.

Fasilitas yang tersedia di gedung Ditlantas Polda Aceh untuk lantai 1 terdiri dari fasilitas penunjang seperti lapangan apel, parkir, rumah pompa, rumah genset, dan penjagaan. Selanjutnya, lantai 2 terdiri dari ruang Dirlantas, ruang Wadir Lantas, ruang rapat

**Pertanyaan
untuk
Penulis**
pada apa ya
pak?



multimedia, ruang posko, ruang staf pendukung, ruang Subdit Regident, ruang pelayanan BPKB, serta ruang penyimpanan material SBST.

Di lantai 3 terdiri dari ruang Renmin, ruang Bag Binopsnal, ruang Subdit Ditkamsel, ruang Subdit Gakkum, Aula Serbaguna, dan lainnya. Kemudian fasilitas pendukung lainnya seperti lift, toilet, cctv, hidrant kebakaran, dan fire alarm.

Inovasi Polda Sumatera Utara

Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) berkomitmen mendukung sepenuhnya kebijakan Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., berupa transformasi menuju Polri Presisi. Kapolda Sumut di saat kepemimpinan Irjen. Pol. Drs. R.Z. Panca Putra Simanjuntak, M.Si. memiliki 5 program utama untuk mendukung sejumlah proyek nasional.

Program *pertama*, yaitu proyek prioritas menjadikan kawasan Danau Toba yang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). *Kedua*, mengatasi pandemi Covid-19. *Ketiga*, fokus terhadap penanganan gangguan Kamtibmas, mulai dari kejahatan umum, kejahatan jalanan, hingga penyakit masyarakat. *Keempat*, yaitu menjadikan media sebagai mitra strategis Polda Sumut. Kapolda Sumut menuturkan media memiliki peran penting dalam menjadi suasana Kamtibmas di wilayah Sumut. *Kelima*, yaitu Kapolda Sumut melanjutkan hal-hal yang baik yang telah dilakukan Irjen Pol. Martuani Sormin saat menjabat Kapolda Sumut.

Di tengah kondisi yang masih Pandemi Covid-19, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut tidak ketinggalan membuat inovasi di bidang pembayaran pajak kendaraan bermotor. Masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Drive Thru yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. Inovasi ini sejalan dengan program prioritas Kapolri untuk memudahkan pelayanan publik.

Pelayanan Samsat Drive Thru bertujuan mengurai kemacetan karena waktu yang dibutuhkan dalam setiap pengurusan juga relatif lebih singkat. Cara ini dapat meminimalkan pembayaran pajak tatap muka di masa pandemi. Setiap wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak tahunan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Drive Thru. Di loket Drive Thru ini, pemilik kendaraan tidak perlu turun,



baik sepeda motor ataupun mobil. Dalam pelayanan itu, wajib pajak harus membawa KTP asli dan STNK. Untuk pembayaran pajak di Drive Thru, wajib pajak tidak boleh mempunyai tunggakan lebih dari setahun.

Ditlantas Polda Sumut juga sudah memiliki fasilitas Samsat Corner di Sun Plaza dan Plaza Medan Fair serta 5 Bus Keliling dan Drive Thru Bank Sumut. Masyarakat punya pilihan dalam membayar pajak dan tidak harus ke kantor Samsat. Inovasi Drive Thru untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor ini mendapat apresiasi dari Lembaga Kajian Strategi Kepolisian Indonesia (Lemkapi) dengan menganugerahi Polda Sumut penghargaan Presisi Award.

Penghargaan diserahkan oleh Direktur Eksekutif Lemkapi Dr. Edi Hasibuan kepada Kapolda Sumut Irjen RZ Panca Putra di Markas Polda Sumut, Medan, Selasa 27 April 2021. Penghargaan diberikan setelah Lemkapi melakukan pengkajian dan menilai Polda Sumut selama ini banyak melakukan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan Polri terus dituntut makin baik dan cepat, tetapi tetap mengedepankan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

Edi mengatakan, “Pelayanan Drive Thru bayar pajak kendaraan sangat baik karena para wajib pajak tidak perlu turun dari kendaraan di Jalan Imam Bonjol, Medan. Ini inovasi bagus menghindari kerumunan”.

Aplikasi Propam Presisi

Dalam rangka mendukung Program Prioritas Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo demi terwujudnya Transformasi Menuju Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumut membuat inovasi dengan nama Aplikasi Propam Presisi. Aplikasi ini merupakan sarana pelayanan kepada masyarakat atau pelapor sehingga lebih cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan informatif.

Aplikasi Propam Presisi hanya untuk mengadukan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Polri dan atau ASN Polri yang bekerja pada kesatuan Polri. Jika ada oknum polisi dan atau PNS Polri yang melakukan pelanggaran bahkan mengganggu atau merugikan kenyamanan dan keamanan masyarakat, bisa dilaporkan melalui aplikasi Propam Presisi.



Aplikasi Propam Presisi bisa diunduh di Playstore melalui ponsel maupun diakses melalui website dengan alamat propampresisi.polri.go.id. Jika masyarakat ingin melapor, tidak perlu lagi datang ke kantor kepolisian, cukup melalui ponsel.

Untuk menggunakan aplikasi tersebut, masyarakat atau pelapor terlebih dahulu diminta memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan). Selanjutnya tersedia empat fitur layanan, yaitu Buat Pengaduan, Info Pengaduan, Cek Pengaduan, dan Testimoni.

Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan teknis lainnya. Jika ada oknum polisi atau ASN Polri yang terindikasi melakukan pelanggaran, laporan akan diteruskan ke bagian di bawah Propam yakni Paminal, Wabprof atau Provos, tergantung jenis pelanggarannya.

Dari laporan yang ada, akan diteliti lebih mendalam apakah itu masuk pelanggaran disiplin atau kode etik. Jika oknum yang dilaporkan terbukti melakukan pelanggaran, pasti akan menjalani proses persidangan. Bisa sidang disiplin atau sidang komisi kode etik profesi Polri, sesuai bentuk pelanggaran yang dilakukan.

Inovasi Polda Bengkulu

Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu menyiapkan sejumlah inovasi dan terobosan dalam rangka mendukung program kerja yang dicanangkan oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, yakni Polri yang Prediktif, Renponsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan (PRESISI).

Fokus utama Polda Bengkulu dalam mendukung program 100 hari kerja Kapolri yakni transformasi operasional, melalui pemantapan kinerja keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), peningkatan kinerja penegakan hukum, pemantapan dukungan Polri dalam penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi nasional, menjamin keamanan program prioritas nasional, dan penguatan penanganan konflik sosial. Program selanjutnya, yakni transformasi pelayanan berupa peningkatan kualitas pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegritas, dan pemantapan komunikasi publik.

Untuk menghadirkan Polri yang Presisi di tengah masyarakat, Polres Kepahiang Polda Bengkulu telah membuat program inovasi



sebagai bagian dari pelayanan yang diberi nama Jumat Bareng Polri. Program ini dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan ibadah Salat Jumat, di mana yang bertindak selaku khatib adalah anggota Polri. Anggota Polri yang bertindak selaku khatib harus dapat memberikan siraman rohani yang disertai imbauan agar seluruh elemen masyarakat dapat terlibat aktif dalam upaya menjaga dan memelihara situasi Kamtibmas yang kondusif.

Kegiatan ini dilaksanakan perdana pada hari Jumat 2 April 2021 oleh Kabag Sumda Polres Kepahiang AKP M. Nurda'i, S. Pd, M.Pd, bertempat di Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Karai dengan mengambil tema "Menjadi Insan yang Baik" yang menitikberatkan kepada hubungan sesama manusia dan kewajiban untuk berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Layanan Vaksinasi Covid-19 Drive Thru

Dalam menghadapi pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19), Polda Bengkulu melakukan inovasi dalam mensukseskan program vaksinasi Covid-19. Kamis, 25 Maret 2021, bertempat di lapangan parkir Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Polda Bengkulu melakukan peluncuran Vaksinasi Drive Thru Covid-19. Inovasi ini bertujuan untuk melakukan percepatan sasaran vaksinasi dengan pelaksanaan vaksinasi yang lebih nyaman tanpa mengesampingkan keamanan. Inovasi Vaksinasi Drive Thru ini merupakan yang pertama kali dilakukan di wilayah Provinsi Bengkulu.

Untuk yang perdana ini, Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bid Dokkes) Polda Bengkulu menyoal vaksinasi Covid-19 terhadap pelayanan publik, yaitu PT Jasa Raharja Bengkulu. Sebanyak 20 personel PT Jasa Raharja mengikuti proses mulai dari registrasi, screening, vaksinasi hingga ke tahap observasi.

Inovasi jajarannya Polda Bengkulu di tengah pandemi Covid-19 juga dilakukan oleh Polres Rejang Lebong, dengan memanfaatkan lahan tidur untuk menanam daun bawang sebagai upaya optimalisasi memenuhi ketahanan pangan di Kabupaten Rejang Lebong. Pemanfaatan lahan tidur tersebut berlokasi di seputaran Mako Polsek Curup, Kecamatan Curup. Lahan yang disiapkan seluas 1 hektare yang kesemuanya ditanami daun bawang. Hasil panen daun bawang sebagian dijual



dan sebagian untuk dibuat bibit guna dikembangkan kembali. Hasil penjualan tanaman diberikan kepada warga terdampak Covid-19.

Polres Kaur Polda Bengkulu juga berinovasi memanfaatkan lahan tidur dengan menanam sayuran serta peremajaan tanaman cabai sebagai upaya optimalisasi memenuhi ketahanan pangan di Kabupaten Kaur yang berlokasi di seputaran Mako Polsek Kaur Selatan. Lahan yang disiapkan seluas 2 hektare yang kesemuanya ditanami sayuran dan cabai yang telah disediakan oleh Polres Kaur.

Pemanfaatan lahan tidur tidak hanya dilakukan di satu lokasi saja melainkan dilakukan berkesinambungan di wilayah Kabupaten Kaur. Polres Kepahiang juga ikut melakukan hal yang sama dengan membuat tempat budidaya ikan lele serta menanam jagung yang dijaga secara bergantian oleh personel polisi yang piket untuk memberi makan serta membersihkan lokasi lahan yang dijadikan ternak lele dan kebun jagung.

Untuk menjalankan program ketahanan pangan bersama masyarakat di tengah penyebaran pandemi Covid-19, Polda Bengkulu juga melakukan inovasi dan terobosan kreatif dengan membentuk Kampung Berseri di wilayah Polres jajaran.

Pagi hari Kamis 30 Juli 2020, Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Drs. Teguh Sarwono, M.Si., didampingi Wakapolda, Danrem, dan Wakil Wali Kota Bengkulu melaksanakan kegiatan peresmian Kampung Berseri Sejahtera di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Pembentukan Kampung Berseri merupakan program yang dibuat untuk menjawab perintah Pemerintah Pusat yang mencanangkan program ketahanan pangan di tengah penyebaran pandemi yang berdampak ke seluruh sendi kehidupan. Kampung Berseri ini cukup bagus, karena mencakup kriteria Bersih, Sehat dan Mandiri (Berseri) di mana sudah ada rumah isolasi Covid-19, usaha masyarakat seperti pembuatan dan jual-beli ikan asin, serta kerajinan keran.

Torehan Prestasi membanggakan diraih oleh Polda Bengkulu dalam lomba Inovasi Pelayanan Saat Covid-19. Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu berhasil meraih juara satu dalam tiga kategori dari empat kategori yang dilombakan. Terdapat empat kategori lomba, yakni pelayanan SIM, inovasi pelayanan STNK dan TNKB, desain prototipe gedung pelayanan BPKB, dan lomba fasilitas materiil SIM, BPKB, STNK, dan TNKB (SBST). Dari empat kategori yang dilombakan,



Ditlantas Polda Bengkulu meraih nilai tertinggi dengan masing-masing menduduki juara I tiga kategori dari empat kategori yang dilombakan.

Di masa kepemimpinan Kapolda Bengkulu Brigjen Pol. Drs. Coki Manurung, S.H., M.Hum., berbagai upaya perbaikan pelayanan kepolisian sudah dilakukan menuju Polri yang ProMoter (Profesional, Moderen, dan Tepercaya).

Inovasi yang dilakukan antara lain kemudahan pelaporan atau pengaduan yang bisa dilakukan melalui SMS Centre Polda Bengkulu ke nomor 08117338686; Aplikasi Layanan Kepolisian yang diberi nama Cara Mudah Komunikasi HP Andorid atau disingkat Camkoha, yang dapat diunduh lewat playstore di ponsel android.

Selanjutnya, pengaktifan Pos Polisi dan Patroli Kepolisian (Blue Light) selama 1×24 jam, yang difokuskan pada jam dan tempat rawan terjadinya tindak pidana. Inovasi berikutnya, pengawasan keamanan dengan memanfaatkan teknologi CCTV yang dipantau oleh Regional Traffic Management Center (RTMC) Polda Bengkulu; dan pembuatan Pos Pengamanan serta Mushola Al Fitri di lokasi wisata Pantai Panjang, Kota Bengkulu.

Seluruh Polres jajaran Polda Bengkulu juga sudah memiliki *command center* yang tidak kalah dengan Polres-Polres yang ada di Polda di Indonesia. Secara bertahap Polda Bengkulu melakukan pembangunan Polsek hingga tercapai 1 Kecamatan 1 Polsek sehingga pelayanan kepolisian semakin maksimal. Termasuk pembuatan aplikasi berbasis teknologi sebagai sarana pemberian pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat melalui ponsel android, yakni Camkoha.

Berikut layanan dalam aplikasi Camkoha Polda Bengkulu.

1. Tulisan keluh masyarakat.
2. SKCK online.
3. SIM online.
4. SP2HP online.
5. Info SDM Polda.
6. Babinkamtibmas.
7. Bantuan terdekat.
8. Call center.



Di dalam aplikasi Camkoha juga terdapat tombol *panic button* yang dapat menghubungkan dengan kepolisian terdekat untuk memberikan bantuan secepatnya. Aplikasi ini terhubung dengan *Global Positioning System* (GPS) ponsel yang sudah mengunduh aplikasi, sehingga secara otomatis akan tersambung dengan lokasi keberadaan pelapor.

Inovasi Polda DIY

Kemajuan teknologi berdampak ke berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berbagai perubahan dan kemajuan di bidang teknologi menuntut kesiapan dan kesiapan seluruh instansi pemerintah, termasuk Polri, untuk segera beradaptasi dan menguasai teknologi guna memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan publik.

Beragam inovasi berbasis teknologi informasi (IT) telah dilakukan Polri untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung Program Kapolri, yakni Polri yang Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan atau disingkat Presisi, Polda DIY telah meluncurkan empat inovasi pelayanan publik berbasis teknologi pada 23 Maret 2021. Empat inovasi itu, yakni Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), E-Form SIM, SIM Drive Thru, dan E-Samsat. ETLE merupakan inovasi dari Mabes Polri, sedangkan E-Form SIM, SIM Drive Thru, dan E-Samsat merupakan inovasi dari Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda DIY.

ETLE merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis. Rekaman kamera ETLE dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas. Petugas akan mengirimkan bukti pelanggaran ke alamat pelanggar sesuai alamat dan data pemilik kendaraan. Selanjutnya pelanggar mempunyai waktu tujuh hari untuk konfirmasi baik lewat website maupun datang ke posko Subditgakkum Ditlantas Polda DIY. Di DIY terdapat empat titik ETLE, yakni Temon, Kulonprogo; Simpang Ngabean, Yogyakarta; Simpang Ketandan, Banguntapan, Bantul; dan Simpang Magowoharjo, Depok, Sleman.



E-Form SIM, adalah aplikasi pendaftaran perpanjangan SIM yang bisa diakses melalui website Ditlantas Polda DIY. Melalui E-Form SIM, masyarakat yang memperpanjang SIM A maupun C tidak perlu datang ke Satpas SIM, tetapi cukup melakukan pendaftaran melalui gadget masing-masing. Terdapat menu pilihan di tempat mana pemohon akan memperpanjang SIM-nya, termasuk pilihan pembayaran melalui BRIVA.

Setelah mendaftar dan membayar, pemohon akan dikirimkan kode unik untuk selanjutnya dibawa ke lokasi perpanjangan SIM. Pemohon tinggal memperlihatkan kode unik tersebut, selanjutnya tinggal foto dan tanda tangan, SIM langsung jadi tercetak.

SIM Drive Thru merupakan pelayanan perpanjangan SIM A dan C yang terletak di Lippo Mall Yogyakarta, di mana pemohon yang akan memperpanjang SIM tidak perlu turun dari kendaraan, cukup dari mobil bisa melaksanakan foto, sidik jari, tanda tangan. Selanjutnya SIM bisa langsung jadi dan dicetak saat itu juga.

Untuk proses perpanjangan SIM di SIM Drive Thru, masyarakat terlebih dahulu harus mendaftar melalui E-Form SIM yang ada di website Ditlantas Polda DIY.

E-Samsat merupakan pembayaran pajak tahunan dengan teknis pembayaran menggunakan ATM BPD DIY dan dilengkapi dengan E-posti yang dapat mencetak notice pajak kendaraan bermotor dan validasi pengesahan STNK. Dengan inovasi tersebut masyarakat tidak perlu datang ke Samsat tapi cukup melakukan pembayaran melalui ATM BPD DIY.

Selain di ATM BPD DIY, E-Samsat juga dapat dilakukan melalui Gopay. Untuk cetak resi pajak jika sudah ada resi pembayaran bisa dibawa ke E-Posti. Di DIY terdapat 27 titik E-Posti.

Bayar pajak tahunan tidak perlu lagi mengantre di Samsat, tetapi bisa lewat ATM BPD DIY atau Gopay dan resi pajak bisa dicetak di 27 titik E-Posti. Hal ini tentunya akan sangat memudahkan masyarakat terutama di masa pandemi Covid-19.

Aplikasi Polcast dan Limor

Bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-74 pada tanggal 1 Juli 2020, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Inspektur Jenderal Polisi



Asep Suhendar meluncurkan terobosan kreatif berupa Polisi Punya Podcast (Polcast) dan Live Monitoring Report Polda DIY. Keduanya diluncurkan untuk meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat.

Polcast merupakan sebuah program yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas melalui media sosial tentang ketertiban, keamanan masyarakat dan hal-hal lain yang berkembang di wilayah hukum Polda DIY. Program Polcast hadir menyusul perkembangan informasi yang muncul di media sosial. Konten video Polcast terdiri dari Kisah inspiratif Polisi, Kisah Inspiratif masyarakat, dan Diseminasi informasi Program Polri.

LIMOR merupakan penyajian sarana informasi melalui media video streaming di Lobby Polda DIY. Limor berisi informasi perkembangan Covid-19 baik global, nasional maupun regional Provinsi DIY. Bisa juga memonitor cuaca, arah angin, gelombang laut secara *realtime* melalui aplikasi wendy.com, memonitor menampilkan CCTV, kepadatan lalu lintas di wilayah Yogyakarta, dan kegiatan satuan petugas. Berisi informasi, dokumentasi kegiatan satgas, operasi kepolisian Polda DIY serta kegiatan kegiatan lain Polda DIY.

Aplikasi Sistem Informasi Patroli Online (SIPO)

Polda DIY juga memiliki aplikasi Sistem Informasi Patroli Online atau disingkat (SIPO). SIPO diperuntukkan sebagai pemantauan kegiatan patroli jajaran Polda DIY. (SINDOnews: Tingkatkan Kinerja Anggota, Polda DIY Launching Aplikasi SIPO).

Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda DIY Kombes Pol. Hermansyah yang memprakarsai aplikasi SIPO. SIPO dibutuhkan dalam rangka mendukung kinerja kepolisian, seperti akurasi data pelaksanaan patroli. Anggota di lapangan ketika berpatroli dapat langsung melaporkan kegiatannya melalui aplikasi SIPO, sehingga pimpinan bisa secara langsung memantau.

SIPO merupakan sistem untuk memantau dan memberikan informasi pelaksanaan kegiatan patroli anggota di wilayah hukum Polda DIY kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi untuk mengambil kebijakan sekaligus meningkatkan kompetensi di bidang pelaksanaan patroli.



Sistem kerja dari aplikasi ini, yakni anggota yang melaksanakan patroli melaporkan kegiatannya, dengan mengisi form yang ada di aplikasi SIPO, yaitu surat perintah tanggal dan waktu patroli, jenis patroli, sifat patroli, rute patroli, jumlah personel patroli, laporan hasil patrol, dan foto kegiatan patroli yang dilaksanakan. Data itu selanjutnya dilaporkan. Setelah terkirim akan terdata pada *dashboard* yang ada pada *command center* atau laptop pimpinan, sehingga apa yang dilaksanakan akan terpantau langsung.

Inovasi Polda BALI

Di Pulau Dewata, Polda Bali melalui Ditreskrimum melakukan terobosan positif untuk meraih predikat Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM). Terobosan positif Dit. Reskrimum Polda Bali untuk WBBM, yakni program SIAP BLI (Sistem Aplikasi Pelayanan Berbasis *Online*) dan SI PRADA RAJA BALI (Sistem Penyelesaian Perkara Berbasis *Restorative Justice* dan Adat Bali). Kemudian, kini ada pula aplikasi Simama (Sistem Mediasi Masalah) yang baru diluncurkan dan digagas Propam Polda Bali.

Program SIAP BLI, di dalamnya ada SPDP dan SP2HP Online. Sementara itu, untuk program SI PRADA RAJA BALI ini, tidak semua kasus atau laporan harus sampai di Pengadilan. Ada kasus-kasus tertentu yang sifatnya ringan bisa diselesaikan Kantor Polisi, tetapi dengan catatan antara korban dan pelaku sepakat damai baru korban cabut laporan. Namun, ini tidak berlaku untuk pelaku yang residivis.

Selain program-program tersebut, Ditreskrimum Polda Bali juga melakukan perbaikan pelayanan publik terus ditingkatkan, seperti kemudahan masyarakat penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan, ruang laktasi untuk ibu menyusui, ruang pelayanan khusus untuk anak dan perempuan, serta ruang khusus untuk pemeriksaan saksi dan tersangka. Di saat pandemi Covid-19 ini, juga disediakan tempat cuci tangan dan pengukur suhu bagi para pengunjung.

Atas terobosan tersebut, Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Bali menjadi Satuan Kerja pertama Ditreskrimum se-Indonesia yang meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Predikat itu telah diberikan Kementerian PAN dan RB yang diterima langsung oleh Direktur Reskrimum Polda Bali, Kombes Pol Djuhandani pada akhir Desember 2020.



Ditreskrim Polda Bali adalah Direktorat Reserse Kriminal Umum yang pertama se-Indonesia yang mendapatkan WBK. Predikat WBK itu tidak terlepas dari inovasi kreatif program unggulan Ditreskrim Polda Bali, yaitu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang dapat diakses melalui websitenya Ditreskrim Polda Bali.

Jadi, pelapor maupun terlapor tidak perlu repot-repot datang ke kantor untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Cukup dengan masuk ke laman web yang sudah diberikan pada saat memberikan laporan, mereka bisa mengecek dengan mengetik nomor laporan polisinya. Informasi perkembangan kasusnya sudah bisa diakses atau dilihat di website.

Masih bagian dari Polri Presisi, Polda Bali juga senantiasa mewujudkan situasi keamanan yang kondusif agar senantiasa terpeliharanya kerukunan antarumat beragama. Seperti yang dilakukan Kapolda Bali Irjen Putu Jayan Danu Putra Widyaiswara menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru Tahun 2020. Polda Bali menggelar tatap muka sebagai ajang silaturahmi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Majelis Agama di Bali (“Menjaga Kekokohan dan Kerukunan Umat, Kapolda Bali Tatap Muka Dengan Pemuka Agama”, diakses dari <https://balitribune.co.id/content/menjaga-kekokohan-dan-kerukunan-umat-kapolda-bali-tatap-muka-dengan-pemuka-agama-pada>)

Kegiatan ini bertempat di Lounge Andalan Polda Bali. Hadir dalam kegiatan Kapolda Bali Irjen Putu Jayan Danu Putra Widyaiswara, Wakapolda Bali Brigjen Pol. Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H.; Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, Ketua FKUB Bali/Indonesia; Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si., Ketua PHDI Bali; Bishop I Nyoman Agustinus, M.Th.o.; Js. Adinatha Lie, S.E., Ketua Matakin Bali; Pdt. Eka Wiradarma, Ketua Walubi Bali; H. Mahrusun Hadyono, Ketua MUI Bali; RM Venus Evensius Dewantoro, Ketua Keuskupan; Dr. I Gusti Made Ngurah, Wakil Ketua FKUB dan Wakil Ketua MDA; dan undangan lainna.

Kapolda Bali Irjen Putu Jayan Danu Putra Widyaiswara dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa barometer Indonesia adalah di Bali, sehingga apa pun yang terjadi di Bali, pasti terdengar di seluruh Indonesia bahkan dunia. Diharapkan agar FKUB Provinsi Bali bersinergi

**Pertanyaan
untuk
Penulis
pada kapan
ya pak?**

menjaga keamanan Bali. Jangan sampai Bali terprovokasi dengan isu-isu negatif yang saat ini beredar di masyarakat.

Dalam menghadapi Pandemi Covid19, Polda Bali telah meresmikan Laboratorium PCR RS Bhayangkara. Peresmian laboratorium tersebut dilakukan serangkaian dengan HUT RS Bhayangkara Denpasar ke-43, Rabu 27 Januari 202 yang dilakukan Kapolda Bali Putu Jayan Danu Putra didampingi Wakapolda Bali Brigjen Pol. Roycke Harry Langie. Peresmian laboratorium tersebut dilakukan serangkaian dengan HUT RS Bhayangkara Denpasar ke-43. Kapolda juga didampingi Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, dr. Ni Made Murtini MARS. Selain itu, juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Kepala Labkesda Provinsi Bali, dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Dalam kesempatan itu, Kapolda menyampaikan bahwa seiring dengan peningkatan kasus Covid-19 tiga minggu terakhir ini, Menteri Kesehatan melakukan langkah-langkah agar rumah sakit rujukan Covid-19 meningkatkan fasilitas tempat tidur ruang isolasi sebesar 30% dari jumlah tempat tidur rumah sakit.

Rumah Sakit Bhayangkara merupakan salah satu dari fasilitas kesehatan Polri di wilayah Bali. Rumah sakit ini sudah berupaya untuk meningkatkan jumlah tempat tidur, ruang isolasi dari 6 tempat tidur menjadi 30 tempat tidur. Begitu juga dengan fasilitas penunjang dalam pelayanan pemeriksaan laboratorium PCR.

Inovasi Polda Gorontalo

Dinamika perkembangan zaman yang berjalan pesat saat ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi yang berkembang sangat cepat. Kondisi ini membawa dampak kepada meningkatnya kompleksitas permasalahan di masa yang akan datang dan pastinya memengaruhi situasi keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Polri sebagai salah satu dari lembaga pemerintahan yang membidangi keamanan dan ketertiban masyarakat harus melakukan penguatan guna menghadapi dinamika perubahan yang terjadi tersebut. Kapolri dalam program prioritasnya “Mewujudkan Polri yang Presisi” melakukan transformasi organisasi melalui program menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0.



Dalam rangka mewujudkan kebijakan Kapolri tersebut, perlu didukung adanya sumber daya manusia Polri yang profesional dan berkualitas. Maka dari itu, SSDM POLRI melakukan penguatan, khususnya membenahan dalam dan seleksi penerimaan pendidikan pembentukan Polri. Salah satu implementasinya adalah melalui membenahan sistem seleksi dengan memedomani prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).

Dalam rangka mewujudkan seleksi yang Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH), Polda Gorontalo menggelar Pengambilan Sumpah dan Penandatanganan Pakta Integritas penerimaan Bintara dan Tamtama Polri Panda Gorontalo TA 2021 di Aula Titinepo Polda Gorontalo, Senin 13 April 2021.

Pada pelaksanaan Pengambilan Sumpah dan Penandatanganan Pakta Integritas Polda Gorontalo ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Pudji Prasetyanto Hadi, M.H. dengan didampingi oleh Karo SDM Polda Gorontalo Kombes Pol. Nanang Djunaedi, SIK., M.M. dan Kabid Dokkes Polda Gorontalo Kombes Pol. Dr. Wasis Murjito, serta dihadiri oleh Para Pejabat Utama Polda Gorontalo, para perwakilan calon siswa dan perwakilan orang tua calon siswa (“Wujudkan Polri yang Presisi Polda Gorontalo Gelar Pengambilan Sumpah dan Penandatanganan Pakta Integritas Penerimaan Bintara dan Tamtama Polri T.A. 2021”, diakses dari <https://tribatanews.gorontalo.polri.go.id/45900/wujudkan-polri-yang-presisi-polda-gorontalo-gelar-pengambilan-sumpah-dan-penandatanganan-pakta-integritas-penerimaan-bintara-dan-tamtama-polri-t-a-2021/pada>)

Untuk mendukung prinsip betah, diaplikasikan sistem komputerisasi mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan pelaksanaan tes seleksi, antara lain tes psikologi dan tes akademik yang sudah menggunakan sistem *Computer Assist Test* (CAT). Hal ini dilakukan untuk meminimalkan terjadinya penilaian secara subjektif dan lebih mengedepankan penilaian secara objektif.

SSDM POLRI sudah menggunakan aplikasi Clear And Clean (CNC) sebagai aplikasi yang dapat digunakan oleh para peserta seleksi untuk mendapatkan informasi tentang nilai dan proses jalannya seleksi, serta telah diluncurkannya aplikasi Whistle Blowing System (WBS) sebagai suatu aplikasi sistem pelaporan yang dapat digunakan oleh seluruh

**Pertanyaan
untuk
Penulis
pada kapan
ya pak?**

masyarakat guna melaporkan terjadi penyimpangan dalam proses seleksi penerimaan Polri.

Sistem pengawasan yang dilakukan Polri tidak hanya melibatkan pengawas internal, namun juga pengawas eksternal, antara lain dari LSM HIMPSI, IDI, wartawan DIKNAS dan DUKCAPIL guna meminimalkan terjadinya penyimpangan dan semakin mengoptimalkan proses seleksi agar dapat berjalan dengan baik

Canangkan Zona Integritas

Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo melakukan sejumlah langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju Polri yang Presisi. Pada tanggal 13 April 2021, Polda Gorontalo resmi mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pencanaan Zona Integritas dipimpin langsung Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Dr. Akhmad Wiyagus, SIK, di Aula Titinepo Mapolda Gorontalo.

Reformasi birokrasi sudah menjadi komitmen seluruh institusi beserta aparatur pemerintah dan pelayanan publik. Pencanaan pembangunan zona integritas sebagai langkah awal dan bagian dari menyukseskan reformasi birokrasi. Langkah awal dimulai dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, pelayanan prima, dan memuaskan.

Melalui perencanaan pembangunan zona integritas, diharapkan mampu membentuk karakter aparatur birokrasi baik secara pribadi maupun kelembagaan dan berdampak positif serta dirasakan langsung oleh masyarakat. Zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Polri mengacu pada Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/580/VI/2016 tertanggal 9 Juni 2016.

Ubah Petani Cap Tikus Menjadi Petani Gula Aren

Gorontalo dikenal dengan “bumi serambi madinah” yang notabene mayoritas Muslim. Namun demikian, masih ditemukan peredaran minuman keras (miras) jenis cap tikus.

Melihat persoalan ini, Polda Gorontalo berusaha mencari solusi serta jalan keluar yang terbaik. Salah satu cara yang dilakukan adalah



melakukan pengembangan terhadap peningkatan ekonomi bagi masyarakat petani aren.

Kondisi ini membuat Direktur Narkoba Polda Gorontalo Kombes Pol. Witarasa Aji melakukan terobosan untuk mewujudkan program prioritas Polri yang Presisi. Kombes Pol. Witarasa mengubah petani cap tikus menjadi petani gula aren. Inovasi ini merupakan terobosan bagus dalam mengubah *mindset*, terhadap pola pikir petani aren (“Inovasi Kombes Pol. Witarasa Aji Ubah Petani Cap Tikus Menjadi Petani Gula Aren”, diakses dari [http://ditnarkobagorontalo.id/berita/detail/inovasi-kombes-pol-witarasa-aji-ubah-petani-cap-tikus-menjadi-petani-gula-aren](http://ditnarkobagorontalo.id/berita/detail/inovasi-kombes-pol-witarasa-aji-ubah-petani-cap-tikus-menjadi-petani-gula-aren-pada) pada).

Langkah ini sekaligus dapat menekan tindak kriminalitas di Gorontalo yang kerap terjadi disebabkan karena minuman keras. Untuk mensukseskan program tersebut, Witarasa terlebih dahulu melakukan perencanaan awal dengan melibatkan jajarannya di Ditresnarkoba Polda Gorontalo. Tahap awal dilakukan survei ke lapangan dan pemetaan lokasi yang terdapat pohon aren. Selanjutnya berkoordinasi dengan pihak aparat pemerintah setempat dan petani.

**Pertanyaan
untuk
Penulis
pada kapan
ya pak?**

Inovasi Polda Kalimantan Tengah

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informatika berdampak pada tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan dan kinerja pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan terobosan strategis dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) terbaru.

Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) tidak mau ketinggalan dalam melakukan inovasi layanan publik berbasis TI yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang inovatif menuju Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparan, dan Berkeadilan), Polda Kalteng telah membuat tiga aplikasi pelayanan publik. Ketiga aplikasi tersebut diluncurkan langsung oleh Kapolda Kalteng Irjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., Senin, 8 Maret 2021. Ketiga aplikasi yang diluncurkan di Aula Arya Dharma tersebut, yakni aplikasi TSC (Traffic Service Center), Samolim (Samsat Online Isen Mulang) dan Zzebra Responsive (Zebres).

Aplikasi tersebut merupakan langkah inovasi dan bentuk upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas serta kemudahan dalam pembayaran kewajiban pajak daerah di wilayah Kalteng. Hal tersebut sebagai bentuk penjabaran dari program 100 hari Kapolri terkait dengan bidang transformasi pelayanan publik, yakni memberikan pelayanan yang makin cepat, mudah, transparan serta bebas akses kapan saja dan di mana saja kepada masyarakat.

Aplikasi TSC merupakan aplikasi pelayanan lalu lintas yang di dalamnya ada beberapa fitur layanan lalu lintas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Seperti fitur SIM *online*, masyarakat yang akan membuat SIM bisa mendaftar atau membuat SIM baru ataupun perpanjangan secara *online*. Peserta juga bisa melakukan ujian SIM secara *online*.

Apabila pemohon dinyatakan lulus, pemohon SIM bisa datang ke Polres setempat untuk melakukan ujian praktik. Setelah dinyatakan lulus, SIM yang bersangkutan bisa diambil.

Aplikasi Simolim merupakan aplikasi untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Masyarakat yang hendak membayar pajak kendaraan bermotor tidak perlu datang ke Samsat untuk mendaftarkan diri. Hanya dengan aplikasi tersebut dan mengikuti arahnya, semua yang diinginkan bisa dilakukan, meskipun dilakukan secara *online*.

Aplikasi Zebres merupakan layanan internal Ditlantas Polda Kalteng untuk mengumpulkan personel ketika ada hal-hal yang penting, seperti kemacetan di jalan raya, sehingga memerlukan bantuan personel lintas.



belum ada foto

Pertanyaan
untuk
Penulis
belum ada
foto pak?

Foto: penghargaan Lemkapi di Polda Kalteng

Quell Crime Isen Mulang (QCIM)

Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah meluncurkan Aplikasi layanan Publik berbasis android yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membuat laporan pengaduan serta membangun partisipasi masyarakat terkait dengan informasi keberadaan Daftar Pencarian Orang (DPO).

Peluncuran aplikasi ini dilakukan langsung oleh Kapolda Kalteng, Irjen Pol Dr. Dedi Prasetyo dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo bersama unsur Forkopimda Kalimantan Tengah di Aula Arya Dharma Mapolda Kalteng, Selasa, 22 Juni 2021.

Aplikasi ini merupakan implementasi dari program prioritas Kapolri yang dikenal dengan PRESISI yang mengandung arti prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan khususnya program 23, yaitu proses penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat serta menjawab harapan masyarakat Kalteng akan hadirnya layanan Polri yang mudah dan efisien khususnya di era pandemi Covid-19.

Keuntungan aplikasi “QCIM” antara lain masyarakat dapat melakukan pelaporan perkara yang dihadapi cukup dari alamat yang bersangkutan selanjutnya operator yang melakukan verifikasi kelayakan laporan tersebut. Setiap laporan yang masuk dan layak disidik akan diberikan bukti tanda penerimaan laporan yang akan diantar ke alamat

pelapor. SP2HP online versi EMP hanya bisa diakses apabila laporan telah berbentuk LP. Dengan aplikasi “QCIM”, laporan yang belum berbentuk LP pun dapat diberikan SP2HP (SP2HP LIDIK).

Apabila masyarakat melihat dan menemukan Daftar Pencarian Orang (DPO), bisa menyampaikan informasinya kepada penyidik cukup dengan melakukan “KLIK INFORMASI DPO” dan kerahasiaan pelapor tetap terjaga.

Gedung Command Center Telematika

Guna meningkatkan sarana dan prasarana Polda Kalteng merenovasi maupun membangun 14 ruangan dan gedung yang berada di Mapolda dan Polres Pulpis. Kapolda Kalteng Irjen Pol. Dedi Prasetyo meresmikan secara langsung 14 gedung yang bertempat di Lobi Mapolda, Senin, 22 Maret 2021 (“Armada Tempur Baru Polda Kalteng Wujudkan Polri Presisi”, diakses dari <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1358051-armada-tempur-baru-polda-kalteng-wujudkan-polri-presisi> pada).

Ruangan dan gedung yang diresmikan, yaitu Gedung Command Center Telematika, Ruang Kemitraan Presidi Ditbinmas, Gedung Inafis dan Labfor Ditreskrimum, Renovasi Aula dan Ruang Utama Masjid Baitussyuja’, Ruang Regional Traffic Management Center (RTMC) Ditlantas, Ruang Posko Satgas Saber Pungli Provinsi Kalteng, Gedung Poliklinik VIP Biddokkes, Gedung Community Center Ditintelkam, Renovasi Kantor Ditpamobvit, Ruang Sentra Yanduan Dumas Terintegrasi Bidprovam, Ruang Sidang Presisi Bidprovam, Ruang Subbidid Provos dan Paminal Bidprovam, dan Poliklinik Polres Pulang Pisau.

Semua yang diluncurkan ini bertujuan untuk meningkatkan sarana - prasarana guna menunjang personel Polda Kalteng dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan meningkatnya sarana prasarana Polda Kalteng ini dapat menjadikan Polri yang Presisi (prediktif, *responsibility*, transparan, dan berkeadilan).

Polda Kalteng juga saat ini memiliki Paviliun Presisi RS Bhayangkara Tingkat III Biddokes Polda Kalteng yang dilengkapi Poli Spesialis, CT Scan, dan Paviliun VIP, dan VVIP. Kemudian Presisi SPN Tjilik Riwut guna membentuk Bintara Polisi yang berdedikasi tinggi. Polda Kalteng membangun barak siswa calon bintara Polisi dengan kapasitas 200 orang.

Pertanyaan
untuk
Penulis
pada kapan
ya pak?



Polda Kalteng memiliki SKCK Trail Pelosok Dirintelkam sebagai kendaraan taktis pengantaran SKCK kepada masyarakat yang berada di permukiman dengan kondisi medan yang sulit ditempuh. Berbagai aplikasi pelayanan berbasis *online*, seperti Siap Mas Dirintelkam, Samolin Dirlantas, dan saber pungi.

Peresmian dan peluncuran Pembangunan Fasilitas Pelayanan Publik Polda Kalteng itu dilakukan di Mapolda Kalteng, Senin 14 Juni 2021, yang dilakukan secara langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Gatot Eddy Pramono.

AWS dan Mobil Pemburu Api

Berbagai upaya dilakukan oleh Polda Kalteng dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah hukumnya. Salah satunya dengan menciptakan terobosan kreatif alat pemadam api yang cepat dan sigap, yaitu Agus Water Spray (AWS) dan Mobil Pemburu Api. Kapolda Kalteng Irjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M. meluncurkan AWS buatan Bripka Agus personel Polresta Palangka Raya di Lapangan Barigas Mapolda, Selasa, 2 Maret 2021.

AWS merupakan alat pemadam portabel buatan Bripka Agus yang terinspirasi dari alat semprot cuci motor, kemudian dimodifikasi menjadi pemadam portabel dengan menggunakan aki dan dinamo serta kapasitas air 30 liter.

Sementara itu, mobil pemburu api berjenis komodo yang digerakkan untuk memadamkan api dengan medan yang berat dan tidak bisa dilalui mobil pemadam yang besar. Dengan adanya inovasi seperti ini dapat mempermudah personel di lapangan dalam bertugas memadamkan Karhutla yang ada di Kalimantan Tengah.

Inovasi Unggulan Telabang Mandau Polda Kaltim

Wilayah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai indeks risiko bencana yang tinggi, terutama risiko bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dan terobosan dalam penanggulangan Karhutla.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu institusi yang diperintahkan melakukan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang meliputi kegiatan:

1. pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
2. pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
3. penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.

Inovasi ini diperlukan untuk mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan sekaligus pembayaran ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang dibutuhkan untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan dan lahan, atau tindakan lain yang diperlukan, serta penerapan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Inpres, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) ditugaskan membantu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan mengerahkan kekuatan personel untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Bersama Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan instansi lain, secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli kawasan hutan dan lahan.

Polri melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; mengefektifkan upaya penegakan hukum pidana terhadap perbuatan melanggar hukum yang terkait kebakaran hutan dan lahan; dan menjatuhkan sanksi maksimum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atas pelanggaran, pembiaran, dan/atau persekongkolan yang melibatkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk menindaklanjuti Inpres tersebut, Kapolri telah membentuk tim asistensi untuk penanganan Karhutla di enam provinsi. Sebanyak enam Kepolisian Daerah (Polda) menjadi prioritas Polri dalam mencegah dan melakukan penindakan hukum tindak pidana Karhutla. Keenam polda, yakni Polda Riau, Polda Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Timur, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda Sumatera Selatan.



Sebagai salah satu Polda yang masuk prioritas, Polda Kalimantan Timur melakukan berbagai inovasi untuk menanggulangi Karhutla. Pada 23 Maret 2021, Polda Kalimantan Timur untuk pertama kalinya melakukan simulasi aplikasi LembuSwana, sebuah aplikasi untuk mendeteksi titik api dan mencegah Karhulta.

LembuSwana adalah aplikasi yang sudah terintegrasi dengan sistem satelit sehingga sumber api sekecil apa pun akan terbaca pada ponsel anggota Polri. Aplikasi ini akan mempermudah pencegahan Karhutla sebelum api membesar.

Aplikasi LembuSwana merupakan penyempurnaan dari aplikasi yang dapat melakukan identifikasi serta memberikan data titik panas (*hot spot*). Aplikasi LembuSwana ini hasil penyempurnaan aplikasi Lancang Kuning yang sudah dimiliki oleh Polri. *Dashboard* aplikasi LembuSwana dan Lancang Kuning yang tergabung jadi satu dihubungkan dengan *dashboard* yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup.

Sistem kerja aplikasi LembuSwana, yaitu setelah personel kepolisian mendapat informasi adanya titik api melalui ponsel, mereka langsung menuju lokasi sesuai koordinat yang diterima. Kemudian, dilakukan pemotretan baik lewat aplikasi Lancang Kuning maupun potret lewat kamera GPS yang ada di ponsel masing-masing personel.

Usai melakukan pemotretan personel akan mengirimkan hasil mendatangi lokasi ke Posko Digital melalui Aplikasi LembuSwana, yang akan diterima operator yang *standby* di ruang *Command Center*.

Selanjutnya, operator akan melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan untuk mengambil langkah selanjutnya dalam rangka pencegahan dan penanganan Karhutla, antara lain melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pengerahan anggota di lapangan.

Aplikasi LembuSwana terhubung langsung dengan citra satelit sehingga sumber api sekecil apapun dapat terbaca.

Layanan Polisi 110

Berbagai perubahan dan kemajuan di bidang teknologi menuntut kesiapan dan kesiapan seluruh instansi pemerintah, termasuk Polri untuk segera beradaptasi dan menguasai teknologi guna memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan publik.

Pada tanggal 22 Mei 2021, Polda Kalimantan Timur resmi meluncurkan inovasi terbaru dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yakni Layanan Polisi 110. Kapolda Kaltim Irjen Pol. Drs. Herry Rudolf Nahak, M.Si., menyebutkan, inovasi ini merupakan layanan pusat panggilan (*call center*) untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara mudah, responsif, dan tidak diskriminatif.

Layanan 110 lahir atas kerja sama dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap terselenggaranya layanan keamanan publik. Masyarakat yang melakukan panggilan ke nomor akses 110 akan langsung terhubung ke agen yang memberikan layanan berupa informasi pelaporan.

Laporan yang diterima berupa kecelakaan, bencana, kerusakan dan lainnya, serta pengaduan seperti penghinaan, ancaman, tindak kekerasan, dan lainnya.

Untuk melayani panggilan 110, sebanyak 70 personel disiapkan yang berasal dari Polresta Balikpapan dan Polda Kaltim. Anggota polisi yang dari Polda dimutasikan ke Polresta. Selain personel juga disiapkan 70 unit sepeda motor dan 10 unit mobil patroli.

Nomor telepon 110 sebenarnya nomor lama untuk menelepon dan meminta pertolongan polisi, seperti juga nomor 118 untuk memanggil ambulans, 113 untuk pemadam kebakaran, dan 115 untuk pertolongan pencarian dan penyelamatan. Layanan 110 ini tidak bisa dibuat untuk main-main karena Polri dapat melacak masyarakat yang membuat laporan bohong.

Inovasi terbaru lainnya, Polda Kaltim telah membuat inovasi pelayanan E-Samsat Bhabinkamtimas dan Samsat Kaltim Delivery serta aplikasi pelayanan cepat bernama Telabang Mandau. Aplikasi ini diharapkan pelayanan polisi bisa hadir 10 menit ketika diminta bantuan masyarakat.

Polda NTB Pecahkan Rekor Vaksinasi Massal

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) berkomitmen menjadi pionir implementasi program Transformasi menuju Polri yang Presisi. Tak lama setelah Kapolri baru dilantik, Polda NTB meluncurkan



beberapa program inovasi dengan tema Transformasi Menuju Polri yang Presisi, di Lobi Mapolda Rabu 3 Februari 2021.

Program berbasis inovasi ini dimotori Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda NTB, dengan membangun 6 inovasi layanan berbasis terpadu dan *online*. Keenam inovasi Bidpropam Polda NTB, yakni:

1. Website Bid Propam;
2. renovasi ruang pelayanan pengaduan;
3. pembangunan *electric gate*;
4. renovasi penjagaan markas;
5. renovasi ruang lobi Polda;
6. pembangunan ATM Center.

Dengan layanan pengaduan berbasis *online*, dapat direspons cepat, dan terukur. Masyarakat bisa langsung mengakses layanan pengaduan di website. Ini untuk memangkas birokrasi, apalagi masyarakat yang tinggal sangat jauh dari markas. Pengaduan *online* ini akan ditindaklanjuti dengan cepat sama halnya dengan masyarakat yang datang langsung melapor.

Dengan layanan berbasis *online* ini, selain memudahkan masyarakat melaporkan anggota polisi yang nakal, masyarakat juga dapat memantau perkembangan penanganan kasusnya dengan transparan dan akuntabel. Selain itu, akses masuk kendaraan satu pintu, dengan basis elektronik atau *electric gate* dan identifikasi data magnetik atau disebut Radio Frequency Identification (RFID) akan diberlakukan.

Setiap kendaraan anggota Polri nantinya akan ditanam *chip* untuk memudahkan identifikasi palang pintu yang mirip palang pintu tol, yang dibangun di gerbang masuk. Tujuannya adalah untuk mendisiplinkan dan menertibkan kendaraan anggota Polri dan Polda NTB, baik roda empat maupun roda dua. Layanan penjagaan dan pusat layanan laporan Bid Propam serta lobi utama Polda NTB juga akan direnovasi dengan mengakomodir sosio kultural masyarakat suku Sasak, Samawa dan Mbojo (Sasambo) agar lebih mendekatkan masyarakat dengan Polri, termasuk juga layanan perbankan dengan pembangunan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Bagi Kapolda NTB, Irjen Pol. M. Iqbal, inovasi Bid Propam tentu akan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Polri telah berbenah, dan menjadi polisi yang dekat dan dipercaya masyarakat sebagai pelindung dan pengayom. Propam sebagai garda terdepan penegakan keadilan memberikan akses kepada masyarakat lewat *website* sehingga masyarakat dapat menyampaikan kritikan, saran, termasuk informasi yang bermuara kepada pemeliharaan keamanan. Kapolda berharap inovasi Bidang Propam ini dapat ditiru oleh yang lain sebagai wujud tanggung jawab dan pengabdian kepada masyarakat.

Direktorat Lalu Lintas Polda NTB yang dipimpin Kombes Pol. Noviar juga telah banyak menciptakan inovasi. Sejak mengemban amanah sebagai Direktur Lalu Lintas Polda NTB pada Juni 2020, berbagai kegiatan dan inovasi telah banyak dilakukan mantan Dirlantas Polda Kalimantan Utara ini. Untuk itu, Masyarakat Peduli Keselamatan Berkendara (MPKB) NTB memberikan apresiasinya kepada Direktur Lalu Lintas Polda NTB Kombes Pol. Noviar yang sukses memberikan berbagai inovasi dalam layanannya. Seperti program Inovasi Go SIM dan SAMSAT Apps yang memudahkan masyarakat untuk mengurus SIM dan STNK kendaraan.

Koordinator MPKB H. Zulkipli bangga melihat cara Dirlantas yang melibatkan masyarakat dalam berbagai diskusi terbuka untuk sama-sama membangun keselamatan berlalu lintas di NTB. Selain diskusi, Dirlantas NTB juga mengadakan lomba-lomba keselamatan berlalu lintas di masa pandemi COVID-1, dengan melibatkan para milenial dan masyarakat umum lainnya, seperti TikTok Challenge Zebra Rinjani maupun lomba foto, dan *stand up* komedi.

Dirlantas Polda NTB telah memberikan kesempatan kepada warga masyarakat NTB untuk menuangkan ide dan gagasannya dalam hal membuat video pendek dengan tema mentaati lalu lintas dan menerapkan protokol kesehatan.

Kombes Pol. Noviar menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas apresiasi yang diberikan. Hal yang disampaikan oleh masyarakat tentu melalui penilaian yang mendalam. Hal yang telah dilakukan selama ini ada satu hal yang masih menjadi perhatiannya, yaitu Polantas dalam membangun kesadaran dan tertib disiplin tidak bisa sendirian.



“Polantas bukan satria baja hitam. Tanpa peran *stakeholders* terkait dan masyarakat pada umumnya, sangat jauh impian membangun disiplin dan tertib berlalu lintas dengan kesadaran bahwa hal itu demi keselamatan sendiri/orang lain, dan keselamatan menjadi sebuah kebutuhan dan budaya hidup keseharian masyarakat pengguna jalan. Ini akan menjadikan pemicu kami dalam terus berinovasi meningkatkan layanan terbaik kami kepada masyarakat.”

Layanan Aduan Polisi Nakal

Polda NTB banyak menerima laporan dari masyarakat terkait adanya oknum-oknum yang menjual nama pihak kepolisian untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Untuk itu, Polda NTB menyiapkan tempat pengaduan untuk masyarakat jika ada oknum polisi nakal. Posko pelayanan pengaduan masyarakat ini terpusat di Mako Polda NTB, Jalan Langko, Kota Mataram. Polda NTB juga menyiapkan beberapa layanan publik yang dapat diakses melalui jaringan seluler, seperti, layanan telepon 110 dan program Polisiku atau unduh aplikasi Dumas Presisi di Playstore. Semua layanan *online* tersebut langsung terintegrasi dengan server yang ada di Mabes Polri.

Satu menit setelah masyarakat mengirim aduan, Polda NTB akan langsung dikirim laporan tersebut untuk ditindaklanjuti. Pelapor dirahasiakan namanya sehingga siapa pun tidak akan ada yang tahu, kecuali pelapor serta pihak terkait yang berkaitan dengan laporan tersebut.

Jenis laporan yang boleh diadukan masyarakat bisa berupa keluhan terhadap internal kepolisian atau pemerintah. Petugas akan mengklasifikasikan aduan tersebut masuk menjadi urusan bidang apa dan siapa yang akan menangani kasus tersebut. Posko dan layanan aduan masyarakat ini sudah berjalan sejak April 2021. Sebagai langkah Pihak Kepolisian menciptakan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) ditubuh Polri.

Prestasi lainnya Polda NTB yang banyak diapresiasi masyarakat adalah dukungan Polda NTB dalam melaksanakan vaksinasi massal untuk mendukung program pemerintah vaksinasi sejuta vaksin dalam sehari. Polda NTB sendiri berhasil memecahkan rekor, yakni melakukan vaksinasi terhadap 33.522 warga dalam sehari. Jumlah yang ditetapkan



pemerintah sebelumnya hanya 22.770, tetapi Polda NTB jauh melampaui jumlah tersebut. “Insya Allah tahun ini, Polda NTB akan mampu melaksanakan vaksin 3,5 juta populasi warga,” kata Kapolda.

Inovasi Polda Papua Barat

Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat terhitung masih berusia muda. Kendati demikian, tidak ada alasan bagi Polda Papua Barat untuk berkecil hati. Polda Papua Barat terus membuktikan bahwa Provinsi Papua Barat bisa bersaing dengan kota-kota besar di Indonesia.

Sejumlah inovasi berbasis Informasi Teknologi (IT) dihadirkan di tengah masyarakat. Salah satunya Aplikasi Android MILIKU (Melayani, Inspiratif, Loyalitas, Inovatif, Komunikatif, Unggul), yang resmi diluncurkan Senin 19 April 2021. (tribrataneews.polri.go.id: Kapolda Papua Barat Resmikan 10 Aplikasi MILIKU).

Tujuan peluncuran aplikasi Android Rumah Milikku ini adalah untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Aplikasi MILIKU ini dibuat untuk membantu masyarakat Papua Barat dengan pertimbangan kondisi Pandemi Covid-19. Polri melalui program transformasi menuju Polri yang Presisi telah meresmikan berbagai inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi tanpa masyarakat hadir di kantor polisi.

Faktor geografis Papua Barat, di mana letak kantor polisi cukup berjauhan dengan tempat tinggal masyarakat, juga menjadi alasan lain peluncuran aplikasi MILIKU. Aplikasi MILIKU tetap mengedepankan pelayanan kepolisian yang transparan dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.

Kapolda memerintahkan seluruh layanan kepolisian di jajarannya, baik Polda, Polres, dan Polsek, menggunakan aplikasi ini. Dengan demikian, setiap layanan di kepolisian, baik Polda, Polres, dan Polsek, ada dalam satu genggaman melalui aplikasi Rumah Milikku.

Aplikasi MILIKU mudah diakses masyarakat. Menu layanan yang dapat digunakan di aplikasi milikku, mencakup berikut ini.

1. Menu player: merupakan layanan terobosan, dengan sekali tekan, masyarakat akan langsung terhubung dengan halaman Facebook “Kiberpol”. “Kiberpol” humas Polda Papua Barat



yang memberikan layanan komunikasi dua arah antara masyarakat dan Polri.

2. Menu player Tifa: merupakan sebuah layanan terobosan, dengan sekali tekan, warga akan langsung terhubung dengan halaman Facebook Tifa Humas Polda Papua Barat, yang senantiasa memberikan perkembangan informasi terkini tentang seputar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi Papua Barat secara *live*, setiap hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 10.00.
3. Fitur Website resmi Polda Papua Barat: dengan sekali tekan, warga akan langsung terhubung dengan website Papua Barat. polri.go.id yang berisikan informasi kegiatan Polda Papua Barat.
4. Fitur nomor emergency: fitur yang berisikan nomor layanan 110 dan SMS gateway Polda Papua Barat.
5. Fitur Bhabinkamtibmas: fitur yang berisikan informasi nomor telepon dan wilayah binaan Bhabinkamtibmas.
6. Fitur Nomor Penting: fitur yang berisikan informasi nomor telepon instansi terkait yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat.
7. Fitur Lokasi Penting: fitur yang berisikan informasi rawan kecelakaan kebakaran dan lainnya.
8. Fitur Chat: melalui fitur ini masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan petugas piket melalui layanan WhatsApp.
9. Fitur Daftar Pencarian Orang (DPO): melalui fitur ini masyarakat dapat melihat daftar pencarian orang atau orang hilang lengkap dengan ciri-ciri dan foto.
10. Fitur laporan pengaduan *online*: melalui fitur ini masyarakat dapat melaporkan apabila mendapat kurang baiknya pelayanan publik yang diberikan Polda Papua Barat.

Tidak hanya sepuluh fitur MILIKU di atas, masih banyak lagi terobosan layanan yang dapat dinikmati masyarakat dalam aplikasi MILIKU, seperti fitur permohonan izin keramaian, perpanjangan SKCK, pembuatan SKCK baru, pengaduan Propam SP2HP *online*, laporan pengaduan, dan pembayaran *online*.

Polda Papua Barat di masa kepemimpinan Irjen Pol. Tornagogo Sihombing juga melakukan berbagai inovasi dan terobosan dalam



rangka mendukung Program Polri yang Presisi. Inovasi tersebut, yakni sebagai berikut.

1. Bhabinkamtibmas Bubara (Berantas Buta Aksara)
Bhabinkamtibmas Malasom Polres Sorong Aimas Aiptu La Dauwi memberikan pengajaran kepada anak-anak usia sekolah di bawah umur dengan memodifikasi motor bhabin menjadi perpustakaan keliling.
2. Pondok Si Epen (Polisi Pemberi Edukasi dan Pendidikan)
Dilaksanakan oleh Anggota Satpol Air Polres Teluk Bintuni memberikan edukasi kepada anak-anak serta bantuan fasilitas tempat belajar serta wifi untuk mempermudah anak-anak dalam belajar dan dukungan sinyal.
3. Si Jaring (Polisi Pemberi Pelajaran Singkat) dilaksanakan oleh Anggota Satpol Air Polres Teluk Bintuni dibuat untuk anak-anak yang berdomisili di wilayah pesisir Kabupaten Teluk Bintuni untuk memberikan ilmu pelajaran serta mengajak belajar bersama di tengah pandemi Covid-19.
4. Melaksanakan pengantaran kepada anak sekolah dilaksanakan di wilayah jajaran seperti, Polres Sorong Kota, Polres Sorsel, Polsek Anggi, ada di Pulau Mansinam dengan menyebrangkan dengan perahu serta di seluruh Polres jajaran.
5. Delivery SKCK Pengantaran pembuatan SKCK kepada masyarakat dengan mendatangi masyarakat menggunakan sepeda motor. Dilaksanakan oleh Ditintelkam Polda PB, Polres Kaimana dan Polres jajaran.

Inovasi Delivery SKCK adalah salah satu bentuk peningkatan/*service* pelayanan di satuan Intelkam Polres Kaimana kepada masyarakat (pemohon SKCK), sehingga pemohon tidak perlu menunggu di kantor terlalu lama, karena setelah SKCK selesai dibuat, petugas SKCK segera melakukan pengantaran SKCK langsung kepada pemohon sesuai alamat masing masing.

Inovasi peningkatan dan layanan guna mendukung Polri yang Presisi itu tidak sebatas aplikasi semata. Polda Papua Barat menyadari bahwa belum seluruhnya masyarakat dapat mengakses pelayanan melalui sistem aplikasi di ponsel. Untuk itu, Polda Papua Barat menghadirkan



layanan SMS Pengaduan. Sama halnya dengan inovasi berbasis IT, layanan SMS Pengaduan ini juga secara cepat ditindaklanjuti.

Layanan SMS Pengaduan sebagai bentuk inovasi peningkatan dan layanan guna mendukung Polri yang persisi itu tidak sebatas aplikasi semata. Sistem SMS Pengaduan itu menggunakan server khusus SMS Gateway, sehingga diterima oleh server dan akan ter-*forward* secara otomatis ke Kapolda, Wakapolda, Irwasda, PJU, dan Kapolres jajaran.

Saat SMS itu diterima dan ter-*forward* otomatis, Satker atau Satwil terkait akan langsung merespons pengaduan itu. Layanan SMS Pengaduan dapat diakses dengan mengirimkan pesan via SMS gateway di nomor 08-1234-80-110. Berlaku untuk seluruh wilayah Papua Barat.

Di jajaran Polres, sejumlah inovasi juga dihadirkan sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di masa Pandemi Covid-19. Kamis 29 April 2021, Kapolda Papua Barat Drs. Tornagogo Sihombing S.Ik, M.Si. meluncurkan secara langsung aplikasi dan Inovasi Polres Sorong Kota yang terdiri dari Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Informasi Teknologi (Aplikasi Maladum, Inovasi Noken), Inovasi Pelayanan Publik Noninformasi Teknologi.

1. SI MESRA MAS KELAMBU (Polisi Merangkul dan Mensejahterakan Masyarakat Kelurahan Malabutor).
2. POLPEN ANTI SPIRTUS.
3. SIAMPUTASI (Polisi Antar Jemput Saksi).
4. RUANG PROBLEM SOLVING (BINBULU) .
5. PATROLI BACKBONE.
6. INOVASI SAT LANTAS (Siarkan, Gender, Simling, Si Jempol, Simalabim, Samsat Delivery, Samsat Drive Thru, BLP).

Di Raja Ampat, Kapolres AKBP Andre J.W Manuputty, SIK. meresmikan empat Program Kerja dan Inovasi Polres Raja Ampat bertempat di Polsek Waigeo Selatan dan Dermaga Kampung Saonek, Kamis, 11 Februari 2021. Program kerja dan inovasi yang diresmikan, yakni sebagai berikut.

1. Balai PRESISI Polsek Waigeo Selatan, yaitu balai yang ditujukan untuk menjadi tempat bagi Polsek Waigeo Selatan untuk melakukan penyelesaian konflik atau permasalahan di tengah-tengah masyarakat dengan metode *restorative justice*.



2. PERASA atau Polres Raja Ampat Ramah Disabilitas, di mana seluruh gedung di Polres, Polsek dan Polsubsektor akan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penunjang bagi masyarakat berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas.
3. GRACIAS atau Gerakan Anak Cerdas Indonesia program penyediaan fasilitas WIFI gratis bagi anak-anak usia sekolah dan mahasiswa untuk melaksanakan proses belajar mengajar secara daring.
4. Dermaga Tangguh, yaitu program penguatan dermaga-germaga kampung di wilayah Kabupaten Raja Ampat dalam usaha mencegah penyebaran dan penularan Covid-19.

Peresmian Balai Presisi serta peluncuran program kerja ditandai dengan pengguntingan pita dan pembukaan selubung logo dari Balai PRESISI, PERASA dan GRACIAS. Sementara itu, peresmian Program Dermaga Tangguh dilakukan di Dermaga Kampung Saonek, yang ditandai dengan pengguntingan pita serta pembukaan selubung logo Dermaga Tangguh Kampung Saonek oleh Sekda Kab. Raja Ampat.

Program kerja yang diresmikan dan diluncurkan ini merupakan implementasi dari beberapa Program Prioritas Kapolri tahap 1, antara lain mewujudkan Polsek menjadi basis resolusi bagi masyarakat di wilayah binaannya, serta merupakan wujud nyata dari Polres Raja Ampat untuk melakukan pendampingan terhadap Program Pemulihan Daerah di Kabupaten Raja Ampat di masa Pandemi Covid-19, serta masyarakat di Kota Waisai dapat merasakan langsung manfaat dari Program-program tersebut. Kapolres memerintahkan Kapolsek Waigeo Selatan untuk bisa memaksimalkan Program-program Kerja yang diresmikan.

Selain dipakai untuk melakukan pemecahan masalah secara *restorative justice*, Balai PRESISI juga dapat dijadikan tempat pelaksanaan aktivitas yang bersifat *capacity building* berupa pelatihan-pelatihan serta penyuluhan-penyuluhan.

Inovasi Polda Papua

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia meningkat sangat pesat dan semakin hari semakin canggih. Di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua, pembangunan infrastruktur juga dilaksanakan dengan



pesat dan cukup merata. Kedua hal ini berpengaruh terhadap kehidupan manusia yang semakin dimudahkan dalam banyak aspeknya. Di sisi lain, pola hidup masyarakat tentu juga mengalami banyak pergeseran, khususnya di masa pandemi Covid-19. Cukup banyak pola hidup masyarakat yang sangat berubah di berbagai aspek, baik aspek sosial, ekonomi, dan aspek-aspek lainnya, termasuk kesadaran akan pentingnya menjaga dan memelihara keamanan, keselamatan dan kelancaran serta ketertiban berlalu lintas atau disingkat Kamseltibcar Lantas.

Permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan timbulnya gangguan Kamseltibcar tentunya harus dapat diatasi bersama. Data jumlah pelanggaran lalu lintas di Tanah Papua berupa tilang tahun 2019 sejumlah 13.580 kasus, tahun 2020 sejumlah 17.273 kasus atau naik 27%, teguran tahun 2019 sejumlah 12.866 kasus dan tahun 2020 sejumlah 16.128 kasus atau naik 25%.

Korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia tahun 2019 sejumlah 283 jiwa dan pada tahun 2020 sejumlah 208 jiwa atau turun 27%. Korban luka berat tahun 2019 sejumlah 1.168 orang dan pada tahun 2020 sejumlah 897 orang atau turun 23%. Korban luka ringan tahun 2019 sejumlah 2.170 orang pada tahun 2020 sejumlah 1.780 orang atau turun 18%. Untuk kerugian material tahun 2019 sejumlah Rp9.172.308.000, dan pada tahun 2020 sejumlah Rp8.228.782.000 atau turun 10%.

Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri SIK menyadari bahwa permasalahan lalu lintas tidak bisa diselesaikan dengan berdiam diri. Kepolisian wajib melakukan berbagai upaya serta menjalin kerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan Kamseltibcar Lantas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini sejalan dengan Program Kapolri, yakni Polri yang prediktif, responibilitas, transparansi, dan berkeadilan yang disingkat Presisi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 mengamanatkan untuk mewujudkan dan Kamseltibcar Lantas, meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, membangun budaya tertib berlalu lintas, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik.

Berbagai terobosan kreatif telah dilakukan Polri untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Di era sekarang, Polri khususnya Polisi



Lalu Lintas dihadapkan dengan berbagai tantangan berbasis teknologi informasi (IT). Untuk itu jajaran kepolisian di daerah perlu mendukung program-program atau kebijakan Kapolri, salah satunya di bidang pelayanan publik yaitu penilaian secara elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), perpanjangan SIM berbasis *online*, serta bidang pelayanan publik lainnya.

Kemudian, pelayanan lintas dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) meliputi, pelayanan SIM Keliling dengan bus unit pelayanan SIM, SIM Corner di pusat perbelanjaan, perpanjangan SIM secara *online*, perpanjangan STNK melalui *drive thru*, pengadaan barang dan jasa dengan LPSE di seluruh Polda dan banyak unit pelayanan Polri yang telah mendapat penghargaan (sertifikat iso dan penghargaan pelayanan prima).

Fungsi lalu lintas telah menjawab hal ini. Salah satunya adalah dengan diluncurkannya program ETLE, implementasi teknologi untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan, dan ketertiban dalam berlalu lintas.

Untuk itu, Polda Papua merencanakan memasang kamera ETLE di jalan yang mampu mengidentifikasi serta merekam pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, termasuk nomor kendaraan yang melakukan pelanggarannya. Selanjutnya, proses tilang akan dilaksanakan secara *online*, yaitu dengan mengirimkan surat tilang ke alamat sesuai registrasi kendaraan, dan biaya tilang dapat dibayarkan melalui transfer bank oleh si pelanggar.

Inovasi Rumah Masyarakat Papua Penuh Damai (RM Papeda)

Terobosan dan inovasi pelayanan yang dilakukan Polda Papua telah mengharumkan Tanah Papua di kancah nasional. Salah satunya inovasi Rumah Masyarakat Papua Penuh Damai (RM Papeda) yang digagas Kepolisian Resor (Polres) Jayapura. Awalnya RM Papeda hanya berfokus pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Seiring perkembangan waktu RM Papeda menjadi *backbone* sinergisitas komunikasi di saat situasi darurat (bencana maupun keamanan), khususnya di Kabupaten Jayapura.



Pada tahun 2018, RM Paped untuk pertama kalinya mendapatkan predikat Top Terbaik/Terpuji KIPP. Sejak itu layanan RM Papeda terus berkembang dan pelaksanaannya terus berjalan. Tidak hanya pelayanan kepolisian, inovasi ini juga memberikan layanan berupa layanan pemeliharaan listrik, pemadam kebakaran, Unit Pelayanan Cepat Dinas Kesehatan, Bantuan Search and Rescue (SAR), dan penanggulangan bencana.

Inovasi ini dibangun untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian maupun instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam implementasinya masyarakat dapat terhubung langsung dalam frekuensi radio dengan menggunakan sarana komunikasi *handy talky* (HT), sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam penyampaian informasi dan dapat direspons langsung oleh petugas kepolisian dan *stakeholders* lainnya.

Masyarakat di kampung-kampung bisa berkomunikasi dengan Kapolres dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk menyelesaikan masalah di tingkat kampung. Dengan demikian, ide-ide ini mendekatkan polisi dengan masyarakat.

RM Papeda juga berhasil dikembangkan melalui aplikasi teamspeak yang tersedia secara gratis di Play Store. Pada tahun 2020, jaringan RM Papeda telah menjangkau 11 distrik dan 34 kampung di Kabupaten Jayapura.

Keberhasilan dalam memperluas jaringan tersebut juga diikuti dengan bertambahnya jumlah keanggotaan RM Papeda di berbagai tempat. Di tahun 2020, jumlah pengguna RM Papeda meningkat sebanyak 428 orang di mana sebelumnya di tahun 2018 hanya berjumlah 180 orang. Inovasi ini juga telah direplikasi di berbagai wilayah seperti di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom.

Dampak positif inovasi ini adalah meningkatnya kepercayaan antara polisi dan masyarakat. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada polisi itu bisa mencegah konflik.

Sejak dibentuk pada tahun 2017, RM Papeda memberikan manfaat yang cukup luas, di antaranya meningkatnya respons cepat anggota Polres Jayapura terhadap tindak pidana dan gangguan lain sebanyak 10,12% di tahun 2018, dan di tahun 2019 menjadi 16,94%, menurunkan

angka kriminalitas di Kabupaten Jayapura, dan meningkatkan angka penyelesaian masalah sebesar 3% per tahun dari tahun 2017 hingga tahun 2020.

Selain melibatkan pihak kepolisian dan *stakeholders* terkait, inovasi ini juga melibatkan peran aktif dari masyarakat seperti kepala desa, ketua RT/RW, serta Organisasi Amatir Radio Republik Indonesia (ORARI) yang berperan sebagai koordinator teknis serta pengawasan frekuensi radio RM Papeda. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan diselesaikan di situ. Artinya, peningkatan Bhabinkamtibmas di tiap desa dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan di tingkat desa sehingga permasalahan itu tidak berkembang.

Untuk keberlanjutannya, inovasi ini dimasukkan ke dalam rencana kerja Polda Papua tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam surat perintah Kapolda Papua No: Sprin/326/IV/OPS.2/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan RM Papeda di Masing-Masing Polres Jajaran Polda Papua. Program RM Papeda ini juga menjadi kampung tangguh Papeda atau kampung tangguh Papua untuk damai.

Pada tahun 2020 Polres Jayapura kembali meraih penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik 2020 dengan kategori *Outstanding Achievement of Public Service Innovations 2020* melalui aplikasi RM Papeda. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo dan diterima langsung oleh Kapolres Jayapura AKBP Victor Dean Mackbon di Ballroom Gedung Tribrata Dharmawangsa, pada tanggal 25 November 2020. Atas prestasi ini, RM Papeda diikutsertakan dalam United Nations Public Service Awards (UNPSA) yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Inovasi Polda Sulawesi Utara

Konsep *smart city* yang ditunjang dengan teknologi informasi merupakan sebuah kebutuhan yang harus disiapkan di era 4.0 saat ini. Hal itu direspons Polda Sulawesi Utara (Sulut) dengan melakukan inovasi sebagai upaya menjaga keselamatan para pengendara. Salah satunya dengan memasang kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau dikenal dengan tilang elektronik.



Polda Sulut resmi meluncurkan ETLE pada Selasa 23 Maret 2021. ETLE di Direktorat Lalu Lintas Polda Sulut adalah implementasi teknologi untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan, dan ketertiban dalam berlalu lintas. Pemetaan data kecelakaan menunjukkan keterkaitan antara tingginya pelanggaran dengan kecelakaan fatal yang terjadi.

Penerapan ETLE ini merupakan salah satu penjabaran Program Presisi atau Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan yang digulirkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Polda Sulut merupakan 1 dari 12 Polda yang menerapkan penegakan hukum bidang lalu lintas melalui ETLE.

Kapolda Sulut Irjen Pol. Nana Sudjana mengatakan bahwa tilang elektronik merupakan jawaban atas perkembangan lingkungan saat ini di mana menuntut Polri bertindak lebih humanis dan transparan dalam mewujudkan Kamseltibcar Lantas. Dalam Program Prioritas Kapolri, penegakan hukum yang berkeadilan merupakan program ke-11 dari 16 program prioritas 100 hari Kapolri. Keberadaan ETLE ini akan mengubah sikap perilaku dalam berkendara di jalan yang berkeselamatan.

Program ETLE sangat efektif di masa pandemi karena mengurangi tatap muka dalam rangka menghindari Covid-19. Melalui ETLE tidak ada interaksi langsung atau kontak fisik antara petugas dan pelanggar, sehingga menjadi metode yang paling tepat di era *New Normal* di tengah pandemi Covid-19.

Pelanggaran-pelanggaran yang dapat dideteksi oleh ETLE, yaitu pelanggaran APIL atau *traffic light* (menerobos lampu merah), pelanggaran marka jalan (garis stop), pelanggaran ganjil-genap, tidak mengenakan sabuk keselamatan, menggunakan ponsel saat berkendara, pelanggaran batas kecepatan, pelanggaran melawan arus, pelanggaran tidak menggunakan helm, pelanggaran pembatasan jenis kendaraan tertentu pada kawasan/jalur tertentu, pelanggaran pajak kendaraan serta uji berkala kendaraan.

Pelanggaran akan direkam oleh kamera pemantau, termasuk nomor registrasi kendaraan tersebut. Kemudian, data pelanggaran akan diolah di RTMC Polda Sulut. Selanjutnya, hasil verifikasi tersebut dikirimkan



kepada alamat si pelanggar dalam waktu tiga hari melalui PT Pos. Setelah diterima oleh pelanggar, diberikan waktu tujuh hari pelanggar untuk memverifikasi pelanggarannya dengan cara mengirimkan konfirmasi balik, baik melalui website, email atau datang langsung ke Posko ETLE di RTMC Ditlantas Polda Sulut.

Setelah melakukan konfirmasi pelanggar akan diberikan BRIVA atau BRI virtual terkait pelanggaran yang terjadi serta besarnya denda yang akan dibayarkan. Jika pelanggar tidak menyelesaikan dalam waktu tujuh hari, akan dilakukan pemblokiran kendaraan pada saat pembayaran pajak setiap tahunnya. Namun, pemblokiran akan dibuka apabila pelanggar sudah menyelesaikan denda yang telah dibebankan.

Walupun sudah ada ETLE, tilang secara manual juga tetap dilaksanakan oleh petugas di lapangan. Penilangan manual adalah alternatif terakhir terhadap pelanggar yang berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Keberadaan anggota di lapangan tetap untuk melaksanakan pengawasan dan pengaturan, terutama di titik macet, saat jam-jam macet, dan lokasi yang mengharuskan kehadiran polisi di lapangan.

Tahap awal, kamera ETLE masih terfokus di Kota Manado, dengan lokasi sebagai berikut.

1. Jalan Piere Tendean kompleks Hotel Dragon.
2. Jalan Piere Tendean kompleks Centro Mantos.
3. Jalan Piere Tendean kompleks HSBC.
4. Jalan Piere Tendean kompleks TK Golden.
5. Jalan Sam Ratulangi kompleks BCA.
6. Jalan Sam Ratulangi kompleks Apotik Setia II.
7. Jalan WR Monginsidi kompleks Lapangan Bantik.
8. Jalan Tololiu Supit kompleks BPJS.
9. Jalan Daan Mogot Kompleks BRI Unit Berhikmat.
10. Jalan Santiago Kompleks Pasar Tuminting.

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi salah satu Program Prioritas Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Dalam rangka meningkatkan pelayanan, Satuan Lalu Lintas Polda Sulut juga memiliki inovasi untuk mendukung Polri yang Presisi, yaitu Samsat



Delivery. Layanan pengantaran ini tersebut tidak dipungut biaya alias gratis.

Masyarakat tidak perlu lama menunggu atau datang kembali ke Satlantas untuk mengambil Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), maupun Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Dengan Samsat Delivery, petugas khusus mengantarkan langsung kepada pemohon, baik STNK, BPKB, ataupun TNKB ke alamat tempat tinggal masing-masing.

Inovasi Samsat Delivery dilakukan oleh Satlantas Polres Bitung. Personel Unit Regident Satlantas Polres Bitung mengantar langsung STNK, BPKB, ataupun TNKB kepada masyarakat yang telah melakukan proses pengurusan sebelumnya.

Inovasi Propam Presisi dan Dumas Presisi

Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara berkomitmen meningkatkan kinerja jajarannya. Komitmen itu setelah Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri meluncurkan aplikasi bernama Propam Presisi.

Propam Presisi adalah aplikasi pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Polri dan atau PNS yang bekerja pada kesatuan Polri. Jika ada oknum anggota Polri dan/atau PNS yang melakukan pelanggaran bahkan mengganggu atau merugikan kenyamanan dan keamanan masyarakat, bisa dilaporkan melalui aplikasi Propam Presisi.

Aplikasi tersebut dibuat untuk mendukung Program Prioritas Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo demi terwujudnya Transformasi Menuju Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). Aplikasi Propam Presisi ini sekaligus sebagai sarana sosial kontrol bagi masyarakat, khususnya pengawasan terhadap perilaku anggota Polri maupun PNS, sehingga bisa meminimalisir komplain masyarakat atas kinerja Polri.

Dengan aplikasi Propam Presisi yang dapat diunduh di Playstore maupun diakses melalui website propampresisi.polri.go.id itu, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor kepolisian untuk membuat laporan, cukup melalui ponsel masing-masing.

Caranya, masyarakat atau pelapor terlebih dahulu memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selanjutnya dapat menggunakan



empat fitur layanan, yaitu Membuat Pengaduan, Info Pengaduan, Cek Pengaduan, dan Testimoni.

Setiap laporan yang masuk ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan teknis lainnya dengan oknum polisi atau PNS yang terindikasi melakukan pelanggaran. Kemudian, diteruskan ke bagian di bawah Propam, yakni Paminal, Wabprof atau Provos, tergantung jenis pelanggarannya.

Dari laporan yang ada, akan diteliti lebih mendalam apakah itu masuk pelanggaran disiplin atau kode etik. Jika oknum yang dilaporkan terbukti melakukan pelanggaran, pasti akan menjalani proses persidangan, bisa sidang disiplin atau sidang komisi kode etik profesi Polri, sesuai bentuk pelanggaran yang dilakukan.

Dalam rangka mendukung penerapan aplikasi pelayanan pengaduan masyarakat bernama Dumas Presisi, Polda Sulut juga terus mensosialisasikan metode penggunaan dan mekanisme pelayanan kepada masyarakat. Aplikasi tersebut dapat diunduh pada Playstore ataupun dapat diakses melalui halaman website www.dumaspresisi.polri.go.id.

Aplikasi Dumas (Pengaduan Masyarakat) memudahkan masyarakat untuk melaporkan terkait kinerja Polri, termasuk di Polda Sulut dan jajaran. Jika ada pengaduan terkait pelayanan Polri yang kurang baik masyarakat dapat melaporkannya melalui Dumas Presisi. Pengaduan masyarakat ini merupakan pengaduan secara terpadu oleh beberapa Satuan Kerja (Satker), yaitu Itwasda, Propam, Reskrim, Humas, dan TIK secara *online*.

Masyarakat juga bisa melaporkan secara langsung dengan datang ke kantor polisi terdekat dan akan dibantu oleh petugas untuk menginput laporan pengaduannya pada aplikasi yang sudah tersedia.

Setiap laporan yang masuk dari masyarakat akan tetap dilakukan klarifikasi terlebih dahulu. Selanjutnya masyarakat dapat melihat hasil perkembangan pengaduannya dalam aplikasi tersebut, sehingga tidak perlu datang ke kantor polisi untuk menanyakan perkembangan pengaduannya yang sedang diproses.



dummy

4

INOVASI POLRI DI MASA PANDEMI COVID-19

Pada 2 Maret 2020, dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Kota Depok, Jawa Barat, dinyatakan positif terpapar Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Temuan ini merupakan kasus pertama di Indonesia. Kedua pengidap Covid-19 itu memiliki riwayat berinteraksi dengan warga negara asing yang diketahui lebih dulu terpapar virus tersebut. Temuan kasus Covid-19 pertama di Indonesia itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Kedua WNI tersebut terpapar dari Warga Negara Jepang yang tinggal di Malaysia. Warga Negara Jepang itu sebelumnya melakukan perjalanan ke Indonesia. Sekembalinya ke Malaysia, Warga Negara Jepang mengalami sakit dan dari hasil cek dinyatakan positif Covid-19 positif. Pemerintah Malaysia lalu menghubungi Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan.

Setelah mendapat informasi tersebut, Pemerintah Indonesia langsung melakukan penelusuran perjalanan tempat-tempat yang didatangi Warga Negara Jepang itu selama di Indonesia. Dari penelusuran, akhirnya Dinas Kesehatan Kota Depok menemukan pasien yang merupakan ibu dan anak, tengah mengalami gejala batuk, pilek, sesak, dan demam. Sesuai prosedur, Dinas Kesehatan Kota Depok langsung melakukan pemantauan dan isolasi rumah terhadap kedua

pasien. Kedua pasien selanjutnya diobservasi selama 2-3 hari. Pada tanggal 2 Maret 2020 hasil observasi menunjukkan keduanya positif Covid-19.

Sebelum virus Corona masuk ke Indonesia, Pemerintah Cina pada 31 Desember 2019 melaporkan kasus pneumonia jenis baru yang belakangan diidentifikasi sebagai virus corona jenis baru, kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Cina menyerahkan laporan tersebut beserta catatan infeksi pada 59 orang di Kota Wuhan, Provinsi Hubei. Menurut laporan, infeksi pertama terjadi di kota tersebut pada 12 Desember 2019. Sebanyak 163 orang yang melakukan kontak dengan ke-59 pasien kemudian ditelusuri.

Pada 11 Januari, dua hari setelah WHO memublikasikan prosedur deteksi virus corona baru, kematian pertama dilaporkan di Cina. Empat hari berselang setelah kematian itu, WHO memperingatkan potensi penyebaran virus berdasar bukti penularan antarmanusia. Rumah sakit di seluruh dunia diminta waspada. Dari kasus pertama ini, Covid-19 terus menyebar dengan cepat. Di Indonesia, masyarakat yang terpapar Covid-19 dilaporkan bertambah setiap hari. Dengan kondisi ini, pemerintah mau tidak mau harus mengambil langkah-langkah penanganan untuk menekan penyebaran virus Corona.

Pemerintah Indonesia memang sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait penanganan Covid-19. Sebab risiko dari sisi sosial dan ekonomi cukup riskan. Namun, mau tidak mau, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan membatasi pergerakan manusia untuk mencegah penyebaran virus Corona.

Pemerintah Indonesia resmi menghentikan penerbangan langsung ke dan dari Cina mulai Rabu 5 Februari 2020 tepat pukul 00.00 WIB. Keputusan itu diambil setelah para menteri melakukan rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Budi Karya mengabaikan kritis dari Cina.

Selain menghentikan sementara penerbangan langsung, Pemerintah Indonesia juga melarang sementara pemberian bebas visa kunjungan dan visa *on arrival* untuk Warga Negara Cina. Kebijakan itu juga berlaku untuk angkutan laut. Pemerintah menunda pelayaran dari dan ke Cina.

Dalam perkembangannya, kebijakan menghentikan penerbangan langsung ke dan dari Cina, ternyata tidak berhasil menghentikan



penyebaran Covid-19. Di tengah kekhawatiran penyebaran virus Corona, muncul gagasan untuk memberlakukan *lockdown* (penutupan suatu kota) di Indonesia, sebagaimana diterapkan di Wuhan, Italia, dan Manila. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI merupakan daerah pertama yang menginginkan *lockdown*, mengingat episentrum penyebaran Covid-19 berada di Ibu Kota.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara resmi mengajukan permohonan *lockdown* kepada Presiden Joko Widodo (Jokowo) melalui surat bernomor 143 tertanggal 28 Maret 2020. Surat itu disampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM. Akan tetapi, keinginan Pemprov DKI Jakarta tidak berjalan mulus. Presiden Jokowi menolak permintaan karantina wilayah atau *lockdown* dari Gubernur DKI Jakarta. Presiden Jokowi lebih menginginkan pemerintah daerah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan darurat sipil.

Jokowi tidak setuju kebijakan *lockdown* karena tak ingin Indonesia mengalami gejolak sosial sebagaimana dialami India dan Italia. Presiden Jokowi pada 31 Maret 2020 menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Presiden Jokowi selanjutnya meminta Menteri Kesehatan RI untuk segera membuat peraturan menteri yang mengatur pelaksanaan PSBB.

Pada 3 April 2020, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang PSBB. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 mengatur tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Terbitnya Permenkes tersebut langsung direspons Pemprov DKI Jakarta dengan memberlakukan PSBB pada 10 April 2020. DKI Jakarta merupakan pemerintah daerah pertama di Indonesia yang menerapkan PSBB. Setelah Jakarta, sejumlah daerah juga memberlakukan PSBB untuk mencegah penyebaran Covid-19 di wilayahnya.

Pemberlakuan PSBB ini tentu saja membutuhkan dukungan aparat negara dalam pelaksanaannya. Bak gayung bersambut, Mabes Polri menyatakan kesiapannya membantu pemerintah daerah dalam penerapan PSBB guna mencegah pandemi Covid-19.



Berbagai persiapan sudah dilakukan Polri untuk mendukung kebijakan PSBB. Polri telah lebih dulu menggelar operasi kontinjensi Aman Nusa II 2020 untuk menangani virus Covid-19 di Tanah Air. Operasi ini diberlakukan selama 30 hari sejak 19 Maret hingga 17 April 2020.

Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan PSBB, Polri mengeluarkan dua Surat Telegram Kapolri, masing-masing bernomor ST/1182/IV/OPS.2/2020 dan ST/1183/IV/OPS.2/2020. Kedua Surat Telegram tersebut ditandatangani oleh Kabaharkam Polri, Komjen Pol. Drs. Agus Andrianto S.H., M.H., selaku Kepala Operasi Terpusat (Kaopsus) Aman Nusa II-Penanganan COVID-19, tertanggal 13 April 2020. (Republika.co.id, 14 April 2020: Dukung PSBB, Kapolri Keluarkan 2 Surat Telegram).

Surat Telegram pertama berisi tentang aspek keamanan yang harus terpenuhi sebelum PSBB diberlakukan. Setiap Kasatgas, Kasubsatgas, Kaopsda (tingkat Polda) dan Kaopsres (tingkat Polres) Aman Nusa II 2020 di wilayah diminta memberikan saran dan masukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota terkait aspek keamanan dalam mengajukan permohonan PSBB ini.

Adapun aspek keamanan yang harus terpenuhi itu adalah ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat; sarana dan prasarana kesehatan; data masyarakat terdampak yang akan menerima bantuan sosial di daerah yang mengajukan PSBB; dan pendistribusian bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Selain memberikan saran, setiap Kasatgas, Kasubsatgas, Kaopsda, dan Kaopsres Aman Nusa II 2020 juga harus melakukan pengecekan langsung dan memastikan kesiapan daerah yang mengajukan PSBB terkait empat poin tersebut. Kemudian, Surat Telegram kedua berisi tentang langkah-langkah antisipatif mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama PSBB diberlakukan.

Kamtibmas adalah hal yang sangat penting karena memengaruhi semua aspek kehidupan. Terdapat delapan langkah yang harus dilaksanakan jajaran kepolisian dalam rangka antisipasi gangguan Kamtibmas selama PSBB, yaitu:



1. menerapkan Maklumat Kapolri dan menerapkan semua aturan serta kebijakan pemerintah secara humanis dengan tidak arogan;
2. mengamankan tempat penyimpanan/gudang dan mengawal pelaksanaan distribusi bahan pokok serta memastikan tidak ada pemblokiran jalan oleh pihak tertentu yang dapat menimbulkan terhambatnya distribusi bahan pokok dan kebutuhan masyarakat;
3. menyiapkan personel yang telah terlatih dan dibekali pengetahuan untuk membantu pemulangan jenazah dari rumah sakit dengan mengedepankan protokol kesehatan serta melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pemakaman pasien COVID-19 agar tidak ada lagi penolakan dari warga;
4. berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan pemakaman milik negara atau pemerintah guna menjamin dan mengantisipasi pemakaman pasien COVID-19 yang ditolak warga;
5. meningkatkan ketegasan dan kedisiplinan terhadap masyarakat yang dinyatakan positif COVID-19, ODP, dan PDP, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri, dengan mematuhi protokol kesehatan, sehingga tidak menimbulkan masalah di lingkungan mengingat masih masifnya penyebaran COVID-19;
6. melakukan antisipasi dan penindakan terhadap penyebar berita bohong (hoaks), penghasutan, provokatif untuk melakukan kerusuhan baik secara langsung maupun menggunakan media sosial;
7. menyiapkan Pasukan Huru-Hara (PHH) serta sarana dan prasarana guna mengantisipasi unjuk rasa, kerusuhan, konflik sosial, atau terjadi eskalasi terburuk di wilayah masing-masing;
8. membentuk Satgas tanggap darurat untuk melakukan program keselamatan guna membantu masyarakat yang terdampak atau tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak tercover oleh program kementerian atau lembaga.

Polri juga menerbitkan Surat Telegram yang dikeluarkan sebagai antisipasi jika situasi memanas, seperti unjuk rasa, kerusuhan, dan konflik sosial lainnya yang melibatkan massa dalam jumlah banyak. Dalam Surat Telegram yang bernomor ST/1184/IV/OPS.2/2020 itu,



Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri memerintahkan kepada para Kasatgas, Kasubsatgas, Kaopsda, dan Kaopsres Aman Nusa II 2020 untuk menyusun dan membuat SOP/panduan/cara bertindak (CB) bagi pasukan Dalmas dan PHH (Brimob dan Sabhara) untuk menangani massa dengan memperhatikan aspek keselamatan anggota dari penularan Covid-19.

Kabaharkam Polri, Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 di Indonesia, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan, di mana Polri ikut menjadi bagian. Jika berbicara tentang peran Polri, hal tersebut tidak akan terlepas dari fungsi, tujuan, peran, dan tugas pokok Polri sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi, tujuan, peran, dan tupok tersebutlah yang menjadi panduan atau acuan Polri untuk bertindak dan berperan di masa pandemi ini. Jangan pernah lupakan hal ini.

Selain menggelar Operasi Terpusat Kontinjensi Aman Nusa II-Penanganan Covid-19, Polri juga melakukan berbagai upaya dalam rangka membantu masyarakat menghadapi pandemi. Di antaranya adalah Kampung Tangguh Nusantara dan kegiatan program ketahanan pangan.

Tujuan Kampung Tangguh adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat dan membangun semangat bersama agar lebih waspada terhadap penyebaran Covid-19.

Pandemi Covid-19 berdampak pada masyarakat tidak hanya di bidang kesehatan, melainkan juga di bidang ekonomi, keagamaan, sosial dan budaya, serta politik. Semua itu jika tidak bisa dikelola dengan baik, maka akan berpotensi mengganggu situasi Kamtibmas. Di situlah peran Polri dibutuhkan agar potensi gangguan Kamtibmas tidak berkembang menjadi gangguan nyata. Seluruh anggota Polri harus bekerja ekstra keras dengan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif.

Polri juga melakukan berbagai kegiatan dalam rangka membantu masyarakat terdampak mulai dari memberikan bantuan sosial berupa sembako, vitamin, masker, sampai dengan membangun dapur umum. Bahkan Kapolri memerintahkan agar tiap Polda menyiapkan beras sebanyak 25 ton dan untuk tiap Polres sebanyak 10 ton serta melakukan



penyisiran secara langsung oleh Bhabinkamtibmas bersama Babinsa terhadap masyarakat terdampak yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah.

Tentu upaya pemerintah dalam mencegah Covid-19 tidak akan efektif tanpa peran aktif masyarakat. Oleh karena itu, Kabaharkam minta masyarakat agar selalu disiplin dan tegas dalam menjaga jarak atau menerapkan *physical distancing*. “Biarlah kami yang bekerja, masyarakat diam di rumah dan keluar jika kondisi mendesak dengan tetap mematuhi anjuran pemerintah dalam menjaga jarak,” kata Agus Kamis 2 April 2020.

Dalam berbagai kesempatan, Kabaharkam juga tidak henti-hentinya meminya elemen masyarakat turut mencegah penyebaran Covid-19. Seperti saat Komjen Pol. Agus Andrianto menerima audiensi DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sumatera Utara di Ruang Kerja Kabaharkam Polri, Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat 23 Oktober 2020.

DPD APDESI Sumut diwakili oleh Suparman (Ketua DPD), Hajeman (Kades Bandar Labuhan), Alfian (Kades Dagang Kelambir), Sugianto (Kades Dalu XA Deli Serdang), Sudarman (Kades Pulau Johor), dan Syamsul Bahri (Kades Sei Limbat, Langkat), serta didampingi oleh Ipin Arifin (Sekjen DPP Apdesi Pusat) dan Ipong Surya (Wasekjen DPP Pusat).

APDESI adalah organisasi profesi berbentuk kesatuan dengan ruang lingkup nasional, berdaulat, dan mandiri, atas dasar kesamaan kegiatan, profesi di bidang pemerintah desa, serta pembangunan pedesaan. APDESI beranggotakan kepala desa dan perangkat desa baik yang aktif maupun yang purna bakti dan ingin memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan pemerintah dan masyarakat desa. APDESI didirikan pada tanggal 17 Mei 2005 di Jakarta.

Sebagai organisasi yang anggotanya adalah sejumlah kepala desa, APDESI dapat mengambil peran mendorong anggotanya untuk melahirkan inovasi demi pembangunan masyarakat desa, terutama dalam membantu masyarakat menghadapi dampak pandemi COVID-19.

“Dampak COVID-19 bukan hanya kesehatan, tapi perekonomian dan dampak-dampak lain bahkan sampai ke sosial politik. Arahan Presiden agar gas dan remnya diatur karena kita tidak bisa



memfokuskan kesehatan dan mengabaikan masalah perekonomian,” kata Komjen Pol. Agus Andrianto.

Komjen Pol. Agus Andrianto juga menekankan bahwa aparat desa adalah tokoh lapis paling bawah di masyarakat yang menjadi garda terdepan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Aparat desa dapat menjadi pendorong agar semua elemen masyarakat kompak dan bersatu untuk menghasilkan kekuatan yang sangat luar biasa.

Di sektor ekonomi, banyak potensi desa yang bisa dijadikan sebagai objek wisata. Salah satunya adalah objek wisata sawah. “Silakan aparat desa buat inovasi, yang prinsipnya, semua inovasi tentang desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Menurut Komjen Pol. Agus Andrianto, banyak kepala desa yang sudah melakukan inovasi untuk pengembangan desanya melalui dana desa yang diterima dari pusat untuk dikelola sedemikain rupa demi kepentingan masyarakat. Ia menyarankan, hal itu dapat ditingkatkan dengan merangkul pelaku usaha.

“Saya harapkan kepada perwakilan APDESI yang hadir, silakan rangkul pelaku usaha untuk membangun desa dengan dana sosial perusahaannya (CSR) sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan untuk membantu kegiatan sosial di masyarakat yang kesemuanya itu diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan,” jelasnya.

Di daerah, beragam inovasi dilakukan jajaran Polri dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia. Inovasi Polri di antaranya dengan membentuk sejumlah Kampung Sehat atau Kampung Tangguh. Masyarakat dilibatkan dalam pembentukan deretan Kampung Sehat atau kampung tangguh itu. Masyarakat yang menjadi ujung tombak dalam inovasi Polri.

Sederetan inovasi yang telah dilakukan antara lain program Kampung Tangguh Semeru yang diinisiasi oleh Polda Jawa Timur. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan penyebaran virus corona tertinggi di Indonesia. Kampung ini dibentuk saat pelaksanaan PSBB di Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik) dan Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu).

Selanjutnya, Polda Jawa Tengah menggalakkan program Kampung Siaga untuk mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah itu. Program

Kampung Siaga Covid-19 ini memberdayakan peran RT, RW, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.

Kemudian, Kampung Tangguh Banua milik Polda Kalimantan Selatan. Program ini menyoar 67 kampung atau desa tersebar di 13 kabupaten. Polda Kalimantan Tengah juga memiliki kampung cegah Covid-19 bernama Desa Pantang Mundur (Lewu Isen Mulang). Pendirian Desa Pantang Mundur ini dilakukan lantaran penyebaran pandemi sangat berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, serta budaya.

Hal yang sama juga dilakukan Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). Polda NTB menginisiasi program Kampung Sehat. Sebanyak 1.136 desa atau kampung dilibatkan dalam program ini. Inovasi Polri selanjutnya ditunjukkan polda Papua melalui Taman Pintar di Kampung Yoboi Distrik Sentani Kabupaten Jayapura.

Deretan kampung cegah Covid-19 juga dibentuk jajaran Polres. Salah satunya Kampung Kubang Gajah di Payakumbuh, Sumatera Barat. Kampung ini menjadi percontohan kampung tangguh oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Lalu, Polres Bengkulu Utara berinovasi melalui Kampung Berseri (Bersih, Sehat, dan Mandiri) di Desa Sumber Agung, Kecamatan Arma Jaya. Di wilayah Kota Tangerang Selatan, pembuatan kampung tangguh diberi dengan nama Kampung Tangguh Jawara.

Selain pembentukan Kampung Sehat dan kampung tangguh, sejumlah jajaran Polres juga telah melakukan beragam inovasi sehingga mendapat apresiasi dari masyarakat. Seperti Polres Majalengka, melakukan inovasil mulai dari penanganan pandemi, ketahanan pangan, program Elektronik Polres Majalengka Raharja (E-PMR), dan program Polisi Cinta Tahanan.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Polri Irjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, inovasi atau program pencegahan Covid-19 merupakan tindak lanjut dari Surat Telegram Kapolri yang memerintahkan setiap Polda melakukan penanganan terhadap Covid-19 di bidang kesehatan, keamanan, dan sosial ekonomi. Dalam surat telegramnya, Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis meminta yang dikedepankan adalah pendekatan lunak yang menjadi stimulan warga untuk menaati protokol pencegahan Covid-19.



Inovasi Korlantas Polri di Tengah Pandemi

Pembangunan birokrasi merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang harus menjadi perhatian semua. Hal ini merupakan tugas yang sangat besar bagi petugas pelayanan publik di tengah perkembangan digitalisasi dari era Revolusi Industri 4.0 yang juga banyak membawa perubahan di semua aspek kehidupan. Terlebih di situasi pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang sampai saat ini belum berakhir, mengharuskan adanya perubahan pada pelayanan publik.

Di tengah pandemi Covid-19, tentu pelayanan utama kepolisian kepada publik, seperti pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), layanan SIM, dan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), tidak boleh dikesampingkan. Pelayanan khususnya dalam pengurusan SIM dan SKCK masih diperlukan oleh masyarakat luas.

Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa proses pelaksanaan pelayanan tersebut bisa mengundang banyak orang sehingga berpotensi menjadi klaster penyebaran Covid-19. Di tengah pandemi, di satu akses pelayanan publik memang harus menjaga kualitas layanan yang prima. Namun, di sisi lain, juga tetap harus memperhatikan aspek keselamatan penyedia dan pengguna layanan melalui penerapan jaga jarak dan pembatasan sosial dalam berkegiatan untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19

Kementerian PANRB pada April 2020 telah melakukan pendataan melalui survei *online* terkait kondisi pelayanan SIM, SKCK, dan SPKT di masa pandemi Covid-19. Dari survei itu diketahui layanan SIM di beberapa Polres masih ada yang melakukan layanan tatap muka. Akan tetapi, sebagian Polres sudah melakukan layanan SIM Online, pembatasan layanan, hingga penutupan sementara layanan SIM. Demikian juga dengan layanan SKCK. Sementara itu, untuk layanan SPKT, hampir semua masih menyediakan layanan secara langsung atau tatap muka.

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, pada Jumat 17 April 2020, menyebutkan, Korps Tribrata harus tetap berusaha memberi layanan optimal meski dalam kondisi pandemi. Akan tetapi, tentu dengan batasan dan protap keamanan serta



protokol kesehatan yang ketat. Hal ini mengingat status kasus Corona Virus masih terus meningkat.

Pada hari itu, dalam video conference yang diikuti Kepala Biro Reformasi Birokrasi Polri, Brigjen Angesta Romano Yoyol, beberapa polres melaporkan langkah-langkah yang telah dilakukan terkait pelayanan sekaligus menekan persebaran Covid-19. Secara umum, hampir seluruh Polres telah melakukan protokol kesehatan dan keamanan dengan baik.

Setiap Polres yang memaparkan kinerjanya, menyatakan bahwa masyarakat dan anggota kepolisian yang masuk kantor Polres harus melewati bilik antiseptik serta pemeriksaan suhu tubuh. Setiap Markas Komando Polres juga menyediakan beberapa keran air lengkap dengan sabun cuci tangan, serta *hand sanitizer*. Masyarakat dan petugas kepolisian juga wajib memakai masker. Jika ada masyarakat yang tidak membawa masker, akan diberikan secara gratis.

Sesuai aturan mengenai *physical distancing*, ruang tunggu pelayanan pun dibatasi. Beberapa kursi diberi tanda dilarang duduk, tanda batas aman antrean, serta petugas kepolisian yang menggunakan masker, sarung tangan, hingga *face shield*. Bahkan, beberapa Polres juga melaksanakan kegiatan berjemur setiap jam 09.00 pagi waktu setempat. Secara berkala, setiap sudut kantor Polres juga disemprot dengan cairan disinfektan.

Selain layanan utama kepolisian yang dilakukan secara *online* dan tatap muka, ada juga Polres yang melakukan inovasi dalam bentuk lain. Polres Sidoarjo, Jawa Timur, misalnya, membentuk unit relawan yang ditugaskan di setiap desa. Tujuannya adalah untuk memperketat keamanan dan penanganan desa tersebut jika ada korban. Petugas yang tergabung dalam unit itu juga harus cepat tanggap ketika ada masyarakat yang butuh bantuan atau layanan mendesak. Ada 349 desa di Kabupaten Sidoarjo, dan setiap anggota Polres Sidoarjo yang menjadi relawan, dibekali dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai sesuai kebutuhan.

Brigjen Angesta Romano Yoyol menyampaikan bahwa jajaran Polri selalu mendukung upaya pemerintah untuk penanganan Covid-19. Ia juga mengingatkan kepada seluruh kepala satuan kewilayahan Polri agar memperhatikan protokol kesehatan bagi anggotanya dan masyarakat.



Dalam perjalanannya, di tengah pandemi Covid-19 yang ternyata tak juga kunjung mereda, Mabes Polri kembali melakukan sejumlah inovasi untuk memudahkan masyarakat. Salah satunya inovasi yang dilakukan Korlantas Polri. Melalui Direktorat Registrasi Identifikasi, Korlantas Polri menghadirkan Pelayanan SIM Internasional Online. Dengan inovasi ini, pemohon SIM tidak perlu hadir langsung ke satpas-satpas. Registrasi dan pembayaran dilakukan secara elektronik. Pengantaran buku SIM Internasional juga menggunakan jasa pengiriman.

Inovasi lainnya adalah Smart SIM, yakni kartu SIM yang dapat digunakan sebagai e-money. Kemudian, ada inovasi Sistem Antrianfifo, yakni perangkat komputerisasi dan sistem uji praktik SIM A dan C secara elektronik. Lalu, inovasi Pusat Pengaduan Pelayanan SIM atau Call Center, dan Satpas Monitoring Center (SMC).

Inovasi yang tidak kalah menarik, yakni terkait dengan perpanjangan SIM Nasional yang memungkinkan pemohon tanpa harus hadir di Satpas. Inovasi lainnya yang dibuat Subdit STNK seperti inovasi Samsat Online Nasional, Electronic Registration dan Identification (ERI), STNK berupa kartu, Blokir LAPCR, SICK Online, Nomor Pilihan Nasional, dan Ropilnas. Inovasi lainnya yang dibuat oleh Subdit BPKPB, seperti Electronic Registration dan Identification dan arsip digital. Kemudian, SBST Online yang dibuat Subdit Fasmats SBST Korlantas Polri.

Kapolri Jenderal Pol. Idham Aziz pastinya bangga dengan inovasi yang dilakukan jajarannya ini. Saat membuka Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional Tahun 2020 melalui video virtual di Jakarta, Kamis, 26 November 2020, Idham Aziz secara khusus menyampaikan apresiasi atas kinerja Kakorlantas Polri Irjen Istiono dan Dir Regident Korlantas Polri Brigjen Yusuf yang memiliki inovasi bagus dalam membangun pelayanan publik berbasis IT.

Kapolri juga memberikan apresiasi kepada tim pembina Samsat atas program-program yang mendekatkan kepada masyarakat. Kapolri melihat trennya benar-benar menunjukkan arah yang sangat bagus. Selama ini, Korlantas Polri sudah melakukan langkah-langkah perubahan digitalisasi dengan adanya teknologi informasi untuk keselamatan berlalu lintas (*IT for Road Safety*).

Inovasi Korlantas Mabes Polri mendapat apresiasi dari Menpan RB Tjahjo Kumolo. Tjahjo menilai inovasi yang dibuat oleh Korlantas Polri



kian memudahkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan pun lebih efektif dan efisien.

Inovasi pembuatan SIM Internasional ini juga disambut baik oleh pakar dan akademisi. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Nurhasan Ismail, mengatakan untuk mencermati kebutuhan publik termasuk tanda-tanda zaman yang selalu berubah terutama di era beradaptasi pada kebiasaan baru, Sumber Daya Manusia (SDM) di Korlantas dituntut secara berkelanjutan merespons hal tersebut.

Dalam konteks ini, inisiasi mengembangkan program inovatif baik di bidang pelayanan publik Regident Ranmor dan SIM maupun Penegakan Hukum pelanggaran lalu lintas merupakan keniscayaan. Korlantas sebagai sentra pengembangan kebijakan di dalamnya selalu tersedia SDM yang mampu mengembangkan program inovatif.

Pakar sekaligus penyusun Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) ini menegaskan bahwa di era Pandemi Covid-19 termasuk memasuki era adaptasi terhadap kebiasaan baru, Korlantas beserta jajarannya terlihat kreatif dan inovatif sehingga pelayanan publik yang konvensional diganti dengan sistem elektronik dan tanpa tatap muka.

Oleh karenanya, program permohonan dan penerbitan SIM Internasional yang diproses secara elektronik dan penyampaian kepada pemohon via jasa pengiriman merupakan wujud dari adaptasi kebiasaan baru di samping pelayanan publik yang prima.

Akademisi bidang Psikologi Lalu Lintas Universitas Indonesia (UI), Guritnaningsih P. Santoso, juga mengapresiasi Korlantas Polri atas inovasinya yang memudahkan masyarakat dalam mengurus SIM Internasional, namun harus dengan mekanisme dan kontrol yang ketat.

Inovasi ini memudahkan masyarakat, yang penting harus ada mekanisme kontrol yang ketat bahwa pemohon memang sudah memiliki SIM dan masih berlaku. Selain itu, masa berlaku SIM Internasional tidak melebihi masa berlaku SIM Indonesia (nasional).

Guru Besar Hukum Tata Negara Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan suatu terobosan yang bagus dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. *Pertama*, untuk



mempermudah masyarakat dalam mengurus SIM Internasional. *Kedua* adalah menyangkut persoalan efisiensi, tenaga, waktu, dan birokrasi.

Dia menyampaikan bahwa terobosan yang dilakukan Korlantas Polri dalam pengurusan SIM Internasional perlu disambut baik oleh masyarakat, apalagi pada saat pandemi Covid-19. Pada saat pandemi Covid-19 ini masyarakat tidak semua bisa bebas bergerak seperti saat kondisi normal.

Dalam beberapa tahun terakhir, Polri telah secara optimal memanfaatkan Teknologi Informatika (TI) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Seiring perkembangan TI dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Polri melakukan modernisasi TI yang dijalankan secara sistematis dan berkesinambungan. Termasuk TI di lingkungan Korlantas Polri. Modernisasi TI di Korlantas Polri dilakukan untuk meningkatkan kecepatan, keakuratan, keefektifan, dan transparansi pelaksanaan tugas-tugas Korlantas Polri, sehingga daya dukung Kepolisian/Korlantas Polri kepada negara, pemerintah, dan masyarakat, makin meningkat.

Selain itu, dengan dilakukannya modernisasi TI, diharapkan *trust* atau kepercayaan masyarakat dan para pemangku kepentingan kepada Korlantas Polri dalam memberikan layanan dan menjalankan tugas-tugasnya, dapat terjaga dan terus membaik.

Oleh karenanya, semua pihak harus dapat mendukung modernisasi TI di Korlantas Polri secara efektif dan transparan, mengingat teknologi TI/digital berkembang dan berubah sangat cepat. Tentu modernisasi TI Korlantas juga diharapkan bisa terintegrasi dan mendukung Smart City dan percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Smart Management

Korlantas Polri mengembangkan *Smart Management* agar seluruh rangkaian aplikasi dapat dikonsolidasikan dan diintegrasikan secara efektif dan efisien. Sistem *inputting data* yang menjadi variabel kunci dari IT Road Safety mulai satuan kerja Polres, Polda, terintegrasi dengan sistem yang terpusat dari berbagai metode *inputting* dan jenis data (baik manual maupun otomatis).

Smart Management di Korlantas merupakan sistem-sistem elektronik atau sistem *online* yang saling terhubung, berbasis kepada *Back Office*

Application, yang juga memanfaatkan *Artificial Intelligent (AI)*, *Internet of Things (IoT)* dan *IT Network*. Di sini semuanya saling bersinergi. Pemanfaatan TI dengan *Smart Management* dapat memberikan banyak manfaat. TI merupakan suatu keniscayaan dan keharusan, untuk membangun dan mencapai tujuan dari *road safety* agar lalu lintas aman, selamat, tertib, lancar. Melalui hal tersebut, Korlantas dapat meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, terbangun budaya tertib.

Selain itu, Korlantas dapat memberikan pelayanan yang prima, yang dapat diakses dengan cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, mudah diakses, dengan algoritma yang menghasilkan infografis, statistik dan virtual sehingga dapat melakukan prediksi,antisipasi, dan solusi yang *on time, real time, dan anytime*. Selain *Smart Managemet*, Korlantas Polri telah menghadirkan “RasiRosa Korlantas” (*Literasi Road Safety*) yang bisa diakses masyarakat umum di rasirosakorlantas.id sejak 22 September 2020 bertepatan dengan Hari Lalu Lintas ke-65.

Rasirosakorlantas.id adalah portal Korlantas Polri yang berisi berbagai informasi yang dapat dipelajari dan digunakan baik oleh anggota Polri maupun masyarakat untuk memahami berbagai hal yang berhubungan dengan lalu lintas pada umumnya dan keselamatan berkendara pada khususnya, juga dikenal sebagai *Literasi Road Safety*. Melalui rasirosakorlantas.id, Korlantas Polri melakukan pendekatan baru terhadap berbagai persoalan dalam masyarakat saat ini. Pendekatan melalui seni budaya diutamakan untuk mencapai tujuan utama, yaitu melayani kebutuhan kemanusiaan karena sesungguhnya lalu lintas adalah urat nadi kehidupan, dan merupakan infrastruktur untuk memanusiakan manusia.

Berbagai hal pokok yang disampaikan dalam rasirosakorlantas.id di antaranya: Dokumen, Referensi, Dialog, Inspirasi, Prediksi, Kajian, Apresiasi. Di dalamnya terdapat berbagai subkonten yang dapat digolongkan menjadi berbagai kanal seperti: Program-program Unggulan, Strategi, Implementasi, Hukum dan Penegakan Hukum, Operasi Kepolisian, SOP, Vademikim, dan *Art Policing*.

RasiRosa juga berisi *monitoring* informasi lalu lintas di sosial media, website, informasi tentang Black Spot (identifikasi Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas), Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), hasil diskusi dan kajian Forum Group Discussion (FGD) dan



publikasi terbaru perbagai peraturan lalu lintas. Dengan peluncuran rasirosakorlantas.id Korlantas makin dapat melayani masyarakat sesuai dengan nilai-nilai TRIBRATA.

Semangat melakukan inovasi TI untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat juga dijalankan jajaran Korlantas Polri di daerah. Banyak Polda dan Polres/Polresta telah menghadirkan berbagai aplikasi yang terkait IT Road Safety. Untuk sosialisasi dan edukasi masyarakat dan para pemangku kepentingan akan pentingnya membangun budaya tertib berlalu lintas, Korlantas Polri menyelenggarakan kegiatan IT Road Safety Expo 2020 pada 24–26 November 2020 di Aula Djajoesman, Korlantas Polri, Jakarta. Acara ini disemarakkan dengan berbagai kegiatan, seperti Pameran Virtual dan Seminar IT secara daring, yang terkait dengan penggunaan TI untuk road safety (keamanan, keselamatan, dan kenyamanan berkendara/berlalu lintas).

Selain diikuti secara virtual/daring oleh seluruh jajaran Korlantas hingga di daerah, kegiatan IT Road Safety Expo ini dapat diikuti oleh masyarakat umum, komunitas otomotif, komunitas TI/digital, produsen kendaraan, dan peralatan keamanan berkendara atau semua pihak yang terkait dengan program Road Safety di Indonesia.

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Regident) Korlantas Polri Brigjen Pol. Yusuf mengatakan, inovasi pelayanan publik yang dilakukan jajarannya di tengah pandemi Covid-19 mendapat sambutan positif masyarakat.

Sebagai sebuah siklus, inovasi pelayanan publik harus mampu beradaptasi dengan hambatan, tantangan dan gangguan yang dihadapi dalam masa tertentu. Di tengah pandemi, akses pelayanan publik harus menjaga kualitas layanan yang prima. Namun, di sisi lain juga tetap harus memperhatikan aspek keselamatan penyedia dan pengguna layanan melalui penerapan jaga jarak dan pembatasan sosial dalam berkegiatan untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19.

Masyarakat puas dan merasakan betul adanya perubahan sangat signifikan dalam pelayanan. Pelayanan cepat dan mudah secara *online* yang diterapkan di masa adaptasi kebiasaan baru atau *new normal* ini mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan termasuk pakar dan akademisi.



Masyarakat mengapresiasi dan memberikan dukungan, karena di masa normal baru ini membuka layanan secara *online* atau daring. Jajaran direktorat di seluruh Indonesia dapat memanfaatkan momentum *new normal* dengan membuka layanan secara *online* sehingga masyarakat cukup di rumah saja tanpa harus mengantre panjang di tempat pelayanan seperti Satpas.

Dengan penerapan layanan secara daring, masyarakat tidak perlu keluar rumah sehingga dapat mencegah penyebaran Covid-19.

Penghargaan Korlantas untuk Polres-Polres

Untuk memacu semangat jajaran Polri melakukan inovasi dan terobosan, Korlantas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) setiap tahun memberikan penghargaan, baik kepada satuan kerja (Polda/Polres) maupun personel Polri. Tahun 2021, Korlantas Polri Bersama Kemenpan RB memberikan penghargaan predikat pelayanan prima kepada 12 Polres di Indonesia (“Kemenpan-RB Beri Penghargaan Predikat Pelayanan Prima Tahun 2020 ke-12 Polres”, diakses dari <https://humas.polri.go.id/2021/02/17/327506/pada>)

Korlantas dan Kemenpan-RB melakukan evaluasi setiap tahunnya. Pada 2020, kementerian itu menilai setidaknya 209 unit layanan yang ada di Polres, Polresta, Polrestabes, dan Polres Metro. Adapun aspek yang menjadi penilaian predikat pelayanan prima itu adalah, kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan inovasi pelayanan publik.

Adapun 12 Polres, Polresta dan Polrestabes yang meraih predikat pelayanan prima, yakni:

1. Polresta Pekanbaru;
2. Polrestabes Palembang;
3. Polrestabes Bandung;
4. Polresta Cirebon;
5. Polres Malang;
6. Polrestabes Surabaya;
7. Polresta Sidoarjo;

**Pertanyaan
untuk
Penulis
pada kapan
ya pak?**



8. Polres Gresik;
9. Polres Malang Kota;
10. Polres Banyuwangi;
11. Polres Kulonprogo;
12. Polres Sleman.

Sementara itu, 40 Polres, Polresta dan Polrestabes yang mendapat kategori sangat baik, yakni:

1. Polrestabes Semarang;
2. Polresta Banda Aceh;
3. Polresta Bandung;
4. Polresta Banjarmasin;
5. Polresta Bareleng;
6. Polresta Padang;
7. Polresta Pontianak kota;
8. Polresta Yogyakarta;
9. Polres Banjar;
10. Polres Banjarbaru;
11. Polres Banjarnegara;
12. Polres Cilacap;
13. Polres Gowa;
14. Polres Gunung Kidul;
15. Polres Hulu Sungai Selatan;
16. Polres Jepara;
17. Polres Karawang;
18. Polres Kendal;
19. Polres Kendari;
20. Polres Ketapang;
21. Polres Kota Baru;
22. Polres Lamongan;
23. Polres Madiun;
24. Polres Magelang;



25. Polres Magelang Kota;
26. Polres Mojokerto Kota;
27. Polres Musi Banyuasin;
28. Polres Ogan Komering Ulu;
29. Polres Pasuruan;
30. Polres Pasuruan Kota;
31. Polres Payakumbuh;
32. Polres Sambas;
33. Polres Singkawang;
34. Polres Solok Kota;
35. Polres Subang;
36. Polres Sukabumi Kota;
37. Polres Tanah Laut;
38. Polres Tapin;
39. Polres Tuban;
40. Polres Tulungagung.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Kemenpan-RB yang telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja pelayanan publik khususnya di internal Kepolisian. Polri berusaha terus tingkatkan pelayanan publik prima dengan memanfaatkan teknologi informasi dan kemajuan digital, sehingga pelayanan publik betul-betul pelayanan apa yang diharapkan masyarakat khususnya memangkas birokrasi.

Kapolri menegaskan bahwa Polri akan selalu memberikan penghargaan pada jajarannya yang terus melakukan inovasi, terkhusus untuk pelayanan publik. “Saya selalu menghargai inovasi dan kreativitas dari anggota-anggota terus memberikan pelayanan yang terbaik terhadap publik.”

Oleh sebab itu, Kapolri memberikan penghargaan khusus kepada 12 Kapolres berupa kesempatan berkarier di tempat terbaik. Selain itu, Kapolri juga memerintahkan para Kapolda untuk memberikan penghargaan pada level Kasat di 12 Polres yang meraih penghargaan. Penghargaan dari Korlantas pada tahun 2020 pernah diterima Dirlantas



Polda Aceh, Kombes Pol. Dicky Sondani. Ditlantas Polda Aceh menerima penghargaan dari Korlantas Polri atas Inovasi Keselamatan berlalulintas dan Pelayanan Publik berbasis IT dalam Kegiatan IT Road Safety Expo 2020 di Jakarta.

Ditlantas Polda Aceh menampilkan Video Aplikasi KUPI ACEH yang menunjukkan kecepatan personel Ditlantas Polda Aceh dan jajaran Polres dalam menangani kecelakaan lalu lintas, sehingga masyarakat yang menjadi korban laka lantasi cepat ditolong oleh petugas. Acara penyerahan penghargaan itu bertempat di Hotel Teras Kita Jakarta, Senin, 7 Desember 2020.

Penghargaan diberikan setelah diadakan lomba pada bulan Oktober 2020 yang diikuti oleh 34 Polda se-Indonesia. Dari hasil seleksi terpilih Polda Metro Jaya, Polda Aceh, Polda Kalteng, Polda Bali, dan Polda Babel yang mendapatkan penghargaan terbaik. Penghargaan 5 Polda terbaik langsung diserahkan oleh Kakorlantas Polri dan juga membuka acara Rakor Dikmas Lantas se-Indonesia yang diikuti oleh seluruh Polda.

Kampung Tangguh Nusantara

Program Kampung Tangguh telah diadopsi secara nasional oleh Polri dengan nama Kampung Tangguh Nusantara. Pada Kamis 9 Juli 2020, Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis Bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meresmikan Program Kampung Tangguh Nusantara 2020. Peresmian berlangsung di objek wisata Aquaculture Mangrove, Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Program ini untuk mendukung ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah.

Program Kampung Tangguh Nusantara merupakan pengembangan Kampung Tangguh Semeru yang dilaksanakan di Polda Jawa Timur. Kampung Tangguh Nusantara adalah sebuah *pilot project* kolaboratif dengan *stakeholders* untuk melakukan aksi nyata di desa atau kelurahan yang ditunjuk karena terindikasi tingginya penyebaran Covid-19. Konsepnya adalah menitikberatkan peran serta aktif elemen masyarakat dan mengikutsertakan Polri, TNI, Pemda, akademis, relawan toga/tomas dan masyarakat

Fokus Utama Kampung Tangguh Nusantara:

- tangguh kesehatan jasmani dan rohani;
- tangguh sosial ekonomi;

- tangguh keamanan;
- tangguh informasi dan kreativitas.

Peluncuran Kampung Tangguh Nusantara diikuti 34 Polda dan Kodam seluruh Indonesia secara virtual. Saat peluncuran Kampung Tangguh Nusantara, jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia mencapai 70.736 orang. Sementara itu, pasien sembuh mencapai 32.651 orang.

Pembentukan kampung tangguh ini ditujukan untuk menjaga ketersediaan pangan akibat pandemi Covid-19. Karena itu pula, kegiatannya berbareng dengan acara panen raya, tebar benih, dan bakti sosial. Agar kebutuhan pangan masyarakat terjadi, program yang dibuat dalam kampung tangguh ini memanfaatkan lahan menganggur milik Polri dan TNI. Lahan tersebut ditanami tumbuhan cepat panen seperti singkong, sayuran, ubi, pisang, dan lainnya.

Usai peluncuran, hampir seluruh Polda beramai-ramai membentuk percontohan di daerahnya masing-masing. Di Kalimantan Selatan kampung tangguh ini diberi nama Kampung Tangguh Banua. Program ini menyasar 67 kampung atau desa tersebar di 13 kabupaten. Di kampung-kampung ini, semua orang yang lalu lalang diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Mereka wajib mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, pemberlakuan jam malam, dan tersedianya rumah karantina.

Di Polda Kalimantan Tengah membuat kampung yang bernama Desa Pantang Mundur (Lewu Isen Mulang). Pendirian Desa Pantang Mundur ini dilakukan lantaran penyebaran pandemi sangat berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi serta budaya. Kata “Lewu Isen Mulang” mengandung makna ketangguhan dan keuletan masyarakat suku Dayak dalam menghadapi tantangan dinamika pembangunan.



dummy

5

INOVASI POLDA TANGANI COVID-19

Inovasi Kampung Tangguh Semeru Polda Jawa Timur

Polri terus berinovasi sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia. Inovasi yang telah dilakukan, yakni program Kampung Tangguh Semeru yang diinisiasi oleh Polda Jawa Timur. Jawa Timur sempat menjadi salah satu provinsi dengan penyebaran virus corona tertinggi. Pada bulan Juli 2020, Jawa Timur sempat menjadi wilayah dengan kasus positif corona tertinggi di Indonesia. Situs infocovid19.jatimprov.go.id milik Pemprov Jatim pada tanggal 13 Juli 2020 total kasus positif corona di Jatim mencapai 16.862 kasus. Saat itu terdapat 13 zona merah di Provinsi Jawa Timur.

Polda Jawa Timur kemudian membentuk sejumlah kampung sehat atau Kampung tangguh di daerah-daerah Jawa Timur. Masyarakat dilibatkan dalam pembentukan deretan kampung ini. Kampung Tangguh Semeru dilakukan mulai lingkup terkecil, yakni dari desa dan warga sekitar. Program penanggulangan Covid-19 berbasis komunitas warga sekitar dan melibatkan semua warga tanpa terkecuali.

SOP Keluarga Tangguh:

1. Menyediakan tempat cuci tangan dengan kelengkapannya (baik sabun maupun *hand sanitizer*).

2. Selalu menggunakan masker baik di dalam maupun di luar rumah.
3. Menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mengonsumsi makanan bergizi.
4. Mengganti seluruh pakaian yang digunakan setelah dari luar rumah.
5. Melaksanakan pembersihan tubuh secara rutin minimal dua kali sehari meskipun tidak keluar dari rumah.
6. Menjaga kebersihan dan kesehatan rumah dengan cairan disinfektan.
7. Berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi (15-30 menit).

Kampung Tangguh Semeru dibentuk saat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik) dan Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu). Kampung Tangguh Semeru kemudian resmi diluncurkan oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si. didampingi PJU Polda Jatim dan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko bersama Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Widodo Iryansyah beserta para Pejabat Ulama Kodam V Brawijaya dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Jumat (12/6/2020) petang. Launching Kampung Tangguh Semeru di wilayah Wonorejo II RW 4 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya. Launching Kampung Tangguh Semeru di Wonorejo Surabaya juga diikuti RW yang lain di Kecamatan Tegalsari Surabaya sebanyak 431 secara bersamaan dengan video zoom.

“Kampung tangguh ini merupakan *pilot project* kolaboratif antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Forkopimda, yakni Polda Jatim dan Kodam V/Brawijaya. Pembentukannya memang diprioritaskan pada kampung atau desa yang angka penyebaran Covid-19 baik pasien positif, PDP (Pasien Dalam Pengawasan) dan ODP (Orang Dalam Pemantauan) masih cukup tinggi. Sampai dengan saat ini sudah ada 1.559 Kampung Tangguh Semeru di wilayah Polda Jatim,” kata Kapolda Jatim.

Konsep Kampung tangguh memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan, sosial, ekonomi dan keamanan. Polda menerapkan konsep *problem oriented policing*.



Jadi Polda Jatim melalui Bhanbinkamtibmas dibantu Babinsa juga mengajarkan cara menyelesaikan masalah yang berorientasi seperti sistem dalam kepolisian.

Setelah resmi diluncurkan, program Kampung Tangguh Semeru di wilayah Jawa Timur kian dimasifkan. Sesuai arahan Gubernur Jawa Timur, Kampung tangguh menerapkan sistem pentahelix. Penerapan dengan sistem pentahelix ini menggabungkan unsur pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media yang bersatu membangun kekuatan dalam mengeliminasi kasus Covid-19. Dalam menerapkan Kampung tangguh dilakukan pembagian peran yang saling menguatkan antara Pemprov Jatim bersama Forkopimda. Namun, kuncinya adalah *bottom up participation* atau partisipasi dari bawah atau masyarakat pada pemerintah.

Dengan adanya kampung tangguh di tingkat RT, RW, Desa atau Kelurahan, hingga Kecamatan, serta ditambah dengan Pesantren Tangguh dan Industri Tangguh, akan menjadi kekuatan dalam menjaga ketahanan nasional. Hal itu, lanjut dia, tak lepas dari konsep partisipasi dan kepedulian masyarakat, sehingga dengan keberagaman suku, agama, dan bahasa dapat menjadi bagian perekat membangun ketahanan nasional secara substansif.

Peran tiga pilar di tingkat terendah melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa cukup strategis dalam memperkuat kampung tangguh. Tiga Pilar melatih dan mengisi kemampuan masyarakat. Di tingkat kecamatan juga dibantu Koramil dan Polsek, di kabupaten atau kota dibantu Kodim dan Polres serta Bupati atau Wali Kota. Seiring penerapan kampung tangguh, Jatim juga menerapkan banyak Pesantren Tangguh, Kawasan Industri Tangguh, dan Sekolah Tangguh.

Secara bertahap, sejumlah desa di Jatim juga dibentuk satuan tugas (Satgas) Kampung Tangguh. Dengan demikian pengendalian Covid-19 di tingkat desa sudah bisa dilakukan berbasis gotong royong masyarakat. Strategi ini cukup representatif karena melibatkan langsung seluruh elemen masyarakat yang ada di tingkat bawah sehingga kemungkinan penyebaran virus di level dusun dan desa sangat kecil karena langsung diantisipasi oleh seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut.

Setidaknya, masyarakat secara sadar ikut andil dalam proses pengendalian penyebaran virus karena mereka secara sadar ikut



melakukan tahapan protokol kesehatan terhadap dirinya, terhadap orang-orang di sekitarnya, terutama terhadap orang luar yang kebetulan hendak masuk ke desa tersebut. Pada setiap pintu gerbang masuk desa dan dusun, sudah ada posko yang dijaga langsung oleh masyarakat, hal itu guna mendeteksi masuknya orang luar ke desa itu sendiri. Jika ada orang luar yang hendak berkunjung ke desa tersebut, mereka dengan sigap langsung melakukan sejumlah tahapan protokol kesehatan guna memastikan tidak adanya virus yang dibawa oleh orang itu.

Seperti cerita Moh. Siddik, salah satu kepala dusun yang sekaligus masuk dalam Satgas Kampung Tangguh di Desa Larangan Badung Palengaan Pamekasan. Dengan adanya kamung tangguh itu masyarakat merasa terpanggil untuk melibatkan diri secara suka rela menjaga desa mereka dari serangan virus, setidaknya itu bisa dilihat dari semangat masyarakat menjaga posko secara bergantian untuk memantau lalu lintas masuknya orang luar ke kawasan mereka. Kegiatan ini jelas sangat efektif karena ada proses sterilisasi yang dilakukan berbasis swadaya. Alhasil kemungkinan penyebaran virus dalam satu desa sangat kecil karena ruang masuk orang luar sangat terbatas. Jika pun masuk, harus melalui proses protokol kesehatan yang ketat.

Cerita lain, namun serupa pasti didapat dari desa lain di Jawa Timur. Masyarakat begitu antusias melaksanakan dan menggerakkan kampung tangguh tersebut. Itu semua seata-mata demi menjaga desa mereka dari penularan Covid-19. Di sejumlah media *online* kita sudah bisa menyimak bagaimana antusiasme masyarakat di Jatim saat peresmian kampung tangguh di desa mereka masing-masing. Semua memiliki harapan besar agar pandemi Covid-19 ini segera berlalu dan masyarakat bisa kembali hidup normal, beraktivitas seperti semula.

Secara konseptual, sedikitnya ada empat tujuan dicanangkannya kampung tangguh ini, sebagaimana dirilis oleh Polda Jatim dalam beberapa media *online* beberapa waktu yang lalu. *Pertama*, mendisiplinkan warga agar benar-benar mengikuti protokol kesehatan. Kita tahu komunitas warga terbesar ada di dusun dan desa. Jika kesadaran sudah dimulai dari masing-masing desa, sangatlah muda untuk membangun kesadaran dalam skala besar. Maka, kampung tangguh ini memiliki peran untuk mengetuk kesadaran masyarakat dari level desa terkait pentingnya menerapkan protokol kesehatan selama pandemi corona.



Kedua, menekan dan menurunkan tingkat penyebaran Covid-19. Dengan adanya peran serta masyarakat di masing-masing desa, sangat mungkin penyebaran virus corona bisa ditekan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena mereka sudah sadar dan paham bagaimana cara mengantisipasi penyebaran virus corona. Maka, mereka melakukan segala hal yang dianggap baik dan efektif guna menekan penyebaran virus tersebut. Semisal selalu memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan lain sebagainya. Hal yang tak kalah pentingnya adalah mereka terpenggil untuk menjaga desanya masing-masing dari penyebaran virus dengan cara memantau pergerakan orang luar yang kebetulan hendak masuk ke desa mereka. Jika ada orang luar mau masuk ke desa, mereka langsung disambut dengan protokol kesehatan yang ketat.

Ketiga, bisa menyelesaikan dampak sosial. Dengan adanya kampung tangguh ini, masyarakat secara gotong rotong sedikit banyak bisa mengantisipasi terjadinya dampak sosial, seperti kekurangan pangan, kelaparan, dan lain sebagainya. Antisipasi ini diwujudkan dalam bentuk lumbung pangan di masing-masing desa. Hal itu untuk menjaga kemungkinan terburuk dari pandemi Covid-19 tersebut, termasuk di dalamnya dibentuk posko kesehatan. Jika ada warga yang kebetulan sakit, Satgas kampung tangguh langsung bergerak cepat dengan memeriksakan orang tersebut ke petugas kesehatan yang sudah ada di desa itu sendiri. Inilah antisipasi dampak sosial yang kemungkinan terjadi akibat corona.

Keempat, menjaga keamanan dan ketertiban wilayah masing-masing. Di antara kemungkinan yang harus diwaspadai akibat wabah corona ini adalah ancaman Kamtibmas. Sangat mungkin terjadi kriminalitas akibat pandemi. Karenanya, kampung tangguh juga berperan untuk menjaga dan memastikan kondisi Kamtibmas di masing-masing desa terjaga dengan baik. Penjagaan desa yang berbasis gotong royong masyarakat ini jelas sangat efektif karena sulit sekali orang luar untuk masuk dalam rangka berbuat jahat jika di dalam desa masyarakatnya sudah kompak menjaga keamanan itu sendiri.

Berdirinya kampung tangguh di masing-masing desa merupakan upaya untuk menjaga stabilitas kehidupan warga di desa tersebut. Selain tugas utamanya memutus mata rantai virus corona yang berbasih partisipasi masyarakat, kampung tangguh juga berperan



untuk mengantisipasi dampak sosial akibat pandemi Covid-19 tersebut. Gerakan ini perlu kita dukung dengan penuh kesadaran karena hakikatnya kampung tangguh didirikan dalam rangka menjaga keselamatan kita semua.

Bagi masyarakat yang desanya belum dibentuk kampung tangguh, kemungkinan besar nantinya juga akan dibentuk sejalan dengan perkembangan situasi corona di tanah air. Meskipun secara jujur kita berharap semoga pandemi ini akan segera berakhir. Sejauh ini penancangan kampung tangguh masih diprioritaskan di desa atau kelurahan yang masuk zona merah. Itu semua untuk mempercepat penanganan kasus corona di wilayah yang sudah mulai kritis tersebut.

Sebagai bagian dari masyarakat yang cinta akan ketertiban, keamanan dan kedamaian, mari kita sukseskan gerakan kampung tangguh ini dengan cara berperan aktif dalam semua rangkaian kegiatan yang ada di dalamnya. Kegiatan ini adalah panggilan nurani untuk bersama-sama menjaga desa kita masing-masing dari ancaman penyebaran virus corona. Keberadaan kampung tangguh terbukti sukses menekan Covid-19 di sejumlah wilayah di Jawa Timur.

Status zona perlahan berubah dari merah, oranye, hingga kuning. Melihat keberhasilan ini, Polda Jawa Timur terus menambah lagi jumlah Kampung Tangguh Semeru. Memasuki tahun 2021, untuk mendukung kebijakan penerapan PPKM mikro sejak 9 hingga 22 Februari, Polda Jawa Timur mempersiapkan. Total 7.043 KTS yang akan dibentuk. Hingga Februari 2021, jumlah KTS yang sudah terbentuk yakni sebanyak 3.449 dari sebelumnya hanya 2.906 kampung tangguh.

Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta mengatakan penambahan kampung tangguh karena program tersebut terbukti efektif menekan penyebaran COVID-19 selama ini. “Berdasarkan informasi, pengalaman, analisis dan evaluasi, ternyata KTS sangat efektif dalam penanganan COVID-19, dalam 100 hari dari tiga bulan sekarang akan menjadi 7.043 KTS,” ujar Nico Afinta, Selasa, 9 Februari 2021.

Kampung Tangguh Jaya Polda Metro Jaya

Di Jakarta, adanya rotasi pucuk pimpinan Polda Metro Jaya dari Nanan ke Fadil menjadi batu lonjakan pembentukan kampung tangguh di Jakarta. Fadil Imran yang sukses menerapkan kampung tangguh di Jawa

Timur langsung menggagas Kampung Tangguh Jaya. “Saya, Kapolda Metro dan Pangdam Jaya, akan bangun kampung tangguh di wilayah yang jadi episentrum penyebaran Covid-19 di Jakarta. Jangan lihat perbedaan. Kalau ada yang baik di wilayah lain jangan malu-malu, bisa ditiru di sini, begitu sebaliknya. Kasihan pedagang, tukang ojek, dan emak-emak, tidak ada yang datang lantaran ketakutan,” ujar Fadil saat berada di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu, 22 November 2020. (“Sukses di Jatim, Fadil Imran membuat Kampung Tangguh Jaya di Jakarta”, diakses dari <https://metro.sindonews.com/read/241656/170/sukses-di-jatim-fadil-imran-akan-buat-kampung-tangguh-di-jakarta-1606050663> pada)

Pada tanggal 8 Februari 2021 Kapolda Metro Jaya resmi meluncurkan Kampung Tangguh Jaya. Kelurahan Kapuk, Cengkareng, diluncurkan sebagai kampung tangguh pertama di Jakarta Barat Kapuk sengaja dipilih karena memiliki angka positif Covid-19 tertinggi di Jakarta Barat.

Kampung Tangguh Jaya adalah program sinergitas dan kolaboratif antara Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya dan Pemprov DKI Jakarta. Kampung tangguh ini ditargetkan dapat menekan angka positif Covid-19 yang masih tinggi di Jakarta Barat. Di kampung tersebut, baik masyarakat maupun pengurus RT, RW, Lurah, hingga Babinkamtibmas dipersiapkan agar dapat lebih efektif memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Masyarakat bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan di Kampung Tangguh Jaya bergotong royong membangun beberapa fasilitas, yakni sistem keamanan satu pintu dengan adanya penjagaan cek suhu tubuh, sarana cuci tangan di lingkungan kampung, posko kesehatan, ruang isolasi mandiri, tes swab secara berkala, dan adanya fasilitas lumbung pangan yang disediakan secara swadaya dari masyarakat untuk masyarakat yang membutuhkan.

Program Kampung Tangguh Jaya memberikan sarana masyarakat untuk melaksanakan bercocok tanam dan juga berternak ikan untuk kebutuhan pangan yang diberikan kepada warga yang membutuhkan, terutama warga yang terpapar Covid-19. Setiap warga di lingkungan mendapatkan edukasi terkait hidroponik mulai dari budidaya ikan sampai jenis tanaman yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Kemudian, dipersiapkan sistem untuk menyalurkan informasi terkait Covid-19 kepada warga.

**Pertanyaan
untuk
Penulis
pada kapan
ya pak?**



Kampung Tangguh di Kelurahan Kapuk merupakan pilot project. Pembentukan Kampung Tangguh di Kelurahan Cengkarang menjadi cikal bakal pembangunan kampung tangguh di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Prioritas pendirian kampung tangguh ada di RW zona merah. Hingga Januari 2021, Polda Metro Jaya telah mendirikan 203 Kampung Tangguh Jaya di Jakarta, Depok, Tangerang sampai Bekasi (Jadetabek).

Kampung Siaga Candi Polda Jawa Tengah

Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang luar biasa terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 tidak hanya membuat krisis kesehatan, namun berdampak luas pada perekonomian dunia.

Dampak pandemi Covid-19 membuat sejumlah perusahaan mengurangi produksi, yang pada gilirannya berimbas pada pemutusan hubungan kerja para pekerja. Banyak masyarakat yang kemudian kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan keluarga.

Ketahanan masyarakat sangatlah penting di tengah pandemi Covid-19, terutama ketahanan ekonomi. Menyadari pentingnya ketahanan masyarakat itu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah (Jateng), Irjen Pol. Ahmad Luthfi, menginisiasi Program Kampung Siaga Candi. Program ini bertujuan untuk mewujudkan ketahanan masyarakat di berbagai bidang pada masa pandemi Covid-19.

Pencanangan Kampung Siaga Candi dilakukan Kapolda Jateng disela-sela kunjungannya di Desa Nglingsi, Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Senin 20 Juli 2020. Rangkaian acara kunjungan kerja Kapolda Jateng sekaligus pencanangan 401 Kampung Siaga Candi Kabupaten Klaten. Pencanangan Kampung Siaga Candi di wilayah Klaten bertujuan untuk memastikan ketahanan pangan selama pandemi, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, sehingga bisa memutus mata rantai penularan Covid- 19.

Kehadiran Kampung Siaga Candi dapat menjadi solusi bagi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. “Kampung Siaga Candi ini merupakan salah satu alternatif dari krisis kesehatan dan ekonomi atas kekhawatiran masyarakat di tengah pandemi Covid-19,” kata Irjen Ahmad Luthfi.



Desa Nglinggi dipilih sebagai percontohan Kampung Siaga Candi karena ketaatan warganya yang tinggi terhadap protokol kesehatan, sehingga belum ada temuan kasus positif Covid-19. Kampung ini juga mempunyai lumbung desa tempat masyarakat menyumbang hasil panen. Selain itu, setiap Jumat warga menggantungkan sembako di posko, warga yang membutuhkan bisa mengambil.

Pencanangan Kampung Siaga Candi di Desa Nglinggi ditandai dengan pemukulan gong oleh Kapolda Jateng, lalu dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi melalui video conference yang dipimpin Kepala Desa Nglinggi yang diikuti 401 desa di 26 kecamatan di Kabupaten Klaten. Setelah itu, dilanjutkan penyerahan Alat Pelindung Diri (APD) kepada perwakilan camat di Kabupaten Klaten.

Kampung Siaga Candi di Klaten berisi antara lain ketahanan pangan, khususnya pertanian dan perikanan. Oleh karena itu, acara diakhiri dengan penebaran 40.000 benih ikan di kolam untuk memenuhi ketahanan pangan warga, yang lokasinya tidak jauh dari kantor Desa Nglinggi. Penebaran benih ikan ini dilakukan sesuai instruksi presiden terkait pemulihan ekonomi dengan menggerakkan seluruh komponen masyarakat untuk menguatkan ketahanan pangan nasional.

Selesai dengan kegiatan penaburan ikan, Kapolda menuju Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo, untuk melaksanakan panen raya padi. Bupati Klaten Sri Mulyani dalam kesempatan itu menyebutkan, Klaten memiliki lahan padi seluas 59.000 hektare, di mana yang sudah panen sekitar 37.000 hektare dan yang siap panen hari itu sebanyak 21.000 hektare. Setiap desa di Klaten sudah diwajibkan membuat lumbung pangan masing-masing. Penghasilan padi yang dipanen di Klaten mencapai 227.000 ton beras dengan kebutuhan masyarakat sekitar 126.000 ton, sehingga Klaten ini dapat surplus beras sebanyak 101.000 ton.

Dalam menjalankan program Kampung Siaga Candi, Polda Jateng membentuk Bhabinkamtibmas Candi, yang bertujuan menjalin sinergi Polri dan masyarakat dalam rangka menciptakan situasi yang aman dan kondusif, serta untuk menekan penyebaran Covid-19. Bhabinkamtibmas menjadi fasilitator dalam pembentukan Kampung Siaga di wilayah Jateng.



CANDI yang dijadikan jargon ini adalah sebuah singkatan dari kemampuan yang harus dimiliki personal Bhabinkamtibmas Jawa Tengah, yaitu Cerdas, Agamis, Negosiator, Dedikasi, dan Inovasi.

Tujuan Kapolda membentuk Bhabinkamtibmas Candi adalah untuk memberikan identitas kepada Bhabinkamtibmas agar lebih dikenal oleh masyarakat. Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak yang mengemban tugas khusus.

Bhabinkamtibmas Candi diluncurkan di Desa Nglinggi, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, pada 27 Juli 2020, bersamaan dengan Penilaian Kampung Siaga Candi yang dilakukan oleh tim Polda Jateng. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menuju Adaptasi Kebiasaan Baru untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Peluncuran Bhabinkamtibmas Candi dihadiri Kapolres Klaten AKBP Edy Suranta Sitepu S.I.K. M.H, Dandim 0723/Klaten Letkol Kav Minarso S.I.P, Sekda Kabupaten Klaten Drs. Jaka Sawaldi, M.M., PJU Polres Klaten serta tim penilai yang dipimpin oleh Kabag Binopsnal Bimas Polda Jateng, AKBP Suwanto.

Kegiatan diawali dengan seremonial pemasangan helm dan ransel oleh tim Polda Jateng dan Forkompinda Kabupaten Klaten, kepada perwakilan Bhabinkamtibmas di Balai Desa Nglinggi. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan mengunjungi Kampung Pokoh untuk dilakukan penilaian.

Keberadaan Kampung Siaga Candi mendapat sambutan positif dari sejumlah kalangan, termasuk kepala daerah. Bupati Pekalongan Asip menyadari bahwa ketahanan masyarakat sangat penting di tengah pandemi Covid-19, baik itu ketahanan ekonomi, kesehatan, dan juga solidaritas antarmasyarakat, untuk bersama-sama menghadapi musibah ini.

Oleh karena itu, bupati sangat menyambut baik program Kampung Siaga di Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, yang secara administratif di bawah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

“Di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini, ketahanan baik itu ketahanan pangan, ketahanan soliditas sosial ini menjadi penting, karena kalau tidak ditangani dengan baik, ketidaksolidan di masyarakat akan berpengaruh ke Kamtibmas,” ujarnya.

Sambutan positif juga datang dari Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi. Bupati mengapresiasi pembentukan Kampung Siaga Candi yang diprakarsai oleh Polres Purbalingga. Apresiasi itu disampaikan bupati secara langsung saat menghadiri kegiatan asistensi tim Polda Jateng di Kampung Siaga Candi Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, 4 Agustus 2020.

“Kepada pak kapolres, kami atas nama pemerintah menghaturkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas pembentukan Kampung Siaga Candi yang selama ini terus berlanjut hingga sudah terbentuk 132 kampung siaga di wilayah Kabupaten Purbalingga,” ucapnya saat memberikan sambutan.

Keberadaan Kampung Siaga Candi ternyata sinergis dengan program Gubernur Jateng, yaitu Jogo Tonggo. Oleh sebab itu, bupati sangat mendukung pembentukan Kampung Siaga Candi oleh Polres Purbalingga di 18 kecamatan. Keberadaan Kampung Siaga Candi diyakini dapat mewujudkan ketahanan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Desa Bandingan merupakan salah satu Kampung Siaga Candi di Kabupaten Purbalingga. Desa ini sudah menerapkan sejumlah kegiatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Selain itu, menerapkan protokol kesehatan di masing-masing rumah.

Di Magelang Kota, Polres setempat melaksanakan kegiatan penancangan Kampung Siaga Candi berbasis keamanan dan ekonomi, di Kampung Kriyan, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, pada 13 Juli 2020.

Kegiatan penancangan Kampung Siaga Candi bertempat di TPQ RT 06/RW 03, Kelurahan Potrobangsari, yang dihadiri Kapolres Magelang Kota AKBP Nugroho Ari Setyawan SIK, M.M., C.F.E., dan para Forpimda Kota Magelang, di antaranya Sekda Drs. H. Joko Budiono, M.M. yang mewakili Wali Kota Magelang, Kasdim Mayor Inf. Sudarno yang mewakili Dandim 0705 Magelang, Panitera pembantu Suyadi yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Magelang, dan Kasi Intel Sriharna S.H., M.H., yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Magelang.

Turut hadir Kapolsek Magelang Utara Kompol I Gede Suarti beserta beberapa anggota, Kasat Intelkam Polres Magelang Kota, Kasat Binmas Polres Magelang Kota Camat Magelang Utara, Lurah Potrobangsari, para



Bhabinkamtibas dan Babinsa sekecamatan Magelang Utara, serta Ketua RW, Ketua RT, serta tokoh masyarakat setempat. Sekda Kota Magelang Drs. H. Joko Budiono, M.M. atas nama pemerintah kota menyampaikan apresiasi atas pencanangan Kampung Siaga Candi oleh Polres Magelang Kota dalam rangka penanggulangan dan menghentikan penyebaran Vovid 19.

Tujuan pembentukan Kampung Siaga Candi di wilayah Kota Magelang yang berbasis keamanan dan ekonomi adalah untuk mendorong masyarakat bersatu, bahu-membahu memperkuat kerja sama seluruh masyarakat bersama TNI, Polri, dan pemerintah dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penularan Covid-19.

Kampung Kriyan secara resmi dicanangkan sebagai Kampung Siaga Candi di wilayah hukum Polres Magelang Kota dengan ditandai pemukulan gong oleh Sekda Kota Magelang didampingi Kapolres beserta para Forpimda. Setelah itu Kapolres menyerahkan peralatan yang mendukung kampung tersebut dalam penanggulangan Covid-19. Di lokasi yang sama juga diserahkan bantuan paket sembako kepada beberapa warga.

Sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan program Kampung Siaga Candi, Kapolda Jateng juga memberikan penghargaan kepada Kapolres berprestasi, yakni Kapolrestabes Semarang, Kapolresta Banyumas, Kapolres Semarang, Kapolres Pati, Kapolres Wonogiri, Kapolres Demak, Kapolres Blora, Kapolres Purworejo, Kapolres Cilacap, Kapolres Tegal, Kapolres Klaten, dan Kapolres Pemalang.

Penghargaan diberikan kepada Polres yang berhasil menjalankan program Kampung Siaga Candi. Pemberian penghargaan meliputi Kategori Bidang Ekonomi dan Pangan, Bidang Kesehatan, Bidang Inovasi dan Kreativitas, dan Bidang Keamanan.

Untuk Kategori Bidang Ekonomi dan Pangan, Kampung Siaga Candi Dusun Duwet Kidul, Desa/Kecamatan Baturetno, binaan Polres Wonogiri meraih juara I. Dusun Duwet Kidul sebelumnya berhasil menyabet juara pertama lomba Kampung Siaga Candi Covid-19 tingkat Polres Wonogiri.

Kategori Bidang Kesehatan, Kampung Siaga Candi Desa Pesawahan Kecamatan Rawalo, binaan Polresta Banyumas, terpilih sebagai juara 1 tingkat Polda Jawa Tengah. Kampung Siaga Candi yang telah

dicanangkan dapat berdampak positif dan dirasakan masyarakat, terutama dalam penanganan Covid-19 di Banyumas, di mana seluruh elemen masyarakat bisa bersinergi, tangguh, dan berdaya.

Bupati Banyumas Achmad Husein menyambut baik prestasi tersebut. Dia berpesan untuk dipertahankan dan memberi semangat masyarakat Banyumas untuk selalu waspada menghadapi Covid-19.

Untuk kategori Bidang Inovasi dan Kreativitas, Prestasi membanggakan diraih Desa Krandegan, Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo. Desa ini terpilih menjadi juara 1 Kampung Siaga Candi tingkat Polda Jateng. Trofi penghargaan diterima Kapolres Purworejo di Polda Jateng pada 1 September 2020, bersamaan dengan peringatan HUT Polwan ke-72. Kabupaten Purworejo memiliki 288 kampung siaga yang tersebar di 16 kecamatan. Keberadaan Kampung Siaga mendapat respons baik dari masyarakat. Terakhir untuk kategori Bidang Keamanan, juara I diraih Polrestabes Semarang.

Kampung Tangguh Balla Ewako Polda Sulawesi Selatan

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu garda terdepan dalam mencegah penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Atas perintah Kapolri, jajaran Kepolisian Daerah (Polda) terus mencari inovasi dan terobosan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Di wilayah Indonesia Timur, Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) menggagas sebuah terobosan yang diberi nama Balla Ewako.

Balla Ewako pertama kali diresmikan di Desa Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, pada Sabtu 11 Juli 2020. Desa Sudirman sekaligus menjadi kampung percontohan program Balla Ewako. Balla Ewako diresmikan oleh Gubernur Provinsi Sulsel yang kala itu dijabat Nurdin Abdullah. Peresmian program Balla Ewako dihadiri Kapolda Sulsel Irjen Pol. Mas Guntur Laupe, Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Andi Sumangerukka, para wali kota/bupati, dan tokoh masyarakat lokal.

Balla Ewako merupakan rumah atau tempat yang dibangun jajaran kepolisian dan TNI sebagai tempat edukasi masyarakat tentang Covid-19. Di Balla Ewako jajaran TNI, Polri, pemerintahan dan tokoh masyarakat secara bersama-sama melakukan edukasi tentang tata



cara memutus mata rantai penularan Covid-19. Balla Ewako sekaligus berfungsi sebagai pusat informasi dan administrasi untuk pendataan warga yang terdampak pandemi Covid-19.

Di Balla Ewako terdapat ruang isolasi untuk pertolongan pertama bagi warga desa yang positif Covid-19. Di Balla Ewako warga diberikan pelatihan untuk meningkatkan perekonomian di masa pandemi dengan berjualan *online*. Di Balla Ewako, warga diajarkan untuk hidup sehat dan bersih dengan menyiapkan tempat cuci tangan di setiap sudut rumah dan menyosialisasikan penggunaan masker. Di Balla Ewako juga terdapat kolam ikan, kebun sayur, dan kebun jamur, sehingga warga yang terpapar corona namun tidak sakit, bisa tetap melakukan aktivitas seperti keseharian di kampung, tetapi dalam pengawasan tenaga medis.

Balla Ewako didirikan di hampir setiap desa atau kelurahan melibatkan anggota Polri, TNI, dan lurah. Sampai akhir tahun 2020, di Sulawesi Selatan sudah didirikan 2.615 Balla Ewako di 3.048 desa/kelurahan yang tersebar di 24 kabupaten/kota di Sulsel. Kehadiran Balla Ewako terbukti mampu menekan penyebaran Covid-19 di wilayah Sulsel.

Melihat keberhasilan program Balla Ewako, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., didampingi Pejabat Utama Mabes Polri, secara khusus melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan dalam rangka mengecek penerapan kampung tangguh sebagai upaya penanggulangan penyebaran Covid-19

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tiba di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Kamis 11 Februari pukul 17.00 WITA. Kapolri disambut oleh Kapolda Sulsel, Irjen Pol. Merdisyam, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol. Witnu Urip, dan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, dan Pangdam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Andi Sumangerukka.

Kapolri sebelumnya sempat dinyatakan batal datang karena mendadak dipanggil oleh Presiden RI, Joko Widodo. Namun rupanya, Jenderal Listyo datang dan langsung mengunjungi Balla Ewako, yang berada di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya. Saat tiba di sana, Jenderal Listyo disambut langsung oleh masyarakat. Dalam peninjauannya, Kapolri mengecek beberapa fasilitas yang tersedia berupa ruang isolasi, ruang membaca, dan lahan tempat ketahanan



pangan yang disediakan secara swadaya oleh masyarakat, guna membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan, gudang bantuan logistik, dapur umum untuk warga serta kegiatan budidaya ikan, sayur mayur, dan lainnya.

Bahkan Kapolri menemukan jika di Balla Ewako sudah berjalan kegiatan 3T (*tracing, test, treatment*). Pada kesempatan itu, Kapolri membagikan 20.000 masker dan 20.000 botol *hand sanitizer* kepada perwakilan Balla Ewako yang diterima para ketua RT, Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Di hadapan masyarakat, Kapolri menyampaikan sangat mengapresiasi program Kampung Tangguh Balla Ewako.

Kampung Tangguh Balla Ewako terbukti mampu menekan angka penyebaran Covid-19. Provinsi Sulsel yang tadinya zona merah kini menjadi zona hijau. Keberhasilan ini berkat dukungan masyarakat yang disiplin menerapkan protokol kesehatan. Lantaran terbukti efektif untuk menekan penyebaran virus corona, Kapolri berharap masyarakat Sulsel mau terlibat aktif dalam mendukung program Kampung Tangguh Balla Ewako tersebut. Mengingat, kerja sama seluruh elemen masyarakat diperlukan di masa pandemi ini. “Tolong pertahankan ini, dan bersama-sama kami gelorakan program Kampung Tangguh Balla Ewako untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dan semoga tetap dalam Zona Hijau,” pesan Kapolri.

Kinerja hebat jajaran Polda Sulsel dalam menekan penyebaran virus corona melalui program tangguh Balla Ewako merupakan wujud program Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam mewujudkan Polri yang Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan. Tidak salah jika Balla Ewako ini juga diapresiasi oleh Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) dengan memberikan penghargaan Trust Award.

Penghargaan Trust Award diserahkan oleh Direktur Eksekutif Lemkapi, Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H. kepada Polda Sulsel yang diterima langsung oleh Kapolda Sulsel Irjen Pol. Drs. Merdisyam M.Si., didampingi Kabid Humas dan Wadir Binmas, bertempat di ruang tamu pimpinan lantai 2 Mapolda Sulsel pada Selasa, 9 Maret 2021. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam membuat berbagai inovasi untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat pada masa pandemi Covid-19.



Berdasarkan hasil survei Lemkapi, dedikasi yang tinggi Kapolda Sulsel, Irjen Pol. Merdisyam dalam membuat berbagai inovasi untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat pada masa pandemi Covid-19, banyak mendapat apresiasi dari masyarakat sebab Kampung Tangguh (Balla Ewako) tersebar di seluruh Desa dan Kelurahan di Sulawesi Selatan.

dummy



6

DARI PROMOTER, TRUS AWARD HINGGA PRESISI AWARD

Beragam inovasi yang dilakukan Polri banyak mendapat apresiasi dari publik. Kinerja Polri yang semakin memuaskan telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) sebagai lembaga yang membidangi *Research, Promoter Reward, Consultant*, dan memberi kajian kinerja Polri secara aktif memantau kinerja Polri aktif memberikan apresiasi kepada Polri, baik di tingkat Mabes Polri, Polda, Polres maupun prestasi individu personel Polri.

Terdapat dua jenis penghargaan yang diberikan Lemkapi kepada jajaran Polri, yaitu Promoter Reward, Trust Award hingga Presisi Award. Penghargaan Promoter diberikan Lemkapi kepada jajaran Polri yang telah melakukan inovasi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sementara itu, Trust Award diberikan atas dasar kepercayaan publik terhadap kinerja dan pelayanan jajaran Polri, baik dari segi kualitas maupun kuantitas pelayanan yang prima. Belakang Lemkapi memberikan Presisi Award kepada jajaran Polri yang memiliki prestasi dan inovasi yang banyak diapresiasi masyarakat. Penghargaan ini diharapkan akan bisa melahirkan motivasi kepada seluruh jajaran Polri.

Sebelum memberikan penghargaan, Lemkapi terlebih dahulu melakukan pemantauan, penelitian, dan riset terhadap jajaran Polri



yang dituju. Survei melibatkan masyarakat sebagai responden. Tujuan Lemkapi memberikan penghargaan adalah untuk memacu semangat berinovasi pada jajaran Polri. Dengan demikian, inovasi yang dihasilkan secara langsung berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat.



Korlantas Polri menerima penghargaan Promoter Reward dari Lemkapi. Penghargaan diserahkan Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Saputra Hasibuan kepada Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Drs. Istiono, M.H., di Gedung NTMC, Jakarta, Selasa 22 September 2020.

Sumber: Dok Lemkapi

Selama pandemi Covid 19, Polantas memiliki peranan penting dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat agar terhindar dari penularan virus berbahaya tersebut. Masyarakat pun puas melihat jajaran Polri dan TNI yang sangat aktif mendukung kebijakan pemerintah melakukan sosialisasi dan mengawasi serta melindungi warga selama aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Polri dan TNI di mana-mana aktif melakukan penyekatan di jalan raya dan melakukan sosialisasi dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.

Melihat kinerja Polantas Polri yang semakin baik, Lemkapi memberikan apresiasi kepada Korlantas Polri. Bertepatan dengan HUT-65 Lalu Lintas Polri Tahun 2020, Lemkapi memberikan penghargaan

Promoter Reward kepada Korlantas Polri. Promoter Reward diberikan atas dasar dedikasi dan loyalitas Polantas seluruh Indonesia selama ini. Penghargaan diserahkan Direktur Eksekutif Lemkapi Dr. Edi Hasibuan kepada Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol. Istiono di kantornya, pada tanggal 22 September 2020.

Penghargaan Promoter Reward juga sebagai wujud nyata dedikasi dan loyalitas atas kerja keras seluruh jajaran Polantas Polri pada Operasi Ketupat 2020 dalam mengelola Kamseltibcarlantas. Lemkapi menilai kinerja Polantas ini sebagai implementasi penguatan program Promoter Kapolri dalam mewujudkan SDM yang unggul dan Harkamtibmas yang mantap.

Hasil pemantauan dan penelitian Lemkapi, terutama saat menjelang Lebaran 2020, siang dan malam Polantas seluruh Indonesia tanpa mengenal waktu kerja keras di jalan raya melindungi masyarakat supaya tidak mudik, agar penyebaran Covid-19 bisa ditekan. Polantas juga berjibaku mengawasi warga di jalan raya agar patuh mengikuti protokol kesehatan.

Polantas Polri juga banyak melakukan kegiatan kemanusiaan di tengah masyarakat dengan membagikan 37.000 masker dan kegiatan bakti sosial berupa pemberian sembako dan melakukan *rapid test* gratis kepada masyarakat. Lemkapi melihat kinerja Korlantas Polri sangat humanis dan diapresiasi masyarakat serta pelayanannya banyak dipuji publik.

Mendapat penghargaan itu, Kakorlantas Polri Irjen Istiono menyambut baik atas apresiasi yang sudah diberikan oleh Lemkapi. Penghargaan ini bisa menjadi pemicu untuk jajaran Polantas seluruh Indonesia bertugas lebih baik lagi.





Polda Metro Jaya mendapatkan penghargaan Promoter Reward dari Lemkapi. Penghargaan diserahkan Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Saputra Hasibuan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Nana Sujana, di ruang kerjanya, Rabu 10 Juni 2020.

Sumber: Dok Lemkapi

Polda Metro Jaya dan jajarannya selama pandemi tidak mengenal lelah melayani dan melindungi masyarakat agar terhindar dari virus corona yang merebak di Ibu Kota DKI Jakarta. Jajaran personel Polda Metro Jaya juga banyak terlibat langsung mengurus dan memakamkan jenazah korban Covid-19. Sebanyak 48 anggota Polda Metro Jaya tergabung dalam tim khusus Samapta secara tulus dan ikhlas menolong, mengurus dan memakamkan jenazah korban virus yang banyak menelan korban jiwa itu.

Pengabdian yang tulus dari anggota Samapta Polda Metro Jaya, meski nyawa taruhannya selayaknya mendapat pujian dari masyarakat. Lemkapi yang merupakan perkumpulan para akademisi, mahasiswa, dan masyarakat pada tanggal 10 Juni 2020 mendatangi Polda Metro Jaya untuk menyampaikan terima kasih kepada Polda Metro Jaya atas pengabdianya membantu mengurus jenazah yang meninggal karena terpapar Covid-19.

Lemkapi sudah lama memantau kinerja hebat dari Tim Khusus yang dibentuk Direktur Samapta Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ngajib. Pengabdian Timsus Samapta dinilai luar biasa, di mana saat masyarakat

mengetahui korban Covid-19 semua pada menjauh, namun beda dengan anggota Tim Khusus Samapta. Mereka dengan ikhlas mau mengurus dan menolong serta memakamkan para korban Covid-19 yang meninggal.

Tim Pemulasaran Polda Metro Jaya hadir pada saat yang tepat dan waktu yang cepat ketika negara dan masyarakat membutuhkan. Tim khusus Pemulasaran ini bekerja tanpa kenal waktu dan dengan ikhlas mengurus dan menolong serta memakamkan korban Covid-19 yang meninggal.

Sebagaimana terjadi pagi itu, Sabtu 16 Mei 2020, Tim Khusus (Timsus) Ditsamapta Polda Metro Jaya (PMJ) bersiap memulasarkan dua jenazah pasien COVID-19 di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. Lantaran jenazah yang dimakamkan perempuan, proses pemulasaraan kali ini melibatkan tiga Polwan. Ketiga Polwan tersebut adalah Bripka Rina, Bripda Chalida, dan Bripda Debi Tarigan. “Saya sengaja turunkan tiga polwan khusus untuk melakukan pemulasaraan jenazah yang perempuan,” kata Dirsamapta PMJ Kombes Pol. Mokhamad Ngajib.

Pemulasaran dua jenazah pasien COVID-19 dikoordinasikan oleh Ipda Nuryasin dengan melibatkan petugas Dinkes DKI Jakarta, Satpol PP, dan Damkar. Jenazah pertama yang dimakamkan bernama Mulriyani. Perempuan yang tutup usia 42 tahun ini beralamat di Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara.

Proses pemulasaran jenazah ini berlangsung dari pukul 10.00 hingga 11.30 WIB. Usai pemulasaran juga diserahkan santunan kepada keluarga jenazah. Berselang 15 menit kemudian, Timsus Ditsamapta PMJ kembali diminta bantuan melakukan pemulasaran jenazah dengan protokol COVID-19. Jenazah kedua ini diketahui berusia 22 tahun warga Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

Perempuan berumur 22 tahun ini meninggal setelah 10 hari lalu melahirkan di salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan. Ia diduga terpapar virus COVID-19 di rumah sakit tersebut. Tapi, bayinya dalam keadaan sehat dan negatif COVID-19. Jenazah perempuan ini juga dimakamkan di TPU Tegal Alur pada pukul 11.45 hingga 12.30 WIB. Seperti biasanya, Ditsamapta PMJ juga menyerahkan santunan kepada keluarga jenazah.

Keterlibatan Polri membuat proses pelaksanaan fardu kifayah terhadap jenazah COVID-19 dapat berlangsung aman dan lancar. Tidak



semua orang bisa terlibat karena pemakaman jenazah COVID-19 harus sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan WHO.

Atas pengabdian Tim Khusus ini, Lemkapi memberikan penghargaan Promoter Reward kepada Direktur Samapta Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ngajib. Penghargaan Promoter Reward diserahkan secara simbolis oleh Direktur Eksekutif Lemkapi Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H., kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Nana Sujana.

Pada waktu bersamaan, Lemkapi juga menyerahkan penghargaan yang sama kepada Kombes Pol. Sambodo selaku Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Terdapat sejumlah penilaian Lemkapi dalam memberikan apresiasi. Selain kinerjanya banyak diapresiasi publik, penghargaan ini juga diberikan atas hasil penelitian Lemkapi yang dilakukan pada akhir Mei 2020. Penelitian menyebutkan sebesar 83.4% masyarakat puas atas kinerja Polri dan TNI sebagai ujung tombak pelaksana dan pengawas PSBB di lapangan.

Penghargaan diberikan atas dedikasi jajaran Polantas mencegah penyebaran Covid-19 jelang Lebaran 2020. Jajaran Polantas aktif bersama jajaran Korlantas Polri, TNI dan instansi lainnya melakukan penyekatan agar masyarakat Jakarta dan sekitarnya tidak mudik dengan harapan COVID-19 tidak menyebar ke daerah-daerah.

Lemkapi mencatat sebanyak 80 ribu kendaraan yang mudik berhasil digagalkan seluruh jajaran Polri demi menekan penyebaran virus corona ke daerah di luar Jakarta. Kinerja Polantas banyak diapresiasi publik.

Dalam kesempatan itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana didampingi Wakapolda Brigjen Hendro Pandowo mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas kepercayaan dan apresiasi yang diberikan kepada Polri dan TNI. “Kami bersama TNI bekerja dengan tulus untuk melayani dan melindungi masyarakat agar terhindar dari COVID-19.”





Dittahti Polda Jatim mendapatkan penghargaan Promoter Reward dari Lemkapi. Penghargaan diserahkan Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Saputra Hasibuan kepada Direktur Tahti Polda Jatim, AKBP Sutrisno HR, disaksikan Kapolda Jatim Irjen Pol. Luki Hermawan di Mapolda Jatim, Jumat 6 Desember 2019.

Sumber: Dok Lemkapi

Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) membuat terobosan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada bulan Februari 2019, Polda Jatim melalui Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) membuat Aplikasi Tahti Semeru yang diperuntukkan bagi tahanan maupun keluarga tahanan yang ada di Rumah Tahanan (Rutan) Mapolda Jatim.

Melalui aplikasi Tahti Semeru, Polda Jatim memberikan fasilitas panggilan video bagi keluarga tahanan yang sedang menjalani hukuman selama 10 menit. Aplikasi Tahti Semeru juga digunakan untuk melakukan pendaftaran pembesukan tahanan. Dengan fasilitas ini keluarga tahanan Polda Jatim tidak perlu antre mendaftar untuk membesuk anggota keluarganya.

Fasilitas *video call* dalam aplikasi tersebut tidak bebas layaknya masyarakat pada umumnya *video call* diperbolehkan hanya 10 menit. Waktunya juga diatur oleh petugas dari kepolisian. Aplikasi yang digunakan bukanlah aplikasi perpesanan pada umumnya. Sebelum melakukan *video call* masyarakat harus mendaftar terlebih dahulu.



Seperti halnya kunjungan, jam dan hari *video call* ditentukan oleh pihak Polda Jatim yang akan menghubungi keluarga tahanan. Jika beberapa kali panggilan tidak direspons, jadwal *video call* akan diputus dan diganti tahanan lain.

Selama melakukan *video call* dengan keluarga, tahanan juga diawasi. Pembicaraan yang dilakukan tidak boleh mengenai pengurusan kasus. Jika yang dibicarakan terkait pengurusan kasus yang dihadapi tahanan, sambungan *video call* akan diputus.

Selain fasilitas *video call*, aplikasi itu juga dilengkapi fasilitas pendaftaran kunjungan. Dengan mendaftar melalui aplikasi Tahti Semeru keluarga tidak perlu antre lama di Mapolda Jatim karena sudah ada jadwal hari dan jamnya, sehingga pihak keluarga bisa mempersiapkan diri.

Layanan ini merupakan yang pertama kali diberlakukan di Indonesia. Oleh karena itu, terobosan dan inovasi yang dilakukan Dittahti Polda Jatim dengan meluncurkan aplikasi Tahti Semeru mendapatkan penghargaan Promoter Reward dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi). Penghargaan diserahkan Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Saputra Hasibuan kepada Direktur Tahti Polda Jatim, AKBP Sutrisno HR, disaksikan Kapolda Jatim Irjen Pol. Luki Hermawan di Mapolda Jatim, Jumat, 6 Desember 2019.

“Inovasi yang dilakukan Dittahti Polda Jatim dengan menggunakan aplikasi ini pertama di Indonesia. Ini bentuk penghargaan dari Lemkapi pada Polda Jatim yang telah bekerja secara profesional, modern, dan terpercaya,” kata Edi Saputra saat itu.

Secara umum, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polda Jatim juga cukup tinggi. Dari hasil survei yang dilakukan Lemkapi pada bulan November 2019 terhadap 500 responden, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pola Jawa Timur mencapai 80,2 persen. Angka ini menjadi indikator bahwa Polda Jatim telah bekerja secara profesional, modern, dan terpercaya.

Aplikasi Tahti Semeru secara umum mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kendati demikian, Polda Jatim berkomitmen terus mengembangkan inovasi yang sudah dibuat. Maka, memasuki tahun 2019, Polda Jatim meluncurkan Aplikasi SIMATAHATI. Aplikasi ini merupakan penyempurna dari pengembangan aplikasi Tahti Semeru



yang sudah ada sebelumnya. Mulai 1 Januari 2020, Aplikasi Sematahati resmi diterapkan Polda Jatim menggantikan Aplikasi Tahti Semeru.

Aplikasi SIMATAHATI ini tidak hanya digunakan di Dittahti Polda Jatim, namun juga Polres jajaran Polda Jatim sampai ke tingkat Polsek. Sesuai dengan namanya aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan sistem manajemen tahanan dan barang bukti dari semua tingkat satuan, dari mulai Polsek hingga Polda sehingga memudahkan manajemen tahanan dan barang bukti.

Sebagai penyempurna aplikasi sebelumnya, SIMATAHATI ini juga memberi kemudahan bagi para keluarga tahanan dalam membesuk keluarganya yang ditahan di Polda Jatim. Prosesnya sangat mudah, cukup datang saat waktu kunjung tahanan maka akan ada petugas yang memandu cara mendapatkan aplikasi tersebut dan berikud dengan kode id tahanan yang dibesuk. Setelah didaftarkan secara *online*, pembesuk akan mendapatkan *barcode* untuk E-tiket besuk tahanan sehingga pembesuk tidak perlu antre panjang lagi.

Terdapat dua anggota di Rutan Polda yang siap melayani pendaftaran. Jika keluarga tidak memiliki ponsel dan email, bisa didaftarkan oleh anggota. Bagi keluarga yang jauh, bisa mendaftar di Polsek terdekat jika ingin besuk. Saat datang di Rutan Polda, cukup menunjukkan barcode. Bahkan bagi keluarga tahanan yang berdomisili jauh dari Polda Jatim bisa melakukan besuk tahanan melalui *video call* dengan memanfaatkan aplikasi SIMATAHATI.

Kinerja Polda Jatim dalam menangani pandemi Covid-19 juga tidak luput dari perhatian masyarakat. Terobosan Polda Jatim dengan membentuk Kampung Tangguh Semeru banyak diapresiasi masyarakat. Untuk itu, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) pada 4 Agustus 2020 mendatangi Mapolda Jatim.

Di hadapan Kapolda Jatim, Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan mengungkapkan bahwa kinerja Polri khususnya di Polda Jawa Timur dalam menghadapi pandemi Covid19, sangat baik, terlebih adanya Kampung Tangguh Semeru. Lemkapi telah mengamati pelaksanaan Kampung Tangguh Semeru di berbagai Polres jajaran Polda Jatim pada bulan Mei, Juni, Juli, dan hasilnya sangat baik.



Polri hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu, menolong di saat pandemi Covid-19.

“Kami bangga sekali melihat kinerja Polri saat ini, Polri dalam bekerja sudah semakin profesional. Serta semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat yang semakin baik,” kata Edi.

Banyak masyarakat memberikan apresiasi yang dilakukan oleh Polri terutama anggota Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Bhabinkamtibmas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat serta memberikan obat-obatan dan menjadi pelayan masyarakat. Tentunya itu akan membuat rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di tengah pandemi Covi-19.

Dalam tiga bulan terakhir Lemkapi telah melakukan penelitian kepada masyarakat terkait pelayanan Polda Jatim kepada masyarakat. Hasilnya respons masyarakat cukup baik. Hal ini tak lepas hadirnya Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat yang merupakan pahlawan.

Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang baik itu, Lemkapi secara khusus memberikan Piagam kepada 39 anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polda Jatim. Kapolda Jatim Irjen Pol. Fadil Imran turun langsung memberikan penghargaan kepada ke-39 Bhabinkamtibmas yang berjuang keras dalam menekan penyebaran Covid-19. Termasuk juga memberikan penghargaan kepada 19 Anggota Polri yang berprestasi.

“Hari ini khusus saya persembahkan untuk Anggota Bhabinkamtibmas, serta saya berikan apresiasi penghargaan untuk menjadi motivasi anggota yang lain dalam melayani, melindungi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini,” kata Irjen Pol Fadil Imran di Gedung Mahameru Mapolda Jawa Timur.

Kapolda secara khusus juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kakorbinmas yang sangat perhatian kepada pembinaan Bhabinkamtibmas, khususnya kampung tangguh. Di kesempatan itu, Fadil Imran berpesan agar semua anggota memiliki komitmen bersama untuk menjaga organisasi Polri dengan mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi dan kelompok.

Kampung Tangguh Semeru bukan hanya sebagai aman dari Covid-19, namun juga menjadi kampung bebas dari narkoba maupun kriminalitas, terlebih saat dilakukan pilkada serentak pada tahun 2020.



Keberhasilan Program Kampung Semeru (KTS) yang digagas Polda Jatim banyak melahirkan inovasi, terobosan baru, dan pemberian bantuan sosial mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Salah satu inovasi dan terobosan yang banyak diapresiasi publik adalah Posko Digital Covid-19 bernama Delta Trisula Polres Sidoarjo.

Selama ini polisi setempat juga aktif melakukan *testing, tracing*, serta *treatment* (3T) dalam rangka melindungi dan menjaga masyarakat dari Covid-19. Selain itu, Polres promoter ini banyak memberikan bantuan sosial dan menggelorakan protokol kesehatan dengan melakukan operasi yustisi menyeluruh dengan hasil yang memuaskan.

Hasil pengamatan Lemkapi selama bulan Agustus-September, kinerja Polresta Sidoarjo banyak melakukan inovasi dan terobosan baru. Atas kinerja tersebut, Lemkapi memberikan penghargaan Promoter Reward saat apel pagi di Polresta Sidoarjo, Senin 19 Oktober 2020 Penghargaan tersebut diberikan langsung Direktur Eksekutif Lemkapi Dr. Edi Saputra Hasibuan dan diterima Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji.

Selama dua bulan lebih Lemkapi melakukan penelitian dan pemantauan di wilayah Polda Jatim, termasuk Polresta Sidoarjo, Edi salut dan mengapresiasi tinggi atas dedikasi dan loyalitas Polresta Sidoarjo serta jajarannya yang siang malam tak pernah henti berusaha keras mencegah penyebaran Covid-19 di wilayahnya.

Karenanya, Lemkapi menilai inovasi Polresta Sidoarjo di bawah komando Kombes Pol Sumardji sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Inovasi ini termasuk implementasi penguatan Promoter Kapolri dalam mewujudkan Harkamtibmas yang mantab, kondusif, juga didukung SDM unggul.





Polda Jawa Tengah mendapatkan penghargaan Promoter Reward dari Lemkapi. Penghargaan ini diserahkan Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Saputra Hasibuan kepada Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.,M.K., di lobby Mapolda Jateng, Kamis 27 Agustus 2020.

Sumber: Dok Lemkapi

Inovasi Kampung Siaga Candi Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) terbukti banyak membantu ketahanan masyarakat sekaligus dapat menekan penyebaran Covid-19. Disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan semakin baik, yang pada akhirnya dapat menekan penyebaran Covid-19.

Konsep Kampung Siaga Candi adalah pemberdayaan masyarakat. Polisi dalam pelaksanaannya berfungsi sebagai fasilitator, sedangkan eksektor di lapangan adalah masyarakat. Artinya, Kampung Siaga Candi dibentuk oleh masyarakat, untuk masyarakat, dan dilaksanakan oleh masyarakat. Para Babinsa, Kasat Bimnas, jajaran Polres, setiap hari turun ke lapangan untuk memberikan fasilitator sehingga masyarakat tergerak untuk menjadi dirinya sendiri dalam rangka memerangi pandemi Covid-19.

Kampung Siaga Covid-19 merupakan percontohan yang bisa diterapkan di mana saja dengan memberdayakan potensi masyarakat dan solidaritas sosial. Berbagai pihak yang terlibat, terutama masyarakat, mampu melaksanakan edukasi protokol kesehatan Covid-19 dan menciptakan *empathy building* dan *social bonding*.

Keberadaan Kampung Siaga Candi terbukti berhasil mencegah penyebaran Covid-19. Keberhasilan program Kampung Siaga Candi tidak lepas dari kerja keras jajaran Polda Jateng. Hasil survei Lembaga Kajian Strategi Kepolisian Indonesia (Lemkapi), sebanyak 83,4% masyarakat puas dengan kinerja Polda Jateng dalam penanganan Covid-19, melalui pembentukan Kampung Siaga Candi.

Atas capaian itu, Lemkapi memberikan penghargaan Promoter Reward kepada Polda Jateng. Penghargaan ini diserahkan oleh Direktur Eksekutif Lemkapi Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H. yang diterima langsung oleh Kapolda Jateng Irjen Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.,M.K., di lobi Mapolda Jateng, pada Kamis, 27 Agustus 2020.

“Polda Jateng merupakan Polda yang *promoter* dan suatu kebanggaan bagi kami untuk dapat memberikan penghargaan, Promoter Reward,” kata Edi Hasibuan dalam sambutannya saat acara penyerahan Promoter Reward.

Penghargaan ini tentu suatu kebanggaan bagi Polda Jateng di mana termasuk salah satu kepolisian daerah yang mendapatkan Promoter Reward. Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi mempersembahkan Promoter Reward ini untuk Bhabinkamtibmas selaku ujung tombak Kampung Tangguh Candi di lapangan.

“Bhabinkamtibmas menjadi fasilitator dalam pembentukan kampung siaga di wilayah Jateng. Terima kasih atas apresiasi dari Lemkapi, dan ini sebagai motivasi kami untuk lebih lagi dalam memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” kata Kapolda Jateng dalam sambutannya.

Dalam menjalankan program Kampung Siaga Candi, Polda Jateng membentuk Bhabinkamtibmas Candi, yang bertujuan menjalin sinergi Polri dan masyarakat dalam rangka menciptakan situasi yang aman dan kondusif, serta untuk menekan penyebaran Covid-19. Bhabinkamtibmas menjadi fasilitator dalam pembentukan Kampung Siaga di wilayah Jateng.

CANDI yang dijadikan jargon ini adalah sebuah singkatan dari kemampuan yang harus dimiliki personal Bhabinkamtibmas Jawa Tengah, yaitu Cerdas, Agamis, Negosiator, Dedikasi, dan Inovasi. Tujuan Kapolda membentuk Bhabinkamtibmas Candi adalah untuk memberikan identitas kepada Bhabinkamtibmas agar lebih dikenal



oleh masyarakat. Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak yang mengemban tugas khusus.

Bhabinkamtibmas Candi diluncurkan di Desa Nglinggi, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, pada 27 Juli 2020, bersamaan dengan Penilaian Kampung Siaga Candi yang dilakukan oleh tim Polda Jateng. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menuju Adaptasi Kebiasaan Baru untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Peluncuran Bhabinkamtibmas Candi dihadiri Kapolres Klaten AKBP Edy Suranta Sitepu S.I.K., M.H, Dandim 0723/Klaten Letkol Kav Minarso S.I.P, Sekda Kabupaten Klaten Drs. Jaka Sawaldi, M.M., PJU Polres Klaten serta tim penilai yang dipimpin oleh Kabag Binopsnal Bimas Polda Jateng, AKBP Suwanto.

Kegiatan diawali dengan seremonial pemasangan helm dan ransel oleh tim Polda Jateng dan Forkompinda Kabupaten Klaten, kepada perwakilan Bhabinkamtibmas di Balai Desa Nglinggi. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan mengunjungi Kampung Pokoh untuk dilakukan penilaian.



Kapolda Sumsel Irjen Pol. Prof. Dr. Eko Indra Heri S. M.M., menerima penghargaan Promoter Award dari Direktur Lemkapi, Edi Saputra Hasibuan, atas inovasi Gerai SDM Mang PeDeKa One Stop Service Polda Sumsel, di Gedung Promoter, Jumat 20 November 2020.

Sumber: sumeks.co

Inovasi aplikasi Gerai SDM yang digagas Biro SDM Polda Sumatera Selatan (Sumsel) dalam rangka melayani masyarakat dan pengembangan karier personel, mendapat apresiasi publik. Aplikasi Gerai SDM diluncurkan pada tanggal 12 November 2020 oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol. Prof. Dr. Eko Indra Heri S. M.M., didampingi Wakapolda Sumsel Brigjen Pol. Rudi Setiawan Sik S.H., M.H. dan PJU Polda Sumsel. Aplikasi Gerai SDM Mang PeDeKa One Stop Service adalah pelayanan terintegrasi bidang SDM meliputi pelayanan Dalpers, Binkar, Watpers dan Psikologi serta pengiriman surat ke Subbagrenmin Ro SDM.

Adapun alur kerjanya adalah para personel yang memohon pelayanan bid SDM mengakses Aplikasi Gerai SDM melalui android dan setelah diproses oleh operator maka pers akan dikirimkan email berisi QRCode untuk ditukarkan dengan berkas atau produk hasil pengajuan di Ruang Gerai SDM setiap hari kerja mulai pukul 08.00 WIB – 14.30 WIB.

Dengan adanya aplikasi gerai SDM ini memudahkan pelayanan kepada anggota dan PNS Polri untuk mencari data dan Anev personel membangun sistem atau aplikasi yang bagus.

Sebelum adanya aplikasi ini semuanya manual dan kesulitan dalam mencari data personel. Atas inovasi ini, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) mendatangi Polda Sumatera Selatan (Sumsel) di Palembang pada tanggal 20 November 2020. Kedatangan Lemkapi untuk menyerahkan penghargaan Public Trust atas kinerja Polda Sumsel yang banyak melakukan inovasi dan terobosan sehingga banyak meraih kepercayaan masyarakat.

Penghargaan Public Trust diserahkan Direktur Lemkapi Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H. dan diterima Kepala Bagian (Kabag) Pembinaan dan Karier (Binkar) AKBP Rifaldi serta disaksikan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Prof. Dr. Eko Indra Heri M.M. Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H. mengatakan begitu banyak perubahan dan inovasi semenjak kepemimpinan Kapolda Sumsel Irjen Pol. Prof. Dr. Eko Indra Heri S. M.M. Mulai dari pembangunan sarana prasarana fasilitas hunian asrama, kantor di satuan wilayah dan sangat bermanfaat bagi anggota dalam melayani masyarakat.

Di samping itu, juga dalam sistem proses rekrutmen Calon Anggota Polri TA 2020, baik Bintara, Akpol dan Sipss apresiasi atas penerapan



prinsip BETAH, CLEAR, dan CLEAN. Kapolda Sumsel Irjen Pol. Prof. Dr. Eko Indra Heri S. M.M. menyebutkan, kinerja hebat Polda Sumatera Selatan ini merupakan implementasi salah satu Program Prioritas Kapolri untuk mewujudkan SDM Unggul yang profesional dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Dengan adanya Inovasi Gerai SDM Mang PeDeKa One Stop Service Polda Sumsel dan juga penerapan Prinsip BETAH dalam Proses Penerimaan Calon Anggota Polri TA. 2020, membuat Polda Sumsel semakin dipercaya oleh masyarakat. Dengan inovasi baru ini sudah barang tentu masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi soal penerimaan calon anggota Polri dari tahun ke tahun. Secara bersamaan seluruh personel dengan mudah mengakses segala kebutuhan dalam pelayanan bagian Dalpers, Binkar dan bagian Watpers.

Kapolda Sumsel mengucapkan terima kasih kepada Lemkapi yang telah memberikan apresiasi atas kerja Polda Sumsel serta dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam membuat Inovasi Gerai SDM Mang PeDeKa One Stop Service Polda Sumsel dan juga mengapresiasi atas penerapan Prinsip BETAH dalam Proses Penerimaan Calon Anggota Polri TA. 2020 sehingga Polda Sumsel semakin dipercaya oleh Masyarakat (“Polda Sumsel Berhasil Raih Penghargaan dari Lemkapi Atas Inovasi Aplikasi Gerai SDM Mang PeDeKa One Stop Service”, diakses pada).

Pada bulan Mei 2020, Lemkapi juga memberikan piagam penghargaan Promoter Award kepada Polda Sumsel atas keberhasilan mengungkap sindikat narkoba internasional yang dikendalikan bandar kelas kakap asal Jatim bernama Nazwar alias Leto. Leto dan delapan rekan akhirnya divonis mati oleh majelis hakim. “Vonis mati seperti Leto dan ke-8 rekannya, menjadi yang pertama kalinya di Indonesia. Makanya kami apresiasi,” ujar Edi Hasibuan.

Tiga piagam Promoter Reward masing-masing diberikan kepada Kapolda Sumsel saat itu, Irjen Pol. Zulkarnain Adinegara, Direktur Reserse Narkoba Kombes Pol. Farman, dan Wadir Reserse Narkoba AKBP Amazona Pelamonia. Lemkapi menilai kinerja Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel juga luar biasa, di mana bisa menjerat Leto cs dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Selama ini tidak mudah menjerat pemain narkoba dengan UU TPPU sebab ada usaha pihak-pihak yang berusaha menghalangi, namun Polda Sumsel membuktikannya bisa.

Catatan untuk Penulis
Pak, bisa cantumkan link lengkap dan tanggal akses untuk sumber dari Internet ini?

“Polda Sumsel mampu meyakinkan Jaksa dan Hakim untuk beri hukuman berat pada pemain narkoba. Artinya, sinergisitas kuat dan punya komitmen yang sama,” tukasnya. Promoter Award yang diberikannya selain sebagai apresiasi juga sebagai wujud kebanggaan pada Polda Sumsel yang mampu melindungi masyarakat Sumsel dari bahaya narkoba. Dalam menghadapi pandemi Covid-19, Inovasi Kampung Tangguh Polda Sumsel juga mendapat pujian dari Presiden Jokowi, karena dinilai sebagai salah satu yang terbaik dalam menangani Covid-19.

Atas kinerja hebat tersebut, Lemkapi kembali memberikan apresiasi sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada Polri yang sudah melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat dengan baik. Lemkapi menyerahkan Penghargaan Promoter Reward kepada Kapolda Sumsel Irjen Pol. Prof. Eko Indra Heri pada Kamis 9 Juli 2020.

Hasil pemantauan Lemkapi, Polda Sumsel selama ini sudah banyak melakukan inovasi dalam upaya melindungi dan menolong masyarakat dari penyebaran Covid-19. Adapun sejumlah inovasi Polda Sumsel yang banyak menarik perhatian masyarakat antara lain pembentukan Kampung Tangkal lewat program Bhabinkamtibmas Ditbimas Polda dengan membangun 670 posko Covid-19 yang tersebar di Sumsel.

Kemudian, peduli karhutla, pilkada yang aman, dan pemberian bantuan sosial yang terus menerus kepada masyarakat. Inovasi hebat dengan ujung tombak Bhabinkamtibmas ini bahkan mendapat apresiasi dari Presiden Jokowi. Mendapat apresiasi dari Lemkapi, Kapolda Sumsel menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan masyarakat. “Kami akan semakin terpacu meningkatkan kinerja untuk melayani masyarakat,”tukasnya.





Kapolda NTB Irjen Pol. M. Iqbal menerima penghargaan Promoter Reward dari Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Saputra Hasibuan di Halaman Lapangan Tenis Polda NTB, Ampenan, Kota Mataram, Selasa 8 September 2020.

Sumber: Dok Lemkapi

Selama pandemi Covid-19, jajaran Polri tidak henti menghadirkan inovasi. Berbagai terobosan dilakukan Polri sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, (Polda NTB) di bawah komando Kapolda Irjen Pol. Mohammad Iqbal menginisiasi Kampung Sehat.

Inovasi Kampung Sehat merupakan salah satu turunan program Kampung Tangguh Nusantara yang menjadi satu kesatuan dengan terwujudnya ketahanan pangan. Kata 'sehat' merupakan singkatan dari steril, ekonomi produktif, harmonis, asri. Sementara itu, tangguh, menjadi modal utama masyarakat NTB menghadapi pandemi Covid-19.

Ketahanan pangan menjadi salah satu andalan masyarakat dalam mewujudkan ekonomi yang produktif. Geliat ekonomi masyarakat seiring dan sejalan dengan upaya melawan pandemi Covid-19.

Program Kampung Sehat yang diinisiasi oleh Polda NTB dilaksanakan secara bersama Pemerintah Provinsi, serta Korem 162/WB yang berlangsung di setiap desa/kelurahan. Kehadiran Kampung

Sehat telah membawa pengaruh besar dalam penanganan Covid-19 di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Atas inovasi itu, Lemkapi menyerahkan Promoter Reward kepada Polda NTB, Pemprov NTB, dan Korem 162/WB, atas keberhasilan program tersebut dalam penanganan pandemi Covid-19. Acara penyerahan penghargaan bertempat di Lapangan Tenis Mapolda NTB Kota Mataram, Selasa, 8 September 2020.

Direktur Eksekutif Lemkapi, Dr. Edi Saputra Hasibuan, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Polda NTB, Pemprov NTB, dan Korem 162/WB karena sudah memberikan pelayanan serta pengabdian yang terbaik kepada masyarakat. Dengan demikian, apa yang menjadi program dari Kampung Sehat dalam penanganan Covid-19 begitu mendapatkan tempat di hati masyarakat.

Penghargaan Lemkapi muncul berdasarkan hasil survei dan penelitian yang dilaksanakan selama satu bulan di NTB. Dari 350 responden yang dipilih secara acak, membuahkan hasil 83,7% tingkat kepuasan masyarakat terhadap program Kampung Sehat. Nilai persentase yang dicapai ini adalah nilai yang sangat bagus dalam sebuah survei.

Kebersamaan seluruh *stakeholder* di NTB yang terjalin dengan baik adalah salah satu kunci utama keberhasilan program Kampung Sehat. Agar Program Kampung Sehat semakin melekat di tengah masyarakat, Kapolda NTB menggagas perlombaan Kampung Sehat Nurut Tatanan Baru.

Polda NTB sengaja mendesain program Kampung Sehat dalam bentuk lomba, karena lomba adalah metode terbaik untuk mengajak masyarakat terlibat aktif dalam upaya-upaya melawan Covid-19. Program intervensi terhadap Covid-19 sebaik apa pun, tidak akan berhasil tanpa partisipasi masyarakat.

Setiap daerah di NTB memiliki kultur serta karakter masing-masing. Sehingga tiap desa memiliki cara masing-masing dalam mencegah terjadinya penularan corona di lingkungan mereka. Ajang perlombaan Kampung Sehat diselenggarakan Polda NTB bekerja sama



dengan pemerintah dan TNI. Perlombaan digelar sejak 19 Juni hingga 9 November 2020, yang diikuti oleh 995 desa dan 143 kelurahan di NTB.

Pada ajang ini, Polda NTB mengumumkan peraih penghargaan sejumlah kategori yang dinilai oleh tim juri dari kalangan akademisi ternama di NTB. Mereka yang mendapatkan penghargaan, diberikan trofi dalam bentuk piala bertanda tangan Kapolri, dan dana pembinaan, serta kendaraan.

Pemenang juara pertama dari kategori Desa Kampung Sehat diberikan kepada Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Desa ini terpilih sebagai pemenang karena dinilai telah mengimplementasikan sebuah sistem yang dapat menghidupkan roda perekonomian warga secara mandiri. Begitu juga dalam membangun kehidupan sosial masyarakatnya terkait penerapan pola pengamanan dan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri yang saat itu dijabat Komjen Pol. Agus Andrianto menghadiri langsung acara Kampung Sehat Awards NTB di Senggigi, Lombok Barat, NTB, pada tanggal 9 November 2020. Kabaharkam Polri Komjen Pol. Agus Andrianto menilai program Kampung Sehat Nurut Tatanan Baru merupakan sebuah gagasan yang sangat luar biasa.

Gagasan ini merupakan bentuk dukungan yang sangat luar biasa dari Kapolda NTB terhadap kebijakan Kapolri dalam mengatasi dampak Covid-19. Kabaharkam mengapresiasi kerja sama tingkat daerah yang dibangun dengan pihak pemerintah dan juga TNI. Program ini tidak akan terwujud tanpa dukungan seluruh pihak di luar Polri, mulai dari Gubernur NTB, Danrem 162/Wira Bhakti, dan seluruh jajarannya hingga ke tingkat desa dan kelurahan.





Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rikwanto didampingi Direktur Lalu Lintas Kombes Pol. Maesa Soeagriwo menerima anugerah Trust Award dari Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Saputra Hasibuan, Kamis 11 Februari 2021.

Sumber: ANTARA/Firman

Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) di bawah pimpinan Irjen Pol. Rikwanto telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam rangka terwujudnya Polri yang Presisi (Prediktif, Resposibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). Beragam terobosan dan inovasi baru dibuat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sejak tahun 2019, Ditlantas Polda Kalimantan Selatan terus berbenah. Berbekal empat program unggulan terbarunya, satuan kerja Ditlantas Polda Kalsel ingin menuju zona integritas berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Terdapat empat inovasi terbaru yang menjadi program unggulan Ditlantas Polda Kalsel, yaitu *pertama*, *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau tilang elektronik berupa penegakan hukum berbasis IT. ETLE selangkah lebih maju daripada elektronik tilang biasa. Jadi, tanpa ada petugas di lapangan, pelanggar dapat ditindak melalui kamera canggih yang terpasang di lampu lalu lintas untuk merekam setiap pelanggaran yang terjadi.



Inovasi *kedua*, yaitu Salamatakan Kanakan Banua (SKB) yang merupakan program edukasi untuk anak di bawah umur agar tak mengemudi kendaraan. Setiap anak yang terjaring razia, akan diterapkan penegakan hukum komprehensif. Orang tua dan Wali Kelas dipanggil serta wajib membawa surat rekomendasi dari Kepala Sekolah untuk membuat surat pernyataan tak lagi mengulangi perbuatannya.

Selanjutnya, *ketiga*, Delivery Barang Bukti (DBB), yakni barang bukti seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang disita ketika razia akan diantarkan ke rumah yang bersangkutan. Inovasi yang *keempat* dinamakan Ditlantas mobile. Inovasi Ditlantas Mobile merupakan sebuah aplikasi *online* berbasis mobile yang memiliki fitur utama untuk pelayanan registrasi data kendaraan secara *online*. Melalui aplikasi ini pendaftaran kendaraan yang masuk ke daerah Kalimantan Selatan bisa dilakukan dengan lebih mudah. Aplikasi ini dilengkapi pendaftaran BPKB, cetak antrean, pengambilan nomor antrian, QR Code, info proses hingga info ranmor dan pajak.

Aplikasi unggulan Ditlantas Mobile membuat pelayanan semakin mudah dan cepat serta sistem daring, sehingga memperkecil interaksi petugas dan masyarakat secara langsung dalam upaya pencegahan penularan Covid-19. Aplikasi ini bisa diunduh melalui Playstore atau App Store. Dalam aplikasi tersebut, masyarakat bisa memilih menu atau fitur-fitur yang mempermudah pelayanan.

Meskipun masa pandemi Covid-19, tidak menyurutkan semangat jajaran Ditlantas Polda Kalsel untuk menyempurnakan aplikasi Ditlantas Mobile. Aplikasi ini terus disempurnakan hingga diluncurkan kembali pada saat Syukuran Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-65 tahun 2020 yang digelar di Aula Bhayangkari Mathilda Batlayeri Polda Kalsel, tanggal 22 September 2021.

Dirlantas Polda Kalsel Kombes Pol. Andi Azis Nizar, S.I.K., M.H. dalam sambutan menyampaikan sepanjang 65 tahun pengabdian Polisi Lalu Lintas (Polantas) telah banyak berperan dalam mewujudkan Kamseltibcar Lantas di berbagai pelosok Indonesia. Menurut Dirlantas, fungsi lalu lintas menjadi salah satu fungsi kepolisian yang tidak pernah

berhenti berinovasi dalam menciptakan layanan berbasis IT guna mempermudah masyarakat.

Ia lalu menyampaikan prestasi yang telah ditorehkan oleh Ditlantas Polda Kalsel dalam kurun satu tahun terakhir meliputi mengamankan Haul Akbar Guru Sekumpul, Aplikasi Samolnas (Samsat *Online Nasional*), Aplikasi E-Samsat, Aplikasi ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*), serta berhasil menyempurnakan aplikasi Ditlantas Mobile yang telah diluncurkan satu tahun lalu.

Penyempurnaan Aplikasi Ditlantas Mobile ini dapat menjadi kado di Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-65 tahun 2020 yang bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah berinteraksi dengan kepolisian khususnya Ditlantas Polda Kalsel. Atas inovasi ini, Direktorat Lalu Lintas Polda Kalsel mendapat telegram Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis bernomor ST/2754/IXHUK6.6/2020 tertanggal 23 September 2020.

Dalam surat kilat itu, jajaran Direktorat Polda Kalsel disebutkan meraih gelar terbaik lomba Inovasi Pelayanan STNK dan BPKB di Era Adaptasi Kebiasaan Baru untuk zona B. Polda Kalsel mendapatkan predikat juara nasional untuk kategori pelayanan publik dari Korlantas Polri tahun 2020. Kategori pertama yang dimenangkan yaitu pelayanan permohonan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada Kantor Samsat. Kategori kedua pelayanan pada permohonan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Sementara itu, dua kategori lain, yakni pelayanan SIM dan kategori material bahan dokumen surat kendaraan dimenangkan Polda lain.

Polda Kalsel punya aplikasi unggulan Ditlantas Mobile yang membuat pelayanan semakin mudah dan cepat serta daring, sehingga memperkecil interaksi petugas dan masyarakat secara langsung dalam upaya pencegahan penularan Covid-19.

Ditlantas Polda Kalsel senantias terus menyempurnakan aplikasi Ditlantas Mobile dengan beragam fitur tambahan, di antaranya SP2HP Lantas, yaitu fitur memudahkan masyarakat memantau perkembangan hasil penyidikan tanpa harus ke daerah kejadian kecelakaan lalu lintas. Kemudian, Layanan PJR yang berfungsi apabila masyarakat



membutuhkan pengawalan dan pengaturan. Selanjutnya antrian Samsat, fitur yang memudahkan masyarakat melakukan registrasi tanpa perlu mengantre lama. Terakhir ada fitur pengaduan sebagai wadah masyarakat berkeluh kesah atas pelayanan di Ditlantas Polda Kalsel.

Menciptakan aplikasi untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kepolisian ini menjadi atensi Kapolda Kalsel Irjen Pol. Nico Afinta dengan senantiasa dibimbing Direktur Lalu Lintas Polda Kalsel Kombes Pol. Andi Azis Nizar. Atas prestasi itu, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) mendatangi Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin pada tanggal 11 Februari 2021. Kedatangan Lemkapi untuk menyerahkan penghargaan Trust Award kepada Polda Kalsel yang berlangsung di ruang kerja Kapolda Kalsel Irjen Pol. Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum. Turut mendampingi Kapolda Rikwanto, Dirlantas Polda Kalsel, Kombes Pol. Maesa Soegriwo, S.I.K.

Direktur Eksekutif Lemkapi Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H. mengungkapkan bahwa pelayanan di Polda Kalsel, termasuk Direktorat Lalu Lintas, sudah sangat bagus dengan beragam inovasi dan terobosannya, sehingga Trust Award Lemkapi tahun ini anugerahkan kepada Polda Kalimantan Selatan. Mendapat penghargaan ini, Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rikwanto mengucapkan terima kasih kepada Lemkapi atas penilaiannya hingga memberikan penghargaan untuk pelayanan di Polda Kalsel. Penghargaan yang diberikan bagi jajarannya sebagai pendorong semangat untuk terus membuat terobosan dan inovasi bagi Polri khususnya Polda Kalsel.

“Saya berpesan kepada seluruh bidang pelayanan di Polda Kalsel dan jajaran untuk bisa terus berinovasi. Karena dunia ini bergerak terus. Jika tak ada terobosan, kita bakal ketinggalan. Masyarakat butuh pelayanan yang cepat, transparan dan pastinya nyaman tanpa berbelit-belit,” pesan Kapolda.





Kapolda Sumut diwakili Dirresnarkoba Polda Sumut Kombes Pol. C. Wisnu Adji P. S.I.K., M.H. menerima piagam penghargaan Trust Award dari Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Saputra Hasibuan, Kamis 7 Januari 2020.

Sumber: Dok Lemkapi

Kinerja Polda Sumut dalam pemberantasan narkoba sepanjang tahun 2020 mendapat apresiasi publik. Penanganan kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan Polda Sumut dan jajarannya menunjukkan hasil semakin baik yang berdasarkan hasil survei Lemkapi telah mencapai 82,6 %. Sepanjang tahun 2020, Polda Sumut berhasil menyita 850 kg sabu dan menindak 19 tersangka dengan tegas dan terukur.

Berdasarkan catatan Lemkapi, selama tahun 2020 lebih dari 850 kg sabu senilai sekitar Rp1 triliun berhasil disita jajaran Polda Sumut. Dari jumlah kasus itu, Polda Sumut menindak 19 tersangka dengan tegas dan terukur. Atas prestasi dan dedikasi yang tinggi itu, Polda Sumut dinobatkan sebagai salah satu Polda terbaik dalam menangani narkoba.

Melihat keberhasilan tersebut, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) memberikan penghargaan kepercayaan Trust Award. Lemkapi mendatangi markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut) di Kota Medan, Kamis 7 Januari 2021. Piagam penghargaan Trust Award diserahkan Direktur Eksekutif Lemkapi



Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H, M.H. kepada Kapolda Sumut diwakili Dirresnarkoba Polda Sumut Kombes Pol. C. Wisnu Adji P. S.I.K., M.H.

Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Dit. Resnarkoba Polda Sumut ini turut dihadiri oleh Irwasda Polda Sumut, PJU Polda Sumut, Direktur Eksekutif Lemkapi Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H, M.H.; Sekjen Leily Anny Daulay, S.E.; Koordinator Analisis dan Riset, U. Jaka Suryana, S.H., M.H.; Staf Administrasi Umum, Ibu Syarifah Daulah, beserta anggota Lemkapi.

Lemkapi melihat komitmen Kapolda Sumut yang saat itu dijabat Irjen Pol. Martuani Sormin sangat jelas dan tegas. Kapolda tidak pernah ragu menindak pelaku narkoba yang sudah meresahkan masyarakat demi melindungi masyarakat. Selain menyerahkan secara khusus kepada Kapolda, Lemkapi juga menyerahkan penghargaan kepada Direktorat Narkoba Polda Sumut.

“Kami datang ke sini untuk menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kinerjanya luar biasa. Kinerja bapak/ibu semua banyak dipuji masyarakat,” kata pakar hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta ini di hadapan para perwira Direktorat Narkoba Polda Sumut.

Lemkapi berharap penghargaan tersebut bisa memberikan motivasi kepada seluruh jajaran Polri untuk terus meningkatkan penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.

Prestasi yang ditorehkan dalam menanggulangi peredaran narkotika tentu berkat kerja keras personel Polda Sumut dan jajarani. Sejak menjabat Kapolda Sumut menggantikan Irjen Pol. Agus Andrianto pada 16 Desember 2019, Irjen Pol. Martuani Sormin memang berkomitmen untuk berperang melawan narkotika sesuai dengan slogannya “tidak ada tempat bagi penjahat di Sumut”. Apalagi narkoba yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental serta menghancurkan generasi penerus bangsa.

Irjen Pol. Martuani Sormin saat konferensi pers di Mako Brimob Polda Sumut, Jalan KH Wahid Hasyim, Medan, **Rabu 30 Desember 2020 16** mengakui selama menjabat sebagai Kapolda Sumut, tantangan terbesar adalah memberantas para pelaku tindak pidana narkotika.

Pertanyaan untuk Penulis
ini maksudnya apa ya yg angka 16 pak? tahun 2020 apa 2016?

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi maraknya peredaran narkoba di Sumut, yakni letak geografis Sumut yang sangat ideal untuk lintasan perdagangan narkoba. Mulai di pantai timur, perbatasan Aceh Timur sampai di perbatasan Riau, Rokan Hilir. Luas dan panjangnya garis pantai juga menyulitkan di dalam penindakan kejahatan narkoba. Kemudian, menggunakan jalur darat lintasan dari Aceh untuk ke tempat lain.

Faktor lainnya, yakni modus yang digunakan para pengedar narkoba serta jaringan peredaran yang bersifat rapi atau dikenal dengan istilah jaringan terputus. Kemudian, para orang tua dari keluarga korban penyalahgunaan narkoba belum memiliki kesadaran untuk melaporkan tentang putra-putrinya yang menjadi korban tentang penyalahgunaan narkoba. Bahkan orang tua menyadari bahwa ini adalah aib, jadi diam-diam saja tidak diobati, padahal korban penyalahgunaan narkoba harus direhabilitasi.

Trust Award Polda Sultra

Selama pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), salah satu unsur kepolisian yang memiliki peran cukup penting di tengah masyarakat, yakni tim khusus (timsus) pemulasaran dan pemakaman jenazah pasien Covid-19. Peran itu juga dilakukan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang selama pandemi banyak mengambil peran membantu masyarakat dalam proses pemulasaran dan pemakaman jenazah pasien Covid-19.

Kinerja Timsus Pemulasaran Polda Sultra ini mendapat apresiasi dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) dengan memberikan penghargaan Trust Award. Pada tanggal 18 Februari 2021. Lemkapi datang untuk menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih mewakili masyarakat atas dedikasi dan loyalitasnya, khususnya kepada tim pemulasaran Polda Sultra. Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan menyerahkan langsung penghargaan Trust Award kepada Kapolda Sultra Irjen Pol. Yan Sultra di Mapolda Sultra, Kendari. Turut mendampingi pembina Lemkapi Brigjen Pol. (purn) Syafridi Cut Ali yang juga anggota Kopolnas 2012-2016, Brigjen TNI (purn) Andi Amrin, dan staf Lemkapi lainnya.



Lemkapi mencatat hingga Februari 2021 atau selama tahun pertama pandemi Covid-19, Polda Sultra dibantu petugas TNI telah memakamkan lebih dari 100 jenazah Covid-19. Selama ini Lemkapi rutin melihat dan memantau kinerja Polda Sultra dalam membantu korban Covid-19 dan hasilnya sangat baik. Polda Sultra bersama TNI juga banyak melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dan membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan saat Covid-19.

Lemkapi bangga melihat kinerja Polda Sultra dan seluruh jajaran Polri yang banyak hadir di tengah masyarakat dan menjadi penolong. Tindakan yang dilakukan Polda Sultra adalah implementasi Program Presisi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menuju Polri yang Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan.

Kapolda Sultra mengapresiasi penghargaan Trust Award yang diberikan Lemkapi. Kapolda menyampaikan ungkapan terima kasih atas penghargaan yang diberikan Lemkapi mewakili masyarakat kepada Polda Sultra. Penghargaan Trust Award memberikan motivasi kepada seluruh jajaran Polda Sultra untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Tugas mulia demi kemanusiaan selama pandemi Covid-19 selama ini cukup sering dilakukan Polda Sultra. Misalnya, pada Sabtu 18 April 2020, Pemakaman jenazah pasien positif Covid-19 yang meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas diambil alih oleh Polda Sultra melalui Rumah Sakit Bhayangkara.

Timsus Pemakaman Covid-19 Polda Sultra selanjutnya membantu proses pemakaman jenazah. Tim pemakaman yang terdiri dari anggota SatBrimob, Dit Samapta, beserta Bid Dokkes yang dikawal mobil patroli Dit Lantas Polda Sultra melaksanakan Pemakaman Jenazah Pasien Positif Covid-19 di Tempat Pemakaman Umum Punggolaka. Pasien Positif Covid-19 yang dimakamkan merupakan rujukan dari Rumah Sakit Santa Anna yang masuk ruang Isolasi RSUD Bahteramas pada hari Kamis 2 April 2020.

Identitas jenazah, yaitu seorang Purnawirawan Serma/Bripka yang berusia 75 tahun dan tinggal di Kabupaten Kendari Barat, Kota Kendari. Sebelum dimakamkan, jenazah terlebih dahulu menjalani prosesi pemakaman ala kepolisian. Peti jenazahnya dibungkus bendera merah putih, diarak dan diberikan penghormatan terakhir oleh 25 orang anggota kepolisian. Saat proses pemakaman, timsus tetap

memperbolehkan pihak keluarga ikut serta dengan memakai alat pelindung diri dan menjaga jarak. Semua proses dilalui sesuai syariat Islam, sejak dari rumah sakit.



Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Saputra Hasibuan saat menyerahkan penghargaan Trust Award kepada Kapolda Sultra Irjen Pol. Yan Sultra di Mapolda Sultra, Kendari, Kamis 18 Februari 2021.

Sumber: Dok Lemkapi



dummy

DAFTAR PUSTAKA

Catatan untuk Penulis

Pak, bisa cantumkan link lengkap dan tanggal akses untuk sumber dari Internet ini? yang berwarna merah muda blm ada sumbernya pak.

- Apriliana, Nur. “Polda Sumut Gagal Peredaran 850 Kilogram Sabu Sepanjang 2020”, diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/1920640/polda-sumut-gagal-peredaran-850-kilogram-sabu-sepanjang-2020> pada
- Azhari, Jimmy Ramadhan dan Bonfilio Mahendra W.L. “Polisi yang Menyerang Novel Baswedan Divonis 2 Tahun dan 1,5 Tahun Penjara”, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/07/16/21172121/polisi-yang-menyerang-novel-baswedan-divonis-2-tahun-dan-15-tahun-penjara?> pada
- Baihaqi, Amir. “Jumlah Kampung Tangguh di Jatim Akan Digenjot Hingga 7.043 Selama PPKM Mikro”, diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5367256/jumlah-kampung-tangguh-di-jatim-akan-digenjot-hingga-7043-selama-ppkm-mikro> pada
- Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. “Presiden Jokowi Lantik Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri” diakses dari <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-lantik-listyo-sigit-prabowo-sebagai-kapolri/pada>
- Budilaksono, Imam. “Idham Aziz sampaikan tujuh program prioritas Polri”, diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/1138528/idham-aziz-sampaikan-tujuh-program-prioritas-polri> pada

- CNN Indonesia. “Kabareskrim Listyo Sigit Janji Ungkap Kasus Novel Baswedan”, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191216104318-12-457306/kabareskrim-listyo-sigit-janji-ungkap-kasus-novel-baswedan> pada
- Dani, Subur. “Dirlantas Polda Aceh Terima Penghargaan dari Kakorlantas Polri”, diakses dari <https://aceh.tribunnews.com/2020/12/07/dirlantas-polda-aceh-terima-penghargaan-dari-kakorlantas-polri> pada
- Dewi, Anita Permata. “Upaya Polri lawan COVID-19 lewat inovasi Kampung Sehat”, diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/1568960/upaya-polri-lawan-covid-19-lewat-inovasi-kampung-sehat> pada
- Dirgantara, Adhyasta. “Kapolri Luncurkan Aplikasi Dumas Presisi untuk Wujudkan Transparansi”, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5435958/kapolri-luncurkan-aplikasi-dumas-presisi-untuk-wujudkan-transparansi> pada
- Faizal, Achmad. “Tak Perlu Besuk, Tahanan Polda Jatim Sekarang Bisa Video Call dengan Keluarga”, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2019/12/27/14491391/tak-perlu-besuk-tahanan-polda-jatim-sekarang-bisa-video-call-dengan-keluarga> pada
- Fajardin, Mohammad Atik. “Pengamat: ETLE Bisa Jadi Program Unggulan Polri Saat Ini dan Nanti”, diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/327062/14/pengamat-etle-bisa-jadi-program-unggulan-polri-saat-ini-dan-nanti-1612634551> pada
- Gazarin, Gardi. “Kapolda Metro: 4.708 Kecelakaan dan 483.302 Pelanggaran Lalu Lintas Selama Covid-19”, diakses dari <https://www.beritasatu.com/megapolitan/658575/kapolda-metro-4708-kecelakaan-dan-483302-pelanggaran-lalu-lintas-selama-covid19> pada
- Ginting, Fitriawan. “Polda Jatim Beri Award ke Anggota, Direktur Lemkapi: Masyarakat Puas dengan Kinerja Polri Tangani Covid-19”, diakses dari <https://pmjnews.com/article/detail/14410/polda-jatim-beri-award-ke-anggota-direktur-lemkapi-masyarakat-puas-dengan-kinerja-polri-tangani-covid-19> pada
- Gunadha, Reza dan Chyntia Sami Bhayangkara. “Komika Ini Kaget Dapat Surat Cinta dari Polisi, Begini Penampakkannya”, diakses dari

- <https://www.suara.com/news/2019/07/26/130211/komika-ini-kaget-dapat-surat-cinta-dari-polisi-begini-penampakkannya?l> pada Hariyanto, Pugh. “Ini Sederetan Pengungkapan Kasus Besar Bareskrim di Bawah Komando Listyo Sigit Prabowo”, diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/287020/14/ini-sederetan-pengungkapan-kasus-besar-bareskrim-di-bawah-komando-listyo-sigit-prabowo-1609473716> pada
- Hastuti, Endang Sri. ““Promoter”, singkatan dari profesional, modern, dan terpercaya”, diakses dari <https://endangshastuti.wordpress.com/jenderal-polisi-drs-h-m-tito-karnavian-ma-phd/pada>
- Humas Polri. “Aplikasi Sigap, Cara SPN Polda Metro Terapkan Belajar Mengajar di Masa AKB”, diakses dari <https://humas.polri.go.id/2020/08/12/aplikasi-sigap-cara-spn-polda-metro-terapkan-belajar-mengajar-di-masa-akb/pada>
- Humas Polri. “Kemenpan-RB Beri Penghargaan Predikat Pelayanan Prima Tahun 2020 ke-12 Polres”, diakses dari <https://humas.polri.go.id/download/kemenpan-rb-beri-penghargaan-predikat-pelayanan-prima-tahun-2020-ke-12-polres/pada>
- Humas Polri. “Tugas Perdana, Timsus Covid-19 Polda Sultra Kuburkan Jenazah Positif Corona”, diakses dari <https://humas.polri.go.id/2020/04/18/tugas-perdana-timsus-covid-19-polda-sultra-kuburkan-jenazah-positif-corona> pada
- Humas Polri. “Gubernur & Pangdam Saksikan Simulasi Aplikasi “Lembuswana” Polda Kaltim”, diakses dari <https://humas.polri.go.id/2021/03/23/gubernur-pangdam-saksikan-simulasi-aplikasi-lembuswana-polda-kaltim/> pada
- Humas Polda. “Polres Magelang Kota Canangkan Kriyan sebagai Kampung Siaga Candi”, diakses dari <https://tribratane.ws.jateng.polri.go.id/2020/07/14/polres-magelang-kota-canangkan-kriyan-sebagai-kampung-siaga-candi-2020> pada
- Kabar Banten. “Polda Banten Luncurkan Aplikasi E-Pendekar”, diakses dari <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/serang/pr-59619730/polda-banten-luncurkan-aplikasi-ependekar> pada
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. “Era Digital Layanan_Polri_Harus_Lebih_Inovatif_dan_Profesional”, diakses



dari https://www.setneg.go.id/baca/index/era_digital_layanan_polri_harus_lebih_inovatif_dan_profesional pada

Korlantas Polri. “Undang-Undang Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, diakses dari <https://korlantas.polri.go.id> pada

Korlantas Polri. “Tindak Lanjut Program Kapolri, Polda Jabar Segera Terapkan E-Tilang di Bandung dan Cirebon”, diakses dari <https://korlantas.polri.go.id/lalu-lintas/tindak-lanjut-program-kapolri-polda-jabar-segera-terapkan-e-tilang-di-bandung-dan-cirebon/> pada

Laraspati, Angga. “Terus Berinovasi dalam Layanan, Dirlantas Polda NTB Banjir Apresiasi”, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5275713/terus-berinovasi-dalam-layanan-dirlantas-poldantb-banjir-apresiasi> pada

Lazuardi, Glery. “Inovasi Korlantas Polri dalam Pelayanan Publik di Tengah Pandemi Diapresiasi Pakar dan Akademisi”, diakses dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/07/17/inovasi-korlantas-polri-dalam-pelayanan-publik-di-tengah-pandemi-diapresiasi-pakar-dan-akademisi> pada

Maharani, Tsarina. “Uji Calon Kapolri, Listyo Sigit Ingin Bangun Transformasi “Polri Presisi””, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/20/11060941/uji-calon-kapolri-listyo-sigit-ingin-bangun-transformasi-polri-presisi> pada

MB, Bernard. “Dit Reskrim Polda Bali Berkomitmen Siap Raih Predikat WBBM”, diakses dari <https://balitribune.co.id/content/dit-reskrim-polda-bali-berkomitmen-siap-raih-predikat-wbbm> pada

Maulana, Ferro. Visi Misi Komjen Sigit, Ketua DPR: Ada Semangat Transformasi di Tubuh Polri”, diakses dari <https://www.pmjnews.com/article/detail/25500/visi-misi-komjen-sigit-ketua-dpr-ada-semangat-transformasi-di-tubuh-polri> pada

Muhtarudin, Deni. “Menpan RB Sebut Inovasi Korlantas Polri Mudahkan Pelayanan kepada Masyarakat”, diakses dari <https://akurat.co/news/id-1168001-read-menpan-rb-sebut-inovasi-korlantas-polri-mudahkan-pelayanan-kepada-masyarakat> pada

Mursidin, Lao Ode. “Mantap, SMS Pengaduan Polda Papua Barat Terforwad Otomatis ke Pimpinan Polda”, diakses dari <https://www.>



- radarsorongnews.com/mantap-sms-pengaduan-polda-papua-barat-ter-forward-otomatis-ke-pimpinan-polda/pada
- ntmcpolri. “4 Program Unggulan Ditlantasi Polda Kalsel Menuju WBBM”, diakses dari <https://ntmcpolri.info/4-program-unggulan-ditlantasi-polda-kalsel-menuju-wbbm/pada>
- Nugraha, Muhammad Indra. “Surabaya Terapkan E-Tilang, Risma: Ada Kamera Tiap 15 Meter”, diakses dari <https://www.100kpj.com/mobil/4961-surabaya-terapkan-e-tilang-risma-ada-kamera-tiap-15-meter-pada>
- Nusabali. “Kapolda Resmikan Laboratorium PCR RS Bhayangkara”, diakses dari <https://www.nusabali.com/berita/89093/kapolda-resmikan-laboratorium-pcr-rs-bhayangkara-pada>
- Polri. “Polri Luncurkan SP2HP Online”, diakses dari <https://www.polri.go.id/layanan-sp2hp-pada>
- Polri. “Rekrutmen Personil Polri”, diakses dari <https://www.polri.go.id/rekrutmen-pada>
- Protal Berita Pemrov Jateng. “Dari Nglinggi Klaten, Kapolda Jateng Canangkan Ratusan Kampung Siaga Candi”, diakses dari <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/dari-nglinggi-klaten-kapolda-jateng-canangkan-ratusan-kampung-siaga-candi-pada>
- Pulungan, Thomas. “Makamkan Dua Jenazah COVID-19, Ditsamapta PMJ Kerahkan Tiga Polwan”, diakses dari <https://metro.sindonews.com/read/32659/170/makamkan-dua-jenazah-covid-19-ditsamapta-pmj-kerahkan-tiga-polwan-pada>
- Puspensos. “Kampung Tangguh; Strategi Perangi Corona Berbasis Partisipasi Masyarakat”, diakses dari <https://puspensos-dev.kemsos.go.id/kampung-tangguh-strategi-perangi-corona-berbasis-partisipasi-masyarakat-pada>
- Putera, Andri Donnal. “Indonesia Peringkat ke-9 dari 10 Negara Teraman di Dunia”, diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/17/142259826/indonesia-peringkat-ke-9-dari-10-negara-teraman-di-dunia-pada>
- Rahma, Andita. “Kapolri Klaim Program Promoter Tingkatkan Kepercayaan Publik”, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1223135/kapolri-klaim-program-promoter-tingkatkan-kepercayaan-publik-pada>



- Reporter Gpriority. “Inovasi Layanan Polri Saat Pandemi Corona”, diakses dari <https://gpriority.co.id/inovasi-layanan-polri-saat-pandemi-corona> pada
- Reporter Merdeka. “Kabaharkam Ungkap Peran Polri di Masa Pandemi Covid-19”, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/kabaharkam-ungkap-peran-polri-di-masa-pandemi-covid-19.html> pada
- Setiawan, Sakina Rakhma Diah. “Kapolri: Kepercayaan Publik terhadap Polri Tertinggi Sejak Reformasi”, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/11/11283051/kapolri-kepercayaan-publik-terhadap-polri-tertinggi-sejak-reformasi?/pada>
- Sugianto, Danang. “Imbas Virus Corona, Pemerintah Setop Penerbangan Indonesia-China Mulai Hari Ini”, diakses dari <https://travel.detik.com/travel-news/d-4886195/imbas-virus-corona-pemerintah-setop-penerbangan-indonesia-china-mulai-hari-ini> pada
- Sutiawan, Iwan. “Kapolda, Mars dan Jargon Pendekar Banten”, diakses dari <https://www.gatra.com/detail/news/502842/hukum/kapolda-mars-dan-jargon-pendekar-banten> pada
- Tajudin, Ahmad. “Ternyata Ada Filosofi dan Arti di Balik Program Pendekar Banten Irjen Rudy Heriyanto”, diakses dari <https://banten.tribunnews.com/2021/03/10/ternyata-ada-filosofi-dan-arti-di-balik-program-pendekar-banten-irjen-rudy-heriyanto> pada
- Tasturapost. “Beberapa Inovasi Bid Propam Polda NTB Bagian dari Program Prioritas Kapolri di Launching Kapolda NTB”, diakses dari <http://tasturapost.id/2021/02/03/beberapa-inovasi-bid-propam-polda-ntb-bagian-dari-program-prioritas-kapolri-di-launching-kapolda-ntb/pada>
- Tim detikcom. “Komjen Sigit: Tak Boleh Lagi Hukum Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas!”, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5341078/komjen-sigit-tak-boleh-lagi-hukum-tajam-ke-bawah-tumpul-ke-atas> pada
- Tim Sindonews. “Gubernur Sulsel Resmikan Balla Ewako di Tanralili Maros”, diakses dari <https://makassar.sindonews.com/read/97870/713/gubernur-sulsel-resmikan-balla-ewako-di-tanralili-maros-1594472869> pada

- Tim Sindonews. “Tekan Covid-19, Kapolri Apresiasi Kampung Tangguh Balla Ewako Sulsel”, diakses dari <https://makassar.sindonews.com/read/332388/710/tekan-covid-19-kapolri-apresiasi-kampung-tangguh-balla-ewako-sulsel-pada>
- Tribatanews. “Kapolda sampaikan 12 Program Kerja Untuk Layani Masyarakat Banten”, diakses dari <https://tribatanews.polri.go.id/read/4162/36/kapolda-sampaikan-12-program-kerja-untuk-layani-masyarakat-banten-1-pada>
- Tribatanews. “Polda Jatim Bangun Beragam Inovasi Guna Tingkatkan Layanan Masyarakat”, diakses dari <https://tribatanews.polri.go.id/read/5436/11/polda-jatim-bangun-beragam-inovasi-guna-tingkatkan-layanan-masyarakat-1614582185-pada>
- Wirasdipta, Made Ari, “Menjaga Kekokohan dan Kerukunan Umat, Kapolda Bali Tatap Muka Dengan Pemuka Agama”, diakses dari <https://balitribune.co.id/content/menjaga-kekokohan-dan-kerukunan-umat-kapolda-bali-tatap-muka-dengan-pemuka-agama-pada>
- Yusuf, Yan. “Uji Coba Tilang Elektronik Bikin Pengendara Lebih Waspada”, diakses dari <https://metro.sindonews.com/berita/1343668/170/uji-coba-tilang-elektronik-bikin-pengendara-lebih-waspada-pada>



dummy

BIODATA PENULIS



Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H., lahir 13 April 1968 di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Sejak tahun 1993, mulai bekerja sebagai pekerja jurnalistik di *Harian Pos Kota* dengan liputan khusus di bidang hukum dan kepolisian.

Profesi jurnalistik ini dikerjakan Edi Hasibuan nama panggilan Edi Saputra Hasibuan hingga tahun 2012. Pada bulan April 2012, Edi Hasibuan berhenti setelah dilantik Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) periode 2012–2016.

Begitu menyelesaikan tugas di Kopolnas, alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Jakarta ini lalu mendirikan Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi). Fokus lembaga ini membidangi kajian terhadap kinerja Polri, riset, dan memberikan motivasi dengan berbagai *reward* ke seluruh jajaran Polri hingga sekarang.

Setelah menyelesaikan pendidikan Magister Hukum (M.H.) di Universitas Bhayangkara Jakarta tahun 2014, Edi Hasibuan aktif mengajar ilmu hukum di Universitas Suryadarma Jakarta dari tahun 2016 hingga 2017. Kemudian, tahun 2017 hingga sekarang, Edi

Hasibuan tercatat sebagai dosen tetap di Universitas Bhayangkara Jakarta.

Banyak karya Edi Hasibuan yang dimuat berbagai jurnal nasional dan internasional soal kinerja kepolisian. Edi Hasibuan telah menulis sejumlah buku, antara lain: *Dari Balik TKP*, yang diluncurkan Kapolri Jenderal Pol. Drs. Badrudin Haiti tahun 2016; *Sketsa Kompolnas*, terbit tahun 2016 saat menjadi komisioner; dan terakhir buku *Viral Polisi*, yang diterbitkan tahun 2020.

Selain menjadi dosen, Edi Hasibuan juga tercatat sebagai Ketua Yayasan SMA Taruna Bangsa, Padang Lawas dan aktif menjadi narasumber di berbagai televisi nasional soal kinerja kepolisian. Pandangan Edi Hasibuan juga banyak dimintai pendapat oleh pers, baik itu media *online* dan media cetak di seluruh media nasional.

dunm

